



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN
DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO),
DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO),
DIREKTUR UTAMA PT PERTANI (PERSERO),
DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (PERSERO),
DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA,
DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO), DAN
DIREKTUR UTAMA PT PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO)
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II (dua)
Rapat Ke	: 3 (tiga)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa/21 Januari 2020
Waktu	: 10.30-17.30 Pukul WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Jl. Jend Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dilanjutkan oleh Daniel Johan S.E (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo
Acara	: Membahas: 1. Strategi dan Kebijakan dalam Mendukung Pengembangan Sektor Pertanian serta Kelautan dan Perikanan; dan 2. Lain-lain

Hadir

: A. Anggota DPR RI:

37 dari 55 orang Anggota Komisi IV dengan rincian:

1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)

9 dari 12 orang Anggota

1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
2. Drs. I Made Urip, M.Si.
3. Ir. Effendi Sianipar
4. Ono Surono, S.T.
5. Ir. Mindo Sianipar
6. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
7. DR. H. Sutrisno, S.E., M.B.A.
8. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.
9. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)

6 Dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil ketua
2. Firman Soebayo, S.E., M.H.
3. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
4. Ichsan Firdaus
5. Budhy Setiawan
6. Ir. Panggah Susanto, M.M.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

6 dari 6 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil ketua
2. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Endor Hermono, M.B.A.
4. Ir. Sumail Abdullah
5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
6. Ir. H. T. A. Khalid, MM.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

4 dari 5 orang Anggota

1. H. Sulaeman L. Hamzah
2. Sri Wulan, S.E.
3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
4. Yessy Melani, S.E.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

6 dari 6 orang Anggota

1. Daniel Johan/Wakil ketua
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
4. Farida Hidayati, S.H, M.Kn.
5. Edward Tannur, S.H.
6. Drs. H. Ibnu Multazam.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota

1. DR. Suhardi Duka, M.M.
2. Hj. Nur'Aeni, S.Sos., M.Si.
3. Muslim, S.Hi, MM.
4. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

5 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
3. Dr. Hermanto, SE., MM.
4. H. Johan Rosihan, S.T.
5. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota

1. H. Muhammad Syarifudin, S.T., M.M.
2. Haerudin, S.Ag., M.H.
3. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. K.H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.

10. Sekretariat Jenderal

C. Tamu Undangan:

1. Eko Taufik Wibowo, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
2. Dr. Febriyanto, S.E., M.Com., MTQM, Direktur Utama PT Pertani (Persero);
3. Karyawan Gunarso, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
4. Oksan O. M. Panggabean, Plt. Direktur Utama PT Berdikari (Persero);
5. Budi Sasongko, Direktur Utama PT Garam (Persero);
6. Farida Mokodompit, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Persero); dan
7. M. Yana Aditya, Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Assalamuallaikum warrahmatullahi wabarokatu,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang terhormat Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Berdikari, PT Rajawali Nusantara Indonesia, Perum Perikanan Indonesia, PT Garam, dan Perum Perikanan Nusantara, serta para hadirin yang saya hormati mengawali rapat hari ini marilah pertama-tama kita puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha esa karena berkat hikmat dan hidayahnya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat dalam keadaan sehat wal'afiat, sesuai dengan jadwal Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Masa Persidangan dua (II) Tahun

2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat BAMUS (Badan Musyawarah) tanggal 16 Desember, keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI tanggal 15 Januari 2020 pada hari ini selasa tanggal 21 Januari 2020 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan para Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, Dirut PT Pertani, Dirut PT Berdikari, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut PT Perum Perikanan Indonesia, Dirut PT.Perikanan Nusantara dan Dirut PT Garam dalam rangka membahas strategi dan kebijakan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian dan membahas strategi dan kebijakan dalam mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI telah dihadiri dan ditandatangani oleh 23 Anggota dan terdiri dari 8 Fraksi. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 246 dan Pasal 251 Peraturan Tatib DPR RI, hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Berhubung belum mencapai kuorum, maka rapat ini kita skors selama 5 menit.

(RAPAT DISKORS)

Bapak dan Ibu Anggota Dewan bukannya malas, karena pagi ini jadwalnya saya dengan Bapak Dedi ada rapat di Baleg, sebagian lagi ada yang Rapat Bamus, sebagian lagi ada yang Rapat BURT, karena double jabatan atau rangkap jabatan ini tidak bisa dihindari. Jadi kita skors dulu 5 menit dan nanti kita buka kembali.

Terima kasih.

54 wilayah, jadi tadi saya sampaikan ini ada 51 wilayah bukan surat, Ibu dan Bapak punya Staf Ahli. Jadi Staf Ahlinya jangan cuma nongkrong di ruangan, datang ke Sekretariat Komisi IV DPR RI tanyakan kapan jadwal di kota kami, kapan di kabupaten kami. Juga ada juga program Gemar Makan Ikan, contohnya Mbak Vita akan menyelenggarakan atau sudah. Yang lain *monggo* silakan koordinasi, tidak perlu Bapak dan Ibu Anggota Dewan cukup Staf Ahlinya saja.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Rapat Dengar Pendapat hari ini dimulai pada pukul 10.30 WIB akan diakhiri pada pukul 14.30 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau atas kesepakatan bersama dengan susunan sebagai berikut:

1. Pengantar rapat;

2. Penjelasan singkat, sebetulnya ini bukan penjelasan singkat, lain kali saya tidak mau, penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kalau singkat nanti asal-asalan nanti para Dirut ini nanti menjelaskannya.
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban para Direktur;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara rapat tersebut dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang berbahagia.

Sektor pertanian, kelautan dan perikanan sebagai salah satu penunjang kehidupan masyarakat memerlukan pertumbuhan yang kuat, pesat serta menjadi komponen utama dalam mengentaskan kemiskinan. Namun, beberapa permasalahan antara lain seperti penurunan produktifitas beberapa jenis komoditas permasalahan harga, tingginya kompensasi lahan pertanian, penurunan jumlah petani, keterbatasan sarana dan prasarana hingga penerapan teknologi yang masih rendah. Menyebabkan pengembangan sektor pertanian dan kelautan perikanan menjadi terhambat serta berdampak kepada ketahanan pangan.

Salah satu peran Pemerintah, Bapak Dedi ijin mewakili Komisi IV DPR RI ada Rapat Baleg. Salah satu peran Pemerintah dalam mendukung peningkatan perekonomian nasional melalui pengembangan sektor pertanian, kelautan dan perikanan adalah mendirikan BUMN yang bertujuan menjadi *agent of development* serta mengambil posisi untuk mencari keuntungan bagi negara. BUMN harus menjalankan bisnis dengan mengikuti tata kelola yang bagi *good government*. Dan disisi lain BUMN juga harus dapat berperan sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan terhadap publik.

Problem utama yang dihadapi BUMN terletak pada masalah tata kelola dan profesionalitas. Kinerja BUMN dituntut professional sama halnya dengan swasta. Tumpang tindih kebijakan regulasi merupakan salah satu permasalahan yang menyebabkan komunikasi antara kementerian, Pemerintah maupun BUMN menjadi kurang sejalan. Sehingga berdampak kepada disfungsi peran operator memproduksi maupun mendistribusikan sarana dan prasarana.

Oleh karena itu, pada hari ini Komisi IV DPR RI mengundang BUMN pangan bidang pertanian, kelautan, perikanan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan mendetail mengenai strategi kebijakan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian, kelautan dan perikanan. Selain itu, Komisi IV DPR RI juga ingin mendapatkan masukan menggali informasi mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan dan kebutuhan BUMN. Selanjutnya bersama-sama mencari solusi merumuskan langkah strategis yang dapat dilakukan dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Demikian pengantar ini, selanjutnya kami persilakan para direktur menyampaikan penjelasan terkait hal tersebut di atas. Saya hanya menambahkan sedikit, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Berdikari ini kalau bicara koleps ya sudah koleps dan ini tidak perlu ditutup-tutupi. Disinilah peran kita mencari solusi apakah saya tegaskan lagi, apakah Pemerintah akan melanjutkan membangkitkan mitra kerja Komisi IV DPR RI atau mau dilikuidasi. Kalau mau dilanjutkan ya Pemerintah wajib membantu PMN sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena kita lihat contohnya di periode yang lalu, dua periode yang lalu yang masa;lah beli jagung dan lain-lain itu ada Berdikari, ada Pertani, ada Sang Hyang Seri, juga Berdikari berikan modal kerja untuk pengembangan sapi dan lain-lain. Nah, ini kita acari solusinya apakah manajemennya yang tidak baik atau memang kekurangan modal.

Jadi silakan di mulai dari siapa dulu dijelaskan se jelas-jelasnya, Pak Eko tolong jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau Bapak tidak transparan bagaimana kita mau mencari solusi jalan keluarnya.

Silakan.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelumnya saya memperkenalkan diri nama saya Eko Taufik Wibowo. Saya baru menjabat sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia terhitung tanggal 2 Januari kemarin, jadi baru beberapa minggu. Saya bersama dengan teman-teman seperti tadi Bapak Pimpinan sampaikan bahwa kami yang fokus pada sektor pangan dan pertanian. Sebenarnya ada beberapa lagi BUMN yang mungkin belum terlalu clear untuk gabung dari sektor pangan dan pertanian.

Perlu saya informasikan dengan adanya kabinet baru, ada perubahan nomenklatur di penataan kelompok BUMN di Kementerian BUMN. Nah, kami masuk dalam kluster pangan. Jadi ada 9 BUMN yang di kelompokkan dalam satu kluster disebut kluster BUMN industry pangan. Disitu ada RNI, ada Berdikari, ada SHS, Pertani, kemudian Perinus, Perindo, Garam, kemudian ada PPI, dan BGR, mungkin tidak gabung dalam pagi ini.

Nah, maksud dan tujuan dari adanya pengklusteran ini adalah untuk memperkuat sinergitas dari BUMN-BUMN tersebut yang secara bisnis modelnya sebenarnya hampir bersamaan, sehingga secara tidak langsung

menata bisnis modelnya sehingga tidak tumpang tindih dan terjadi keselarasan dalam melakukan fungsi dari BUMN itu sendiri.

Nah, dari sektor pangan itu diupayakan menata juga dari sisi supply chain-nya. Seperti kita ketahui dari sektor pangan....

KETUA RAPAT:

Bapak Eko, ijin saya tanyakan ya.
Bulog tidak masuk?

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Tidak Pak.

KETUA RAPAT:

Kenapa? Bulog kan termasuk pangan.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Betul Pak, ini saya belum ada klarifikasi yang jelas Pak, tapi berdasarkan diskusi-diskusi karena waktu itu ada wacana untuk ada badan pangan. Jadi mungkin karena itu, sementara Bulog dipisahkan dulu.

KETUA RAPAT:

Oh, begitu.
Karena setahu saya kalau pangan jadi satu didalamnya ada Bulog.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Karena ada pemikiran seperti itu Pak.

Jadi saya tambahkan lagi, jadi perlu penataan *supply chain*. Seperti kita ketahui BUMN-BUMN ada yang fokus ke produksi, ada yang fokus kepada *processing* atau pengolahan, kemudian ada yang didistribusi. Jadi pengelompokkan ini menjadi satu kluster itu untuk mensinkronisasi fungsi *supply chain*.

Sebelum kesana jadi saya pagi ini memberikan gambaran sedikit tentang kluster pangan. Kemudian RNI secara perusahaannya sendiri dan nanti teman-teman akan menambahkan karena masing-masing isu juga secara transisi tetap harus dikemukakan karena itu kaitannya untuk pengembangan ke depannya dalam masa untuk mensinkronisasi tadi. Nah, kebetulan memang saya ditunjuk jadi ketua kelompoknya. Sebelumnya saya menjabat sebagai Dirut Berdikari. kemudian saya mendapatkan amanat

menjadi ketua kelompok dan dimutasikan ke Dirut RNI. Sementara sekarang di Berdikari ada PLT. Dirut Pak Oksan Panggabean.

Saya mulai mungkin ada paparan yang sedikit untuk mereview presentasi. Jadi saya memberikan refreshing sedikit tentang pangan sebenarnya. Jadi isu pangan ini merupakan isu global, kita semua sudah pahami bahwa di negara kita sendiri sebagai kontribusi PDB yang cukup tinggi. Jadi pangan merupakan tidak hanya isu global tetapi juga menjadi isu nasional. Faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi itu jelas dan kemudian isu di mana tingginya impor bahan makanan. Jadi ini juga yang bagian dari fungsi kami BUMN yang belum begitu optimal untuk meredam tingginya impor terhadap kebutuhan pangan di negara kita.

Halaman berikutnya, dari sisi makro ada 5 yang kami coba indentifikasi, kenapa isu pangan dan pertanian ini menjadi sangat vital. Pertama adalah peningkatan permintaan pangan, tidak hanya di dunia, di negara kita yang tingkat populasi penduduknya terus bertambah tentunya peningkatan permintaan pangan dengan segala varitasnya dan segala kebutuhan masing-masing masyarakatnya terus meningkat. Kemudian adanya urbanisasi, tingkat urbanisasi yang tinggi tentunya di perkotaan terjadi peningkatan dalam satu wilayah tertentu yang terus cukup tinggi.

Kemudian dari sisi harapan akan meningkatnya kualitas pangan. Tuntutan kemajuan ekonomi tentunya juga tidak bisa dipungkiri juga menuntut kualitas pangan yang semakin tinggi dan era keterbukaan juga jenis-jenis pangan yang jenisnya semakin banyak beragam menuntut juga peningkatan kualitas dari bahan baku itu sendiri.

Yang keempat adalah infrastruktur jalan dan pertanian yang buruk. Dengan berkembangnya populasi penduduk sehingga adanya perubahan areal daripada pertanian maupun industry yang terkait dengan pangan itu belum diimbangi dengan peningkatan pembangunan infrastruktur yang mensupportnya. Sehingga kecepatannya tidak bisa ikut mengimbangi tuntutan pertumbuhan produksinya.

Kemudian yang kelima adalah terkait dengan point tiga tadi, bahwa perubahan frekuensi pangan. Jadi misalnya ketika kebutuhan akan beras itu mulai bergeser walaupun sumbernya mungkin masih ada kaitannya dengan beras. Jadi sudah lari kepada jenis makanan mie, roti dan sebagainya. Jadi ini lima isu yang sangat perlu kita perhatikan kedepannya.

Nah, kemudian terkait dari distribusinya. Disini saya coba petakan, jadi rantai pasokan pertanian seperti saya katakan tadi di depan dari sisi *supply chain*-nya. Itu bisa dibagi tiga dari sisi hulu, mainstream, maupun dari sisi hilirnya. Nah, dari sisi hulu itu dari sisi input, di mana kualitas bahan baku itu sangat dibutuhkan terus secara continue peningkatan kualitasnya. Seperti kita ketahui sampai sekarang untuk beli sapi saja kita masih untuk sapi Bakalan maupun indukan masih tergantung dengan impor. Dari sisi benih padi dan segala macam tekanan teknologi, pemain-pemain besar juga harus tetap diikuti dengan BUMN-BUMN yang selama ini menguasai dalam segmen ini.

Kemudian dari sisi *grower*-nya pertumbuhannya juga sama, hampir semua komoditas pangan itu kualitasnya itu belum bisa mengimbangi untuk bisa menyelaraskan percepatan dari pertumbuhan kebutuhan pangan. Dari sisi mainstream, dari pergudangan, *food manufacture* itu banyak dikuasai oleh pemain-pemain internasional maupun swasta besar, sehingga menciptakan harga produk yang sangat tinggi. Jadi ketergantungan masyarakat terhadap produk-produk yang berharga tinggi juga sangat kuat, karena mereka menguasai segmen ini.

Kemudian dari sisi hilirnya juga sama, sisi hilirnya karena tidak menguasai *processing*-nya sehingga mengalami kesulitan dari sisi retail, pemasarannya. Kita ambil contoh produk yang khususnya menengah ke bawah, yaitu satu mata rantai pasokan ini jelas-jelas kita masih sangat lemah.

Dari sisi tadi muncul pemikiran dari kami, tim dari BUMN untuk bahwa ada tiga peran penting dalam membuat rantai pasokan pertanian tadi, pangan dan pertanian, yaitu dari sisi percepatan, penguatan maupun stabilitasasi. Dari sisi percepatan perlunya adanya mengurangi matat rantai daripada pemasokannya. Jadi selama ini kita sulit punya akses langsung kepada sumbernya misalnya. Kita misalnya mau impor sapi juga berbelit-belit, kasus bawang putih dan segala macam itu mata rantainya belum betul-betul kuat, belum *strong* sebagai BUMN. Jadi tuntutan mata rantai berikutnya sangat berpengaruh dari sisi efisiensi.

Kemudian dari sisi penguatan, tantangan pertama teknologi khususnya *industry 4.0* dan integrasi dari ekosistem dari pertanian sendiri ini juga suatu PR yang cukup besar perlu untuk kita perhatikan. Dan pada akhirnya adalah dari sisi stabilisasi, dari sini juga perlu dukungan yang sangat kuat seperti tadi IT, sumber daya manusianya, fokus kepada inovasi dan kemudian data analisis yang perlu sangat kuat untuk didukung.

Itu sekilas gambaran tentang secara singkat tadi saya sampaikan, penguatan supply chain, fungsi BUMN ada dimana dalam penguatan *supply chain* itu sambil kedepannya nanti akan ditata terhadap BUMN yang ada itu fokusnya ada dimana, disinkronisasikan menjadi satu industry yang terintegrasi.

Berikutnya dari sisi RNI, RNI sendiri saat ini karena ada perubahan bisnis modelnya, di mana ada penataan dari sisi anak perusahaan yang dimiliki. Mungkin Bapak-bapak mengetahui bahwa selama ini RNI itu memiliki beberapa sektor anak perusahaan, bergerak dalam beberapa sektor. Ada perkebunan sawit, kemudian tebu, teh dan farmasi dan termasuk jasa sektor trading. Nah, yang farmasi sudah dikonsolidasikan kebijakan dari BUMN masuk ke kluster farmasi, dalam hal ini holding farmasi yang sedang dalam tahap persiapan. Kemudian tinggalah bisnis-bisnis yang masih tinggal di RNI adalah dari sisi industry tebu, kepala sawit, teh, kemudian ada jasa trading dan industry seperti alat-alat kesehatan yang tidak begitu besar volume bisnisnya.

Perkembangannya diproyeksi tahun 2019 yang masih dalam tahap finalisasi auditnya itu ada aset tercatat sekitar 14,1 triliun ada kenaikan sekitar 5%. Kemudian penjualannya tercatat sekitar 6,58 triliun ada peningkatan 27% dari tahun 2018 tahun sebelumnya. Ebitda sekitar 703 miliar, peningkatan sekitar 1% dari tahun 2018. Namun, dari sisi profit margin tertekan sedikit sekitar 2,73 karena dalam tahun 2019 ada pelepasan tadi salah satu anak perusahaan yang di farmasi.

Kemudian dari industri yang kuat, yang kontribusinya cukup signifikan adalah dari sisi industri tebu. Jadi kontribusi RNI ada sekitar 11,7% dari produksi tebu nasional dan ini juga banyak isu disitu. Saya rasa Bapak dan Ibu juga ikut memonitor bahwa produktifitas pabrik gula kami juga kedepannya sangat-sangat perlu diperhatikan, perlu support dari sisi regulasi maupun dari suntikan permodalan yang lebih kuat dan perlu penataan secara finansialnya harus jauh lebih baik dari saat ini.

Saya kira itu untuk isu-isu dari industri tebu mungkin masih isu-isu yang seperti saya sampaikan tadi penguatan sinergi BUMN, hubungan kebijakan. Dari sisi internal kami, kami harus meningkatkan riset untuk meningkatkan produktifitas. Kalau dari data neraca gula saya rasa untuk tahun 2019-2020 tidak ada isu, walaupun dalam Rakor tahun Desember 2019 itu ada wacana untuk impor gula, walaupun kaitannya ke gula industri. Cuma dalam bulan-bulan ini tidak ada lagi Rakor untuk memfinalisasi tentang rencana pengadaan gula tahun 2020 pak.

Saya kira itu mungkin yang dari RNI dan sekilas tentang gambaran BUMN sektor pangan. Nanti sambil diskusi bisa kita elaborasi lagi dan tentunya dalam kesempatan ini kami juga memohon masukan-masukan yang konstruktif terhadap kedepannya dengan wacana klusterisasi BUMN industri pangan ini karena pada akhirnya adalah untuk stabilisasi pangan kita.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Dirut.

Kalau bicara pangan PTPN itu salah satu penghasil pangan juga loh, gula, CPO, teh. Itu tidak masuk dalam kluster ini?

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Sementara tidak Pak, karena mereka sudah ada holdingnya, holding kebun PTPN.

KETUA RAPAT:

I sampai XIV ada holdingnya.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Iya, jadi mungkin nanti *long term*-nya itu akan dikondolidasikan lagi. Apakah yang kebun-kebun sawit kami kesana, yang gula digabung kesini, itu masih dalam tahap kajian.

KETUA RAPAT:

Silakan.

DIREKTUR UTAMA PT PERTANI (PERSERO) (Dr. FEBRIYANTO, S.E., M.Com., MTQM.):

Terima kasih Bapak Eko.

Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Pimpinan Komisi IV DPR RI, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan karena kami untuk memaparkan beberapa hal terkait dengan PT Pertani Persero. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Bapak dan Ibu yang kami hormati, nama saya Febriyanto. Saya menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertani Persero sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu. Sebelumnya saya Direktur Komersial di Perum BULOG.

Pertani ini memang menghadapi seperti yang disampaikan Bapak Ketua tadi *financial distresses*. Paling dominan *financial distresses* yang dihadapi oleh Pertani terutama sejak penugasan atau PSO kepada Pertani di cabut diganti dengan model komersial lewat *e-catalog*.

Nah, sebelum saya masuk kesana mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan PT Pertani secara umum. Pertani ini berdiri sejak tahun 1959 jadi usianya sudah kurang lebih 61 tahun, di mulai sebagai badan usaha Kementerian Pertanian sehingga kalau boleh dikatakan sebetulnya Pertani dan Sang Hyang Seri ini adalah anak kandungnya Kementerian Pertanian. Tapi memang kalau boleh kami sampaikan kami berharap mudah-mudahan dengan status sebagai anak kandung Kementerian Pertanian kita sedikit mendapatkan semacam atensi perhatian dari Kementerian Pertanian. Karena terkait dengan kondisi Pertani dan Sang Hyang Seri yang rasanya sampai dengan hari ini tidak terlalu menggembirakan.

Next, ini nilai-nilai yang baru kami bangun Pertani itu harus professional, adaktif, disiplin, integritas, kerja sama dan ulet, ini kalau kita singkat PADIKU. Jadi sebetulnya merk benih kita yang kita keluarkan untuk pasar.

Next, sekedar informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian. ada 4 *core business* Pertani pada saat ini, yang pertama kita bisnis perbenihan kita

menyiapkan benih padi hibrida, benih jagung hibrida, kemudian kita juga punya stok benih bawang putih. Kemudian diperberasan kami menyiapkan beras medium, beras premium dan beras-beras organik, beras merah dan beras hitam dan baru kami *launching* adalah beras bergizi atau beras fortifikasi yang sebetulnya merupakan arahan dari Bapak Presiden juga dalam rangka kita mengatasi anti *stunting*.

Kemudian kami juga berbisnis pupuk, pada umumnya kurang lebih 95% kami mendistribusikan pupuknya pupuknya holding. Kami juga punya produk pupuk-pupuk organik. Kemudian yang keempat, bisnis kami adalah di sarana pertanian seperti penyewaan jasa *dryer* dan penyewaan pergudangan.

Kemudian ini profil kami Pertani kami sampai hari ini, karyawan kami 725 orang, masuk katagori sebetulnya perusahaan kecil. Sebelumnya 850 jadi sudah cukup banyak berkurang setahun ini. Kemudian kami punya 4 kantor wilayah, baru kami restrukturisasi dari 7 kantor wilayah menjadi 4 kantor wilayah. Kantor cabang 28 dari sebelumnya 35 kantor cabang dan seterusnya. Kami punya 65 unit *dryer* dan 467 unit gudang yang membantu kami memproduksi.

Kemudian *next*, Bapak dan Ibu sekalian, ini laporan keuangan kami periode 5 tahun terakhir seperti yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu tadi, bahwa Pertani sampai hari ini masih menghadapi kondisi *financial distresses*. Paling terpuak kita memang sejak tahun 2018 pada saat penugasan itu diserahkan kepada *market*. Kalau kita lihat ini memang keuangan kita semakin memburuk tapi di dalam sendiri kami berusaha meningkatkan efisiensi sehingga walaupun kita pada posisi rugi sampai dengan hari ini *Insyah Allah* ruginya lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kemudian *next*, kalau kita lihat dari per sektor Bapak dan Ibu bisa lihat dari sisi perbenihan kita volume penjualannya terus menurun. Pupuk juga sama, pupuk juga semakin menurun karena alokasi pupuk bersubsidi dari pupuk holding katanya juga semakin berkurang. Kami berharap mudah-mudahan dengan sinergi BUMN volumenya bisa kita dorong lagi Bapak Pimpinan.

Kemudian diperberasan ini yang sebetulnya harapan kita karena ini murni *free market*. Kita mendorong untuk selalu meningkatkan penjualan beras kita. Cuma memang ada isu di kita, di Sang Hyang Seri juga rasanya sama beras ini kan regulated diatur lewat mekanisme harga eceran tertinggi, sehingga kita juga agak repot ini berdagang beras saat ini. Sehingga kami mulai tahun 2019 fokus hanya menjual beras premium Pak Ketua. Beras premium yang marginnya lebih menguntungkan buat kita dibandingkan beras medium.

Kemudian yang lain-lain kalau kita lihat disitu ada sedikit anomali angka di tahun 2018, 2017. Pertani pada waktu itu mendapat alokasi impor bawang putih tapi di 2019 kita tidak dapat alokasi bawang putih lagi karena pada waktu itu ada sedikit isu kaitannya dengan masalah legal, sehingga

kami di *black list* oleh Kementerian Pertanian tapi *alhamdulillah* sejak Januari kami sudah mendapatkan ijin lagi untuk importasi bawang putih.

Kemudian ini sekilas informasi tentang model bisnis perbenihan di Pertani. Ini yang membedakan kami dengan kawan kami Sang Hyang Seri. Kalau kami model penangkaran benihnya kami bekerja sama dengan kelompok tani, jadi kami tidak punya lahan sendiri tapi kami bekerja sama dengan kelompok tani. Beruntung kawan kami di Sang Syang Seri yang punya lahan cukup luas sehingga bisa mengoptimalkan sarana pertaniannya.

Next, kemudian ini produk kami Pak, benih padi, benih jagung hibrida kami punya cukup banyak brand variasi yang kami coba tawarkan kepada Pemerintah yang selama ini juga menjadi *of taker* benih kita. Jadi sampai hari ini pun masih cukup dominan *market size* kita di Kementerian Pertanian, walaupun kita sudah di-*bidding* lewat e-catalog tapi kami masih dominan kurang lebih mungkin 80% masih kita supply kepada Kementerian Pertanian lewat e-catalog.

Next, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat sejak PSO benih bersubsidi itu dihapuskan menjadi *free market* kalau kita lihat dari tahun kepada tahun memang kemampuan kita untuk memasarkan benih kita semakin menurun. Di tahun 2019 ada peningkatan sedikit tapi di jagung kami sangat drop kemampuan kita memasarkan karena ada perubahan *spec* dari Kementerian Pertanian yang agak kurang menguntungkan bagi Pertani.

Kemudian ini beberapa isu sebetulnya yang agak teknis, Bapak Pimpinan mohon maaf Pak, tapi mungkin perlu kami sampaikan karena ini juga bagi kami menjadi kendala teknis juga dalam konteks kami melakukan komersialisasi produk-produk Pertani. Yang pertama harga Pak, harga produk benih yang sekarang di pasarkan lewat e-catalog itu harganya turun terus Pak. Jadi di samping memang marginnya tipis dalam persepsi kita, harganya juga semakin tertekan sehingga kami agak repot juga. Pertani ini overhead cost-nya agak cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan perusahaan swasta yang disampaikan tadi oleh Bapak Pimpinan sehingga kita dengan penurunan harga lewat e-catalog ini kami juga agak repot.

Kami berharap mudah-mudahan Bapak-bapak di Kementerian Pertanian bisa meninjau ulang masalah harga e-catalog. Rasanya yang berkeluh kesah tentang harga benih lewat e-catalog itu bukan hanya kami termasuk kawan-kawan kita pelaku benih swasta juga menyampaikan aspirasi yang sama kepada Bapak-bapak Dirjen di Kementerian Pertanian.

Kemudian juga yang menjadi masalah buat kami Pak, sehingga mengganggu operasional kami bahwa untuk distribusi benih itu biayanya dibatasi hanya Rp600/Kilo jauh dekat, sementara menurut kontraknya harusnya *at cost*. Ini bagi kami juga merugikan karena untuk daerah-daerah yang jauh akhirnya kami malah harus bersubsidi negara dengan tarif yang Rp600 ini.

Kemudian ini sekedar perbandingan harga tadi yang sudah kami sampaikan bahwa harganya semakin turun, kemudian biaya angkut juga dipatok fix di harga Rp600 sehingga kami agak repot melakukan distribusi terutama ke bagian tengah Indonesia dan bagian timur Indonesia.

Kemudian yang lain mungkin yang menjadi isu yang perlu kami sampaikan sebagai masukan ke teman-teman Kementerian Pertanian. Masalah lisensi benih jagung hibrida dari Balitbang Kementerian Pertanian kami berharap mudah-mudahan ini bisa dialokasikan juga kepada BUMN sehingga kita bisa membantu pengembangan benih jagung hibrida ini.

Kemudian ada isu juga masalah keterbatasan persent atau benih induk dari Kementerian Pertanian. Kami berharap mudah-mudahan kami diberikan kewenangan juga untuk memproduksi persent sehingga kita bisa membantu penyebaran benih induk ini. Rasanya kita punya cukup kompetensi dan pengalaman untuk melakukan itu.

Kemudian ini juga masalah administrasi agak teknis Bapak Pimpinan mohon maaf, terkait dengan kelengkapan administrasi dokumen, kemudian aturan uji kesehatan kita berharap mudah-mudahan ini bisa dibikin lebih mudah kaitannya dengan penagihan dan percepatan penyaluran benih kepada kelompok tani.

Kemudian yang kedua, di sektor perberasan seperti yang saya sampaikan tadi ini murni komersial bisnis bagi kami sehingga semestinya ini tergantung kepada internal Pertani sendiri sejauhmana kita bisa meningkatkan volume lewat penetrasi ke pasar modern market, Horeka ataupun pasar Pemerintah dan BPNT.

Next, ini brand beras yang kita pasarkan saat ini, di beras premium ini kita punya brand beras Anggrek Pelikata dan ratu Mutiara. Kemudian kami sedang menyiapkan beras khusus, beras merah, beras hitam, kami siapkan lahan di Jawa Tengah dan Kalimantan Bapak Pimpinan. Kemudian ini juga rencananya kami siapkan untuk pasar ekspor kami kemarin di fasilitasi oleh Bapak Dirut RNI bertemu dengan calon mitra kita di Timur Tengah. Mudah-mudahan ini menjadi potensi pasar ekspor kita.

Next, kalau berbicara beras rasanya *customer* kita cukup *branded* Bapak dan Ibu sekalian. Itu Mc Donald, Burger King, Garuda Aero Food dan Richees, itu menjadi *customer* kita. Jadi rasanya kita punya cukup *tools*, punya *power* untuk meningkatkan pemasaran beras kita.

Kemudian diperberasan kami berharap mudah-mudahan kami mendapatkan dukungan untuk memberdayakan lembaga sertifikasi kaitannya dengan pengembangan beras-beras khusus. Ini mungkin memang ada sedikit isu teknis di Ditjen Tanaman Pangan di Kementerian Pertanian. Kemudian kami juga barangkali sekedar mensosialisasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kami punya produk baru yang kita sebut sebagai beras fortifikasi, yaitu adalah beras bergizi yang kita siapkan sebagai program anti *stunting* dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah.

Kemudian *next*, terkait dengan pupuk kita sebetulnya selain mendistribusikan pupuk bersubsidi pupuk Indonesia *holding*. Kami sendiri mempunyai produk pupuk organik tapi skalanya masih kecil. Kita punya pupuk organik yang fungsinya adalah untuk memperbaiki struktur tanah, kemudian ada juga kita memiliki yang namanya *procal* yang fungsinya adalah meningkatkan PH tanah, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Ini juga kita coba penetrasi kepada komersial market.

Next, barangkali itu Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sedikit paparan dari kami tentang kondisi *update* PT. Pertani Persero. Untuk hal-hal yang lain barangkali bisa kita explore lebih lanjut di forum tanya jawab.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami kembalikan kepada Bapak Dirut RNI.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Terima kasih.

Apa langsung berikutnya Pak, dari Garam.

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami muliakan Bapak Pimpinan Komisi IV DPR RI, Para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami muliakan.

Terima kasih PT Garam telah menyampaikan sedikit paparan barangkali untuk bahan diskusi kita.

Bapak dan Ibu yang kami muliakan.

Memang beberapa hari terakhir, isu garam telah mencuat sampai hari ini. Dimana ada sekitar 8 *current issue* yang menyangkut tentang garam, dimana tidak akan henti-hentinya Pemerintah ini memberikan perijinan impor. perijinan impor disini tentunya memang untuk clustering industry. Memang kalau kita tilik sebenarnya di dalam clustering industry itu ada satu *debatable* khususnya yang aneka pangan. Sesungguhnya kalau kita mengacu kepada produksi dalam negeri tahun ini sangat cukup aneka pangan termasuk untuk konsumsi rumah tangga. Dengan asumsi musim kering pada tahun ini ada sekitar 19 dekade kering 4 bulan kurang 10 hari, produksi nasional di atas 2,5 juta ton. Sehingga sesungguhnya untuk kluster aneka pangan ini harus diminimalisir khususnya terhadap impor-impor itu.

Akibat daripada itu Bapak dan Ibu, memang pada saat ini dari stok nasional kurang lebih masih 1,9 juta ton per akhir 2019. Namun, kemarin ada berita juga atas Ratas di Kementerian terkait yang diikuti oleh KKP dan perindustrian masih ada mengalokasikan impor kurang lebih di atas 2,5 juta ton. Sehingga psikologis terhadap garam dalam negeri bagi petani khususnya PT Garam yang plat merah juga menjadi psikologis penurunan harga. Pada tahun ini PT. Garam dari target rata-rata harga tahun yang lalu sekitar 1.200, tahun ini hanya bisa menjual dengan harga rata-rata hanya 600, luar biasa. bahkan hari ini pun kami garam PS kita kualitas II di dalam PT Garam dan rakyat kelas satu itu turun drastis. Di Indramayu, Cirebon konon kabar kami ikuti hari ini FOT di atas truk hanya 300 kilo gram per kilo, luar biasa Pak.

PT Garam kita menjual pada akhir Desember kemarin masih berkisar 590 sekarang sudah minta turun lagi, padahal PT Garam sudah berusaha tahun ini sepanjang sejarah kita terbesar. Sepanjang sejarah adanya PT Garam tahun ini produksi kita terbesar, sebesar 450 ribu ton kalau kita lihat di dalam kurva kita di dalam produksi itu rata-rata pada tahun sebelum-belumnya adalah berkisar 250 sampai 300.

Pada 2 tahun terakhir PT Garam telah melakukan 3 optimalisasi dan revitalisasi besar terhadap *on farm* kita. Kita memiliki sejak jaman Belanda sampai hari ini PT Garam hanya memiliki 5000 hektar. Dan tahun ini saya bisa merevitalisasi *alhamdulillah* kurang lebih 1.300 hektar Bapak. Dan itu bisa meningkatkan produksi hampir 1000-5000 ton dalam tahun ini.

Yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu, dengan konsekuensi terhadap impor secara psikologis pasar, harga yang rendah sehingga petani, ini kelemahannya pada data. Data yang di masuk 1,9 juta ton itu apakah data di gudangnya petani, di tambah dengan gudangnya yang diprodusen, apakah termasuk para pedagang-pedagang yang ada. Baik kami lihat dalam BPS, KKP, Perindustrian memang ada beberapa selisih perbedaan disitu.

PT Garam yang jelas tahun ini dengan 450 ribu ton di tambah dengan hasil penyerapan garam rakyat kita dari hasil PMN tahun 2015 sampai dengan tahun ini kita bisa menyerap garam rakyat sebesar 156 ribu ton. Dan itu sudah tinggal sisa kurang lebih 3 miliar pada semester pertama ini. Kalau kita belikan kepada garam rakyat dengan harga 600 tidak mau, dia mintanya rata-rata 1.500 sampai dengan 2.000. Padahal perlu diketahui bahwasanya adanya impor dari Australia yang kebetulan geografisnya terdekat dengan kita sampai di Indonesia maksimal hanya 40 Dolar per ton, 650 sampai 700 ribu per ton, padahal rakyat tuntutananya kepada tata niaga kita, *floor price* kita minta HPP produksi itu adalah 1.500-2.000. Sebagai pengusaha tentunya pasti milih yang itu.

Barangkali sebagai guyonan bagi kami memang kenapa Australia murah di Indonesia, di Australia itu basic harga di dalam FOT, harga di ladang itu sekitar 17 sampai 19 US Dolar ditambah dengan *freed* dan sebagainya sampai di Indonesia adalah 36 sampai 40 Dolar, 650 sampai 700 ribu per ton. Sedangkan di Indonesia permasalahan yang kedua, karena klimatologinya hanya 4 bulan sulit untuk menembus SNI 32 itu di dalam persyaratan industri

persyaratan industri itu salah satunya NACL harus diatas 97%. Kalau klimatologi kita hanya 3 bulan sampai 4 bulan suatu hal yang mustahil, hal yang mustahil.

Kedua adalah MG-nya, karena proses membikin garam itu harus diputuskan bosem yang kuat, evaporasi yang kuat dan luas ditambah kristalisasi yang memungkinkan. Jadi membikin garam itu adalah 10%-nya untuk bosem, 70% itu adalah untuk evaporasi yang 20% adalah untuk kristalisasi. Sedangkan Indonesia terbesar adalah rakyat, memiliki *on farm* 25 ribu hektar. Desain lahannya tidak memiliki itu. Dalam membikin garam rakyat hanya mengandalkan pasang surut air laut atau hanya menggali sumur-sumur rembesan yang ada di sekitar *on farm*-nya, sehingga kalau kita itu hanya memiliki seperempat hektar, 3 hektar, mereka dalam satu tahun mereka tidak lebih daripada 100 ton yang dimiliki.

Sedangkan untuk meningkatkan terhadap industri ada dua permasalahan Bapak. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan *on farm*, untuk meningkatkan *on farm* ini adalah yang memungkinkan peluangnya adalah di Indonesia tengah dan timur. Di Indonesia tengah dan timur ini adatnya memang ulayat, Pemerintah dalam membuka *on farm* ini sampai hari ini PT. Garam 3 tahun hanya mendapat 300 hektar, itu yang kita intiplasmakan dengan rakyat di Nusa Tenggara Timur di Kupang. Nanti kalau ada waktu Bapak bisa kesana karena DPR RI sebelumnya juga kesana.

Dan yang kedua, mereka-mereka yang mendapatkan HGO baru belum maksimal dalam dua tahun terakhir. Apa permasalahannya? Satu adalah memang rupanya tenaga Pak. *Culture* yang ada disana itu untuk membikin garam memang belum biasa, karena membutuhkan 24 jam harus ada di *on farm*. Kedua, adalah seharusnya di Australia pak, di Australia itu adalah garam terbaik dengan sistem evaporasi, artinya memiliki ketahanan panas selama satu tahun penuh. Jadi di Australia itu tepatnya di barat daya ada namanya *user loop* di Perth bagian barat daya terkenal dengan namanya Sakbe, Sakbe ini memiliki hampir 25 ribu hektar dan musim kemaraunya sepanjang tahun. Sehingga mereka selama 22 tahun membikin garam tidak diambil, jadi kira-kira 2 meter dari dasaran. Kalau mereka meng-harvest denan traktor itu garamnya keras banget, kitu NACL-nya di atas 97%. Bayangkan dengan Indonesia yang hanya 3 bulan. Dan yang kedua salinitas air laut yang di Australia itu adalah di atas 3 derajat bumi, di Indonesia sudah 2,5 derajat bumi, karena sudah banyak aliran-aliran sungai yang sudah tercemar dengan sungai-sungai besar. Ini pengaruh terhadap mineral garam di china ada yang terbesar dua thianjin dan wel pang kami sudah kesana, musim kemaraunya tujuh sampai delapan bulan tepatnya di timur laut china disitu ada wel pang dia kurang lebih Hampir 35 ribu hektar, di Tian Jin itu ada sekitar 25 ribu hektar persis *water enginer*-nya seperti PT Garam. Cuma yang membedakan adalah klimatologinya, sehingga total di Cina itu selain solar evaporasi memiliki 3 *recources*. Yang pertama adalah garam tambang *salt mine*, yang kedua garam danau *lake salt*, yang ketiga adalah sumur garam *salt wells*. Setiap ada puncak gunung disitu ada garam, kalau di kita hanya di Kalimantan paling utara. Yang terakhir baru kita ada solar evaporasi. Karena total seperti itulah dengan melakukan *resources* 4 itu di Cina sampai

sekarang 60 sampai 70 juta ton. Tetapi mereka terserap bahkan masih impor dari Australia dan India untuk industri. Hal itulah pada tahun 2017 sampai 2019 PT. Garam telah melakukan transformasi produksi, baik di hulu maupun di hilirisasi Bapak.

Di *on farm*-nya kami telah merevitalisasi hampir 1500 hektar yang ada di Sumenep, Gresik Manyar, dan sebagian ada di Sampang. Yang dulu mulai jaman Belanda pasif Pak, tahun ini sudah hampir rampung 95% menjadi *on farm* atau menjadi lahan kita.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Enggih.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Sebetulnya yang disampaikan Bapak mungkin bagi teman-teman yang ingin belajar garam iya, tapi kita ini mau berhitung tentang garam Indonesia. Jadi saya pribadi mohon maaf tadi ya, mendengarkan dari tadi kita sedang kuliah. Kita itu ingin data garam kita, kenapa kita rugi, kenapa infrastruktur kita jelek, kurangnya apa bantuan negara, PMN-nya kurang atau apa saingan kita swasta atau yang mana. Nah, kira-kira kita butuh data itu.

Jadi kita mau bantu apa, disini kita tidak bisa bantu ilmu pengetahuan. Saya basisnya ilmu agama, teman-teman basisnya ada yang bukan ilmu kegaraman. Jadi kita butuh data disini bagaimana petani garam bisa maju, bagaimana garam Indonesia bisa maju. Hambatannya lawan kita itu adalah impor, yuk kita putuskan kita tolak impor garam. Itu yang harus disampaikan Bapak kepada kita. Kalau kita kajiannya panjang kayak begitu, kita harus Kunker kalau begitu, FGD lah kalau disampaikan begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIAWNDONO):

Terima kasih Bapak Haerudin.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Interupsi Ketua, Pimpinan interupsi.

KETUA RAPAT:

Bapak Johan, boleh kita dengarkan paparan dahulu sebelum kita nanti bertanya-bertanya.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Bukan bertanya, saya interupsi saja soal harga itu tadi data dari mana. Kita baru selesai Reses Bapak Ketua, di kampung saya harga garam itu 300 ribu per ton. Bapak bilang rakyat kita minta 1.500, inikan mengusik rasa ke-Indonesia kita, penjelasan tentang garam ini. Jangan cari alasan untuk impor Pak, Komisi IV DPR RI akan mendesak untuk kita berhenti impor.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bapak-bapak, Bapak Haerudin dan Bapak Johan.

Bapak Dirut, tanpa mengurangi rasa hormat sebenarnya yang dimaksud kawan-kawan ini baik juga semangatnya. Tapi ada baiknya juga sebenarnya kita mendengarkan sedikit penjelasan, meskipun kalau bisa dipersingkat lagi, mohon dipersingkat. Dan mungkin nanti mengenai sumber atau poros dari harga-harga nanti bisa diperjelas.

Intinya Bapak sudah tahu semangat Komisi IV DPR RI seperti apa, dan dalam kebijakan impor Bapak Johan itu bukan wewenang Bapak Dirut PT Garam. Jadi mari kita dengarkan dahulu, kita bersabar sedikit, kita membuka pikiran juga untuk menerima ilmu. Saya pun ini ada beberapa hal teknis menurut saya penting untuk kita ketahui juga, jangan kita hanya teriak-teriak tolak impor tetapi kita tidak tahu akar masalahnya, sebabnya teknisnya juga seperti apa. Karena masalah....

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan, interupsi.

KETUA RAPAT:

Bapak Haerudin silakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Begitu maksudnya, kita itu bukan tidak mau mendengar apa alasan teknis atau kajian keilmuan tentang garam bukan. Tapi kita disini membicarakan tentang bagaimana garam kita maju. Kalau itu urusan ahli *monggo*, tapi kita ingin tahu apa yang tantangan terbesar dari PT Garam kita itu, impir atau apa. Nah, baru kita disini membuat keputusan bersama. Tadi ada penyampaian salah satunya, bahwa Indag sama Kementerian Kelautan menyepakati impor sekian. Itulah modal Kom IV DPR RI untuk memanggil Kelautan. Benar tidak Kelautan memberikan ruang sampai sebesar itu dan merugikan petani garam kit, itu tugas Komisi IV DPR RI. Nah, kalau kajian yang tadi tugas-tugas pribadi-pribadi untuk tahu garam.

Nah, maksud saya apakah tidak lebih bijaksana Bapak Dirut menyampaikan ini loh garam kita sekarang kondisinya. Kami butuh dukungan politik Komisi IV DPR RI, kira-kira disitulah.

KETUA RAPAT:

Baik Bapak Haerudin.
Kami persilakan Bapak Dirut.

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

Sebenarnya ada di dalam slide kompli, maka tadi saya laporkan karena Bapak Haerudin kemarin juga sudah minta kepada kami. Saya terima kasih Bapak Haerudin.

Yang saya sampaikan memang kualitas kita jauh Pak, untuk industri itu SN itu harus hasilnya di atas 97. Dan rasanya tidak mungkin Indonesia, dengan klimatologi yang hanya 3 bulan tidak mungkin. Kontennya tidak NACL, tapi MG-nya harus di bawah 0,06%. Berarti Indonesia rata-rata PT Garam saja masih 0,3 kenapa? Desain engineer-nya itu tidak didukung dengan klimatologi yang lama.

Apa yang dilakukan kita, mohon disitu ada penjelasan-penjelasan kami adalah mencoba teknologi baru. Yang pertama adalah inovasi terhadap geomembran, sudah kita lakukan. Ini sumbangsuhnya adalah lebih 30%, termasuk ini hasil PMN Pak Haerudin. Yang kedua, ini adalah prisma, ini kami coba di Cirebon sama Indramayu. Prisma hasilnya bagus tetapi membutuhkan *cost* yang tinggi, bukan *cost* yah tapi investasi yang tinggi karena untuk plastik ini per meternya kita lebih daripada hampir 2,5 juta. Bayangkan kalau kita punya 5.000 ribu hektar. Bestekin inii dilakukan di Indramayu, di Cirebon, hasilnya bagus cuma skalanya kecil. Satu-satunya yang kita lakukan supaya besar adalah merubah, merevitalisasi desain dan rakyat harus diintergrasikan Pak. Ini tantangan, kalau rakyat diintergrasikan luas 25 ribu hektar itu harus siapa yang menjadi bozem, siapa yang menjadi evaporasi, milik siapa yang menjadi kristal. Ini rasanya sulit.

Next, berikutnya adalah penyerapan garam rakyat karena masih tinggi. PT Garam tahun 2015 mendapat PMN khusus untuk penyerapan garam rakyat adalah sebesar 205 miliar yang sekarang sisa kurang lebih semester I tinggal 3,5 miliar. Dan ini seharusnya bisa menolong, karena pada saat kami menyerap 2 tahun sebelumnya Pak, harga itu memang rata-rata 1.200 Pak. Kami sampaikan tadi Bapak, harga 300 rakyat Pak, bukan 1.200 itu harapannya. Hari ini di Cirebon 300 di atas truk, di Madura juga sama 300-400. PT Garam saja dengan kualitas 2PS namanya itu dihargai 400 Pak.

Apa yang dimiliki kita, kami berharap PMN ini diberikan lagi kepada kami atau badan Bapak Haerudin. *Monggo*, apa Bulog diberikan *monggo*, Undang-Undangnya belum ada. Dan PT Garam sejak Persero sudah tidak PSO lagi, dulu tahun 1992 pernah ada stoknas Pak. Stoknas ini adalah menyangga garam dari tahun 1972 sampai tahun 1991 Pak. Rakyat makmur,

petani makmur dengan mekanisme tata niaganya adalah Pemerintah memberikan harga dasar, mekanisme tata niaganya adalah yang membeli KUD, KUD dikasih *fee* 5% kalau tidak salah waktu itu dan dibuatkan gudang-gudang di sentra produksi di seluruh Indonesia. Ketiga, PT Garam sebagai pengelola.

Sebenarnya ini yang bagus, pengelola disini sebenarnya resi gudang Pak. Kapan garam ini dijual, kapan garam ini distok, sehingga rakyat ini harganya stabil banget, Cuma sayang waktu itu harga garam hanya 7-12 Rupiah per kilo, saat itu. PMN, kedua bangun gudang, yang ketiga harus ada tata niaga, yang keempat harus ada harga dasar, yang kelima barangkali ini tantangan. Tantangan apa? Rasanya tidak adil kalau sekarang importir ditugaskan hanya importir aneka pangan dan minuman yang menyerap garam dalam negeri.

Industry aneka pangan itu hanya 490 ribu per tahun, padahal CAP dan industry murni ini kebutuhannya adalah di atas hampir 3 juta ton. Seandainya garam dalam negeri diserap oleh importir wajib menyerap dengan porsi kita atur tertentu tuntas. Disamakan dengan Australia saja untung, karena HPP rakyat ini semakin besar terintegrasi tadi, yang pertama terintegrasi HPP-nya pasti rendah, kalau *output*-nya rendah Bapak Budi. Kalau *output*-nya besar pasti HPP-nya kecil. Seperti PT Garam, PT Garam HPP kita di bawah 250 Pak. Kita sudah semi mekanisasi juga.

Barangkali itu Bapak Haerudin, saya terima kasih banyak masukan dari Bapak Ketua. Tentunya PT Garam Pak, bisa ditayangkan halaman berikutnya tentang Ebitda kita, laporan keuangan tahun terakhir. Alhamdulillah PT Garam tidak rugi Pak, PT Garam 7 tahun terakhir kita untung. 5 tahun terakhir ini Pak, kondisi kita ebitda dan laba bersih. Di tahun 2019 harga kita jatuh luar biasa Pak, hancur. Tetapi kalau dilihat dari sebelumnya penjualan kita, baik di bahan baku maupun yang diolah ada *growth* semuanya, tidak linier. Saya ingat kata-kata Bapak Haerudin, kemarin Bapak Budi jangan sampai gagal lagi, saya ngeri dikatakan seperti itu Bapak Haerudin. Karena memang tahun ini saya hancur, tahun 2020 saya bisa menaikkan nanti garam-garam rakyat kami serap kembali. Mohon dukungan Bapak Ketua, kami dapat PMN, kami memiliki 4 pabrik. 4 pabrik ini saya gunakan sebagai upaya meningkatkan kualitas di hilir. Karena satu-satunya jalan kalau kita ingin edit value tinggi, kita jualan bukan bahan baku lagi. Kalau kita nanti jualan bahan baku nanti ada kompetitif dengan rakyat nanti. Rakyat kami serap, modal terus terang kami tidak punya, karena keuntungan kita hanya 12 miliar. Untuk penyisihan untuk capex kita kecil, kemarin kita bisa investasi besar karena ada mohon ijin, terima kasih kepada Anggota Dewan yang membantu kami terhadap dana PMN. Itu bunganya kami gunakan untuk investasi Pak, bukan operasional tapi semuanya kami lakukan untuk investasi.

Kalau tahun ini kita bisa membikin 5 pabrik Pak, kami mohon didukung hasil penyerapan itu nanti kami gunakan garam rakyat bkan apple to apple kita trading to trading tetapi kita proses. Dan ini sudah punya 4 pabrik termasuk bantuan dari BPPT ternyata garam rakyat tidak kalah dengan garam Australia, tidak kalah. Yang salah Indonesia kenapa dekat dengan Australia

Ibu, sehingga murah. Kalau Australia dibawa ke Cina harganya pasti di atas 56 US Dolar. Tolong ditayangkan COA-nya, ada *Certificate Of Analysis*. Ini contoh rakyat, Ibu-ibu biar bangga, lihat ini. Ini *Certificate Of Analysis* saya tanya Ibu-ibu, NACL-nya berapa Ibu? 99,23 bu tidak kalah dengan Australia hampir 100% NACL-nya. Makanya PT Garam didorong ada PMN kembali, tapi *wallahu alam* silakan. Kalau kami karena tidak punya dana perlu ada PMN 2, satu ke-peruntukan untuk model kerja menyerap garam rakyat, wajib hukumnya kita proses. Yang kedua menambah pabrik dan washing plan, pencucian, karena di Australia juga begitu.

KETUA RAPAT

Pak Dirut, maaf saya potong.
Boleh disebut ini COA-nya dari daerah mana?

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

Dari dalam kami, kami sertifikat PT Garam.

KETUA RAPAT:

Maksudnya hasil dari tambak garamnya dimana Pak?

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

Madura dan kemarin Gresik sudah 99 Ibu, Gresik, Lamongan, Tuban *sampun*. Di Cirebon dan Indramayu tahun ini baru kita bikin pabrik Pak, hanya 3 ton per jam karena tidak ada investasi, kecil hanya sekitar 20 miliar kami bikin. Tapi kira-kira baru satu tahun ini di Cirebon, Indramayu sama Kupang. Kami mohon bantuan ada dana itu Pak, dan kami berharap nanti bisa *tindak* kesana pabrik-pabrik yang kita bangun termasuk hasil PMN kita bisa *me-leverage*.

F-PDIP (ONO SURONO, S.H.):

Interupsi Pimpinan, sebelah kanan Bapak Dirut.

Bapak Dirut, tahun lalu juga kan kita mengalami hal seperti ini kalau tidak salah tahun lalu itu yang dihitung kebutuhan baik untuk industri dan konsumsi itu 3,9 juta. Nah, hitungan dari KKP termasuk mungkin juga hitungan dari Bapak, bahwa stok yang digudang maupun yang di tambak garamnya itu ada 1,5 juta. Berarti asumsi kita sebenarnya *clear* 3,9 dikurang 1,5 berarti 2,4. Tapi kenapa Pemerintah saat itu memutuskan 3,7 juta yang impornya. Nah, sehingga permasalahan ini menurut saya sebagai sedetail apa, *se-valid* apa data yang Bapak Dirut sampaikan, data yang disampaikan oleh KKP yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah untuk mengeluarkan ijin impor. Kalau hanya dipaparkan dan ini tidak menjadi dasar ya pada akhirnya Pemerintah tidak tahu juga kita Kementerian Perdagangan Industri ini data dari mana juga. Tapi kalau yang pernah Bapak Panggah sampaikan kepada saya, data stok itu adalah data yang sudah digudang bukan data yang dilapangan.

Nah, sehingga tentunya dengan problem yang saat ini harga garam local di petani ini 200-300 inikan mereka juga teriak. Dan saya sih masih berasumsi bahwa turunnya harga garam local ini terkait dengan impor garam yang bisa saja merembes. Pasti terkait dengan *supply demand*-nya rumusnya ini berlaku. Sehingga sekali lagi problem kita di masalah pangan ini terutama di data. Dan saya berharap sebenarnya PT. Garam ini bisa menjadi sebuah institusi negara, paling tidak bisa menyajikan data yang valid bagi Pemerintah. Sehingga pada saat bicara kualitas NACL yang 97 yang menjadi syarat untuk garam yang dipakai untuk industry seberapa besar kapasitas kita untuk bisa mampu untuk mengisi itu. Dan saya yakin ada beberapa teknologi yang bisa diterapkan untuk bisa meningkatkan NACL itu tapi dengan *cost* yang besar. Tapi pada saat bicara misalnya garam dengan kualitas yang terbaik misalnya, sekarang garam impor berapa harganya Pak.

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

36 Dolar.

F-PDIP (ONO SURONO, S.H.):

Rupiahnya?

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

600 ribu kalau tidak salah.

F-PDIP (ONO SURONO, S.H.):

Nah, pada saat bicara terkait dengan itu harus bersaing, Pemerintah pun dan PT Garam Pun harus bisa menyajikan sebuah teknologi yang *cost*-nya rendah. Nah, sehingga sekali lagi saya pikir problem kita setiap tahun ya seperti ini terkait dengan garam, terkait dengan gula.

Saran saya data yang sekarang disajikan mudah-mudahan Bapak dengan KKP ini bisa membuat data sevalid mungkin yang pada akhirnya bisa menjadi rujukan Pemerintah atau institusi Kementerian yang lain yang terkait dengan masalah garam, perdagangan, industry untuk bisa memberikan ijin impor yang pada akhirnya tidak juga merugikan petambak garam local.

Indramayu misalnya Bapak Dirut, sampai dengan detik ini saya berpikir dengan turunnya hujan berminggu-minggu, ini harga garam naik. Ternyata tidak Pak, masih tetap di angka 200-300. Di gudang cuma 350-400 yang sudah di gudang, jadikan aneh sebenarnya. Pada saat bicara produksi sudah tidak ada tapi garam tidak naik-naik, berarti apa? Berarti ada stok garam yang bukan local ini menumpuk. Nah, sehingga inilah yang harus *clear* menurut saya dan data yang Bapak sampaikan tentunya kita akan konformasi lagi nanti kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kita ingin juga KKP ini berjuang untuk bisa melakukan pembelaan terhadap petambak garam yang sudah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Nelayan,

Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam terkait dengan impor tadi. Kita mempunyai peluang untuk memproteksi petambak garam local kita.

Mungkin itu saja, terima kasih.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak, boleh kita masih ada 4 BUMN lagi, boleh tidak kita menyelesaikan dahulu semua presentasiya, sebelum nanti di sesi tanya jawab silakan. Saya tidak akan membatasi waktu Anggota untuk memberikan tanggapan ataupun masukan. Ini kita masih ada 5 lagi, saya takutnya kita ini nanti jam 14.30 WIB dipanggil Rapur, saya takutnya kehabisan waktu saja Bapak Andi. Saya mohon pengertiannya teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, boleh.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Satu menit saja Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silahkan Bapak Andi.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ini menyangkut masalah garam karena kita tahu bahwa tahun 2020 ini Ketua, inikan ada rencana impor yang sangat besar. inikan sebenarnya kenapa saya sedikit focus kepada garam, dan saya 5 tahun Anggota Banggar selalu memberikan PMN-nya kepada PT Garam, cuma kan Bapak harus menjelaskan kepada publik dan kita, PMN diberikan itu bagaimana hasilnya, terutama bagaimana bisa menyerap daripada garam lokal, masyarakat kita.

Saya sepakat dengan Bapak Ono, bahwa sebenarnya kenapa harga garam rakyat ini rendah? Karena impor yang gila-gilaan. Saya yakin bahwa ini terjadi rembesan. Jadi nanti di rapat dengan KKP, kita akan kuliti KKP ini karena harusnya KKP ini yang mengerem impor yang naik terus ini. Dan saya mendengar informasi bahwa disini banyak mafia yang berkepentingan, mafia impor ya. Nah, inikan satu sisi lain ya nelayan kita menderita gara-gara harga yang tidak bisa naik Pak.

Oleh karena itu Bapak Dirut PT Garam, kita berharap sebenarnya bisa menjadi seperti Bulog. Kita harapkan negara memberikan penugasan kepada PT. Garam agar PT. Garam bisa menyerap daripada garam rakyat dengan harga yang ekonomis. Kalau tidak ekonomis bagaimana mereka mau memuat garam. Itu saja Bapak Ketua, mungkin nanti didalami di pembahasan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Andi.

Teman-teman yang lain saya mohon pengertiannya ya, kita selesaikan dahulu.

Bapak Dirut silakan kalau bisa dirampungkan saja, jadi teman-teman mungkin tadi bisa menanyakan data yang terakhir, data validasi yang bisa menjadi bahan kami untuk menelusuri lebih lanjut dengan Kementerian terkait juga.

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

Sampun Pak.

KETUA RAPAT:

Sampun?
Silakan.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Baik mungkin, bu Farida bisa lanjut bu.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Bismillahirrahmanirahim.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI,
Bapak dan Ibu hadirin sekalian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Perkenalkan Bapak Pimpinan, saya Farida dari Perum Perikanan Indonesia. Kami ingin menyampaikan beberapa pencapaian kinerja Perum Perikanan Indonesia dalam 5 tahun terakhir. *Alhamdulillah*, kami masih terus laba Bapak.

Slide awal tentang perusahaan, kami mempunyai 4 segmen usaha, kelompok segmen usaha. Yang pertama adalah di pelabuhan perikanan, di pelabuhan perikanan ini kami menyediakan jasa berupa penyediaan, baik itu perlengkapan untuk kapal ikan maupun untuk perbaikan-perbaikan kapal ikan. Antara lain Tambak Labuh, kemudian ada pemanfaatan lahan, kemudian ada docking, ada penyediaan es dari es kami, kemudian kami menyiapkan juga *cold storage*, penyediaan bahan bakar, air bersih, telepon, listrik, dan jaringan data.

Segmen kedua dari kami adalah budidaya, budidaya saat ini luasan hektar lahan yang kami sudah kelola itu sebesar kurang lebih hampir 100 hektar. Ini terdiri dari tambak udang, kemudian ada tambak bandeng, dan ada KJA di Singaraja Bali, hanya untuk KJA ini tidak terlalu besar Bapak Pimpinan. Selanjutnya yang baru selesai untuk mensupport dari bisnis budidaya ini adalah pendirian pabrik pakan dari dana PMN. Berikutnya adalah pengoperasian kapal, pengoperasian kapal kami kapal sendiri itu hanya 5, 3 yang besar yang 2 masih kecil. Tetapi untuk pengoperasian kapal ini kami ada beberapa yang bekerja sama dengan nelayan-nelayan yang kecil-kecil.

Selanjutnya segmen usaha kami adalah pemasaran, yaitu perdagangan ikan baik itu lokal, kemudian ekspor dan impor. Kemudian ini adalah wilayah kerja kami Bapak, ada 5 cabang terbesar. Cabang itu adalah yang mempunyai pelabuhan perikanan, sedangkan unit ini terdiri dari 22 unit ada perdagangannya saja, kemudian ada yang beroperasi dengan kapal, dan ada yang terdiri dari tambak atau KJA. Kita berharap di tahun 2020 kita ada penambahan 5 unit.

Selanjutnya ini adalah fasilitas yang menunjang kinerja kami, sebagian adalah dari dana PMN yang sudah selesai dan beroperasi. Dari total dana PMN 300 miliar yang diberikan kepada Perum Perindo pada tahun 2018 sudah bisa menghasilkan dan memberikan pendapatan tambahan kepada perusahaan sebesar 8,2 miliar. Barangkali menurut kita sangat sedikit karena separuh dari dana PMN atau 154 itu untuk mendirikan pabrik pakan yang hingga saat ini baru selesai, jadi belum beroperasi.

Kemudian ini kinerja kami Bapak, dari 2015 sampai 2019 *alhamdulillah* kami masih laba. Kemudian 2019 belum final, belum audit final, jadi masih diprognoza itu juga laba di 13,6 miliar. Berikutnya untuk di RKAP 2020, ada beberapa strategi dan kebijakan yang kami akan lakukan, terutama adalah penguatan di beberapa segmen yang selama ini memberikan kontribusi pendapatan maupun laba yang signifikan. Yang pertama adalah dari pelabuhan perikanan, dimana kami akan mengoptimalkan asset dan sarana prasarana yang ada di pelabuhan perikanan....

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ketua, interupsi Bapak Ketua, Hermanto Bapak Ketua.

Terima kasih Bapak Ketua.

Ini Perikanan Indonesia sampai saat ini kami belum menerima dokumen untuk bisa kami baca. Jadi kami agak kebingungan untuk mengikuti ritme apa yang dijelaskan, sehingga kita tidak bisa memberikan apa yang harus kita kontribusikan dengan ini. Sementara kesepakatan kita 3 hari sebelum rapat bahan ini harus sudah ada di tangan kita. Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain ini.

Demikian Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bapak Hermanto.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu, perlu kami ingatkan sebelum Rapat Dengar Pendapat bahan seharusnya 3 hari sebelumnya sudah harus kita terima. Maaf tadi saya juga tidak lihat, yang ada kita ada dari PERINUS. Ada tidak Ibu, untuk dibagikan? Kalau belum ada kita coba lanjutkan dulu, tolong sebagai catatan itu PERINUS.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Interupsi Ketua.

Saya kira begini, sesuai dengan kesepakatan kita maaf....

KETUA RAPAT:

Sebentar, tolong Bapak Sumail.
Silakan Pak.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Sebentar saya mau mengomentari apa yang Ibu telah ekspose atau paparkan barusan. Sesuai dengan kesepakatan kita sebenarnya tempo hari, bahwa sebelum rapat ini berlangsung minimal 3 hari itu materi sudah disampaikan sehingga kita bisa menelaah dengan baik dan diskusi ini berlangsung dengan baik. Kalaupun Ibu ini tidak menyiapkan kita tunda saja langsung, kita lewati saja Bapak Ketua, kita panggil untuk kali berikutnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih usulannya.

Bagaimana Ibu, Ibu tidak bawa?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Mohon ijin Bapak dan Ibu, mungkin dari staf kami barangkali yang terlambat, tapi ini sudah diberikan.

KETUA RAPAT:

Baik, tapi kita perlunya di depan Ibu, supaya kita bisa baca.

Saya *skip* dulu Ibu nanti kita bisa lanjutkan, kalau belum siap sekarang kita jadwalkan ulang di lain kesempatan. Bapak Dirut, saya persiapkan untuk berikutnya yang sudah siap dulu, supaya kita bisa benar-benar melihat dan menindaklanjuti.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

Saya harap kepada Dirut beserta direktur-direktur dan jajaran yang lain. Saya berharap kedepannya itu tolonglah jangan dianggap kita ini rapat main-main ya ibu ya. Kita ini rapat serius mau memikirkan bagaimana baiknya kedepan. Ini kok seolah-olah kita ini rapat tidak ada yang diberi, kita baca loh ini. Kita sama-sama cari solusi, dari tadi saya diskusi sama teman-teman ini kok kesannya kita dianggap becanda.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bapak Dirut kita lanjut.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Saya mohon maaf nanti akan jadi bahan koreksi bagi kami.
Mungkin untuk selanjutnya Bapak Wawan dari SHS, silakan Pak.

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Baik, terima kasih Bapak Eko.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Yang kami hormati dan kami banggakan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Baik, sebelum mulai Bapak dan Ibu sekalian, saya memperkenalkan diri. Nama saya Karyawan Gunarso, sebelum di Sang Hyang Seri saya di Direktur Operasional BULOG Bapak dan Ibu sekalian. Di Sang Hyang Seri baru kurang lebih 1 tahun, sama dengan Bapak Dirut Pertani.

Bapak dan Ibu sekalian.

Saya langsung saja kepada apa namanya potensi terkait dengan Sang Hyang Seri. Sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian tahu bahwa Sang Hyang Seri sejak sejarahnya berdiri, sejak tahun 1968 itu adalah didesain sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di dalam industry perbenihan. Bahkan barangkali jauh sebelum tahun itu, tanah yang disiapkan saat itu untuk PT. Sang Hyang Seri itu sebetulnya didesain cukup luas Bapak Pimpinan. Dulu luasan lahan yang dikelola di wilayah Suka Mandi itu jumlahnya bukan seperti sekarang, bukan hanya 4.00 hektar akan tetapi jumlahnya lebih dari puluhan ribu. Yang pertama itu barangkali informasinya bahwa saat ini Sang Hyang seri *core business*-nya adalah bergerak di dalam industry perbenihan.

Kemudian saat ini yang menjadi konsen kami di dalam Sang Hyang Seri, itu adalah kami memiliki satu strategic land bank yang menurut kami ini adalah modal kami yang cukup besar di dalam pengembangan industry perbenihan di Sang Hyang Seri. Lahan kami yang utamanya itu adanya di Suma Mandi, saat ini luasnya kurang lebih 3.943 hektar. Di dalam 3.943 hektar tersebut hampir seluruhnya itu adalah lahan datar dengan komposisi 3.160 hektar itu adalah lahan dengan irigasi teknis. Artinya, irigasi tersier sampai dengan primer tersedia disitu. Kemudian 240 hektar itu adalah lahan sawah yang memang non teknis irigasinya. Kemudian sisanya kurang lebih 200 ribu hektar itu adalah berupa emplasemen, kemudian tanah kosong, kemudian pabrikasi, kemudian kantor dan juga infrastruktur pendukung lainnya. Nah, kemudian disitu juga ada pabrik kapasitas untuk industry benih itu kurang lebih 1 tahun 30 ribu ton. Disitu ada 4 pabrik kami, yang satu adalah pabrik modern dengan kapasitas 10 ribu ton. Kemudian yang 3 adalah pabrik yang masih konvensional, di mana 3 itu kapasitasnya 20 ribu.

Bapak dan Ibu sekalian.

Land bank inilah yang selama ini menjadi andalan PT Sang Hyang Seri di dalam mengembangkan misinya sebagai industry perbenihan. Selama ini membina di land bank kami di Suka Mandi, kurang lebih ada 2.000 petani penangkar benih yang bekerja sama, bermitra dengan kami Sang Hyang Seri. Kemudian disana ada lebih dari 55 kelompok tani Bapak Ketua. Jadi kami pada prinsipnya sebetulnya program kemitraan pengembangan benih di lahan kami Suka Mandi sudah berjalan cukup lama.

Kemudian Bapak Ketua dan Anggota Dewan yang lain, asset kami selain di Suka Mandi kami tersebar di 37 wilayah. Rata-rata asset kami berupa tanah dan juga kantor serta pabrikasi yang luasnya hanya rata-rata sekitar 1 sampai dengan 2 hektar, sehingga hanya di Suka Mandi lah kami betul-betul berfokus untuk memproduksi industry perbenihan secara internal. Diluar itu kami bekerja sama dengan para penangkar petani di sekitarnya, karena memang tidak punya lahan yang ada hanya pabrikasi terkait dengan produksi benih. Itu yang pertama Bapak dan Ibu sekalian.

Kemudian yang kedua, produk yang saat ini sampai dengan 2019 kami kelola. Jelas yang pertama adalah terkait dengan industri perbenihan, kami memproduksi benih Bapak dan Ibu sekalian. Kapasitas produksi benih kami, secara nasional itu adalah jumlahnya 82 ribu ton. Sementara rata-rata

kebutuhan benih nasional itu kurang lebih 300 sampai dengan 400 ribu ton. Artinya, sebetulnya kami Sang Hyang Seri punya kapasitas sekitar 25% sampai dengan 30% dari kapasitas kebutuhan nasional benih. Saya kira mestinya ini menjadi satu potensi yang cukup besar Pak, kalau dari pasar menguasai 30% rasanya mestinya ini adalah peluang bisnis yang sangat menarik.

Kemudian selain itu, produk kami adalah tadi yang kami sebutkan di awal adalah lahan produktif Pak, yang ada di Suka Mandi. Nanti berikutnya kami akan cerita bagaimana kemudian propose kami di 2020 sampai dengan 2024 untuk optimasi lahan produktif kami.

Kemudian produk yang ketiga adalah beras tropiko. Ini sebetulnya produk baru kami Bapak dan Ibu sekalian, kami ada satu varietas terietas yang itu kerja sama dengan Batan, di mana produk beras ini rata-rata per hektar ini sudah diuji dengan beberapa kelompok petani. Kemudian juga ada testimony dari beberapa kelompok tani, ini rata-rata mereka memproduksi dari varietas dari produk baru kita ini, ini adalah 10 sampai dengan 12 ton per hektar. Hanya memang ada persoalan di dalam varietas ini belum sempurna Pak, karena dalam satu malai jumlah bulirnya banyak, kemudian komposisi struktur bangunan pohonnya itu tinggi, sehingga kami masih punya kelemahan yang harus kami perbaiki di dalam riset itu, itu adalah terkait dengan mudah roboh. Padahal dari sisi produktifitas varietas ini cukup produktif Bapak, kemudian nasinya sifatnya pulen, warnanya putih cerah. Nah, ini adalah produk baru kami yang muai 2019 ini akan kami kembangkan, tetapi itu tadi di dalam riset kami, kami mencoba untuk menguatkan batangnya sehingga tidak mudah roboh. Karena begitu roboh ini teman-teman petani juga mejadi complain, karena produktifitas menjadi turun bukan 10 bahkan mungkin hanya 5. Ini terus kami lakukan perbaikan-perbaikan.

Bapak dan Ibu sekalian.

Itulah yang kira-kira yang menjadi potensi internal di dalam perusahaan kami di Sang Hyang Seri. Nah, terkait dengan tantangan isu sektor pertanian, sama tadi dengan yang disampaikan Bapak Eko Dirut RNI, ada populasi penduduk, pola konsumsi dan lain sebagainya. saya *skip* saja yang itu Pak.

Mungkin yang menarik adalah berikutnya Pak, saya masih ingat betul waktu itu ada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI Bulan November 2019 dimana kami mendampingi Bapak Menteri Pertanian. Kami mencoba meng-*over view* saja Pak, program yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian saat itu. Dan ini menjadi tantantan di dalam sesuai dengan agenda pembahasan hari ini, yaitu strategi dan kebijakan pertanian kedepan seperti apa.

Tantangannya antara lain kalau kita lihat di dalam *highlight* programnya Kementerian, bahwa 2020 sasaran target dari produksi padi itu, itu adalah kurang lebih 60 juta ton. Saya pikir 60 juta ton ini adalah gabah kering giling, tetapi kalau berbicara gabah kering panennya ini mungkin sekitar 80 juta ton. Ini menarik bagi kami Pak, artinya kami sebagai salah satu produsen benih tentu melihat target ini sebagai bagian dari peluang untuk mendukung

kegiatan program pertanian. Kemudian disitu juga ada jagung, kedelai dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu acuan kami di dalam Sang Hyang Seri di dalam rangka menyusun strategi dan usulan-usulan kebijakan nanti ke depan.

Kemudian selanjutnya ada 3 program lain yang menurut kami sangat dekat dengan kami di perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pangan. Yang pertama adalah program desa mandiri benih, ini adalah konsen di kami betul bagaimana Sang Hyang Seri bisa mensupport terkait dengan program ini. Kemudian program pengembangan kawasan tanaman pangan, ini nanti yang akan kami propose di bahan kami. Kami berencana mengusulkan di dalam 2020-2024 karena kami punya land bank, karena kami punya lahan kami mengusulkan rencana apa yang kami sebut sebagai kawasan industry berbasis agro di Suka Mandi. Nanti kami jelaskan berikutnya Pak. Kemudian yang ketiga adalah program peningkatan ekspor pangan. Nah, ini bagi kami juga sangat tertantang di program kami sebagai tawaran program kami ini mudah-mudahan propose kami bisa menjawab ini sebagai bagian dari strategi dan kebijakan pertanian.

Kemudian kami coba *review* terkait dengan kinerja kami Pak, khususnya terkait dengan produksi benih di internal kami di SHS. Seperti tadi kami sampaikan bahwa pasar itu lebih dari 300 ribu, kapasitas produksi kami 82.500. selama 5 tahun terakhir produksi kami dengan kapasitas 82.500 tadi itu rata-rata kami hanya 5 sampai dengan 13%, yang tertinggi itu kira-kira do 5 tahun terakhir itu di 2014 dan 2017 itu sebesar 13%. Di 2018 itu produksi kami hanya 5%, jadi masih jauh dari kapasitas produksi yang kami miliki. Nah, ini yang barangkali menjadi tantangan kami di Sang Hyang Seri apa sih penyebabnya. Tentu nanti diharapkan terakhir Pak, ada usulan dan rekomendasi yang kami usulkan mungkin salah satunya terkait dengan investasi dan rekomendasi yang kami usulkan. Mungkin salah satunya terkait dengan investasi dan *working capital*, karena sebagai informasi saja saat ini sejak tahun 2018 Sang Hyang Seri posisi diperbankan sudah posisi kolektifitas 5 Pak, sehingga kami cukup sulit untuk memperoleh *working capital* terkait operasi kegiatan kami.

Bapak dan Ibu sekalian.

Dalam rangka program penyehatan perusahaan serta dalam rangka mendukung kebijakan sektor pertanian, kami melakukan dua kegiatan utama. Yang pertama secara internal, kami melakukan program restrukturisasi PT. Sang Hyang Seri. Di dalam program restrukturisasi ada 3 agenda, ada 3 sektor yang menjadi konsen kami. Yang pertama adalah organisasi, organisasi perusahaan ini terlalu gemuk Bapak, sehingga tidak efisien. Saya hafal betul waktu akhir tahun 2018 kami masuk pertama ke Sang Hyang Seri, struktur kotak jabatan di perusahaan ini ada 1.300 kotak jabatan. Sementara pegawainya 600 orang Pak, sehingga kotak itu lebih besar daripada jumlah pegawai sendiri. Nah, saat ini kami *insya allah* di tahun 2020 awal ini sudah melakukan restrukturisasi organisasi sehingga *insya allah* nanti akan ada hanya kotak jabatan 300-350 orang. Dan efisiensinya *alhamdulillah* kalau semua ini tercapai plus beberapa kegiatan evaluasi kinerja dari kompetensi

pegawai. Ini nanti efisiensinya kurang lebih 30% sampai dengan 50% Pak. Nah, ini pertama terkait dengan restrukturisasi organisasi.

Kemudian yang kedua, terkait dengan restrukturisasi keuangan. Seperti tadi saya sampaikan kami memang sangat kesulitan di dalam likuiditas keuangan. Modal kerja kami terbatas, kemudian kewajiban-kewajiban kami juga cukup besar terhadap para *stake holder* dan vendor, sehingga ini juga menjadi konsen kami nanti solusinya apakah nanti ada kebijakan tambahan terhadap kami terkait dengan PMN atau pun atau mungkin ada program-program lain. Tapi yang jelas di dalam program ini kami tahun 2020 sudah melakukan beberapa upaya konkrit. Yang pertama, kami lebih banyak meningkatkan sinergi kemitraan Bapak, baik itu dengan BUMN maupun BUMS, karena kami sadar betul dengan posisi kolektifitas 5 kami sudah sangat sulit untuk mendapatkan *working capital* keperbankan khususnya. Untuk itu maka, upaya yang kami lakukan adalah kami melakukan kemitraan sinergi dengan BUMN dan BUMS. Kami tidak perlu menyebut salah satu atau salah dua BUMS, hari ini kami sudah menandatangani beberapa kerja sama yang *insya allah* itu kaitannya adalah dalam rangka penguatan permodalan kami di Sang Hyang Seri.

Kemudian yang ketiga, restrukturisasi yang kami lakukan itu adalah restrukturisasi model bisnis Pak. Mohon ijin Pak, betul bahwa perusahaan ini sejarahnya adalah bergerak dalam industri perbenihan. Tapi rasanya dengan aset yang kami miliki sawah 3.150 hektar dan itu berigasi teknis, kami punya potensi lebih jauh mengembangkan sehingga value buat perusahaan menjadi lebih tinggi. Kami masih terbuka ada lahan disitu 200 hektar lebih yang terbuka yang bisa kami manfaatkan, sehingga di dalam program kami berikutnya dalam rangka kontribusi terkait dengan pertanian, maka yang pertama industry perbenihan tetap menjadi *core business* kami Pak, dan itu harus kami pertahankan.

PR kami adalah terkait dengan industri perbenihan adalah satu, tentu yang pertama adalah peningkatan produktifitas dan juga peningkatan kualitas. Kami masih sadari saat ini rata-rata produktifitas nasional padi mungkin Bapak ada yang mungkin bisa mendengar 5 ton per hektar, ada 7 ton per hektar, sementara barangkali kalau mendengar dari luar negeri konon katanya di atas 10 ton per hektar. Ini salah satunya yang menjadi kewajiban kami tentu di dalam BUMN perbenihan meningkatkan yang namanya varietas-varietas terkait dengan peningkatan produktifitas.

Kemudian yang kedua, PR kami di dalam peningkatan industry perbenihan adalah tentu memperbaiki terkait dengan jaringan pemasaran kami Pak. Saat ini hampir jaringan pemasaran kami untuk pemasaran 80% itu adalah kami jual untuk *government market* Pak, mendukung program-program produktifitas program Pemerintah. 20%-nya itu adalah pasar dari *private market* Pak. Nah, ini mungkin nanti di 2020 akan menjadi catatan kami *government market* tetap dalam jumlah yang kita jaga akan tetapi bagaimana kemudian *private market* ini juga menjadi sesuatu yang kita tingkatkan.

Kemudian yang kedua dan ketiga, program kami berikutnya adalah rencana dan usulan kami Pak. Dan ini sudah ada dalam RJPP kami 5 tahun kedepan, satu memperbaiki proses penyehatan perusahaan. Kedua, dalam rangka mendukung kebijakan sektor pertanian. Kami mengusulkan di dalam RJPP kami terkait dua hal tadi, itu adalah menjadikan Suka Mandi dengan land bank yang tadi kami sebutkan itu sebagai basis industry argo di Jawa Barat dan regional sekitarnya. Karena sangat memungkinkan Pak, kami punya lahan *on farm* 3.150 yang bukan hanya bisa ditanam benih Pak, tetapi bisa ditanam padi konsumsi, bisa ditanam kacang-kacangan, bisa juga ditanam sebagian untuk produk hortikultur.

Kemudian kami masih punya lahan kosong yang kami undang, kami rencanakan untuk hilirisasinya Pak. Disitu nanti ada proses hilirisasi produk beras dan turunannya, produk horti dan turunannya, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya mohon maaf Bapak Ono, misalnya Subang itu dekat dengan Indramayu kemudin Kerawang, Subang dan Cirebon. Disitu adalah produk pertanian buah-buahannya luar biasa Pak, di Indramayu ada buahnya, ada mangganya, kemudian di Subang sendiri ada Nanas, Manggis, dan lain sebagainya. Kami berpikir ini peluang buat kami bagaimana kemudian Suka Mandi kami jadikan sebagai industry agro dan juga HAB untuk hilirisasi kegiatan pertanian secara umum. Nah, ini yang kami coba sampaikan di dalam RKAP 2020-2024.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan, interupsi sebentar.

Jadi Pimpinan tidak usah ini ngerumpi kita fokus disini.

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin tanya Sang Hyang Seri kan dapat PMN ya?

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

2015-2016 terakhir Pak.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Dari PMN itu produktif atau kita bayar hutang?

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Kami terima 400 miliar Bapak, 150 untuk investasi membangun pabrik dengan kapasitas 10 ribu ton. Kemudian 50 miliarnya untuk revitalisasi alat-alat termasuk gudang yang untuk digunakan modal kerja kurang lebih 200 miliar Bapak.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Bapak Dirut.

Pimpinan, saya ingin sampaikan ijin sebentar, kenapa kita tanya itu biar karena kalau tadi tidak disampaikan dari tadi. Kebutuhan benih kita besar dari sisi padi, satu tidak logis kalau mendengar Sang Hyang Seri ngomongin nanas, ngomongin mangga, kan padi belum terpenuhi kita. Kenapa kita tidak fokus saja, kenapa kita bersaing dengan benih yang lain. Jangan sampai benih Sang Hyang Seri tidak laku di pasaran sama petani. Inikan persoalan brand dan persoalan kualitas yang dibutuhkan oleh petani, sama persis di pupuk. Nah, maksud saya, saya ingin sampaikan apa tidak lebih baik Sang Hyang Seri itu fokus urusan benih padi yang kita butuhkan, yang kebutuhannya belum bisa tertutupi.

Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Baik Bapak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Haerudin, mungkin saya tambahkan sedikit Pak. Saya lanjutkan sedikit pointnya Bapak Haerudin. Saya cukup setuju dan saya apresiasi Bapak mempunyai visi untuk mengembangkan industri-industri lainnya, tapi tadi Bapak sudah katakan untuk masalah permodalan sama Bapak sudah di col 5. Nah, ini saya cuma takut Bapak ini mau mencoba mengembangkan usaha-usaha lain ini tapi *core business* Bapak mengenai perbenihan ini terbengkalai justru itu. Jadi tadi saya mau menekankan saja mengenai point Bapak Haerudin bahwa ini masalah perbenihan ini sesuatu yang sangat serius.

Silakan kita teruskan.

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Baik, terima kasih Bapak Haerudin dan Pimpinan.

Betul Bapak, terkait dengan perbenihan tetap menjadi *core* kami, nanti sebetulnya di ujung bahan kami ada dukungan strategi dan kebijakan salah satu pointnya adalah penguatan industry perbenihan. Sebetulnya di ujung bahan kami ada itu Pak, jadi tetap terkait dengan perbenihan Bapak Haerudin terima kasih itu menjadi *core business* usaha kami.

Dan terkait dengan kualitas dan produktifitas kami sampaikan tadi dari sisi kapasitas kami memiliki kapasitas hampir 25 sampai 30% Pak, sehingga fokus kontribusi kami di perbenihan cukup besar. Kemudian yang kedua,

terkait dengan kualitas. Dan yang ketiga tadi betul Bapak Haerudin, mungkin hanya tinggal bagaimana penguatan modal kerja kami terkait dengan serapan benih di petani Pak. Sebagai contoh mohon ijin Pimpinan, ini agak teknis tapi perlu kami jelaskan.

Di Suka Mandi itu kami memanfaatkan lahan 3000 hektar itu untuk benih, setiap hektar rata-rata katakanlah produktifitas 5 sampai 7 ton Pak Haerudin. Saat ini Pak, yang bisa kami serap per hektar itu hanya 2 ton sampai dengan 3 ton Pak. Padahal selama 3-4 bulan Pimpinan, kami melakukan pembinaan, pembenahan, kontrol, monitoring terhadap lahan 3000 hektar bersama teman-teman petani. Tetapi begitu panen kami hanya bisa menyerap 2-3 ton bahkan yang 2 ton itu Bapak Haerudin itu sebetulnya setoran petani atas nilai sewa tanah tersebut Pak. Jadi bagaimana Bapak Dirut terkait dengan 3-4 ton lainnya ya *alhamdulillah* karena memang kami punya keterbatasan modal akhirnya ya disekitar itulah yang kira-kira macam-macam karena petani juga harus dijual produknya Pak, sementara kami tidak punya untuk menyerap itu.

Nah, betul kata Bapak Haerudin di ujung dukungan strategis kami sebetulnya salah satunya terkait dengan investasi dan logika modal untuk perbenihan. Insya Allah kalau terkait dengan proses, mekanisme, penguatan perbenihan Sang Hyang Seri sudah lebih dari 20 tahun bergerak, bahkan kami ijin punya data riset dan juga punya lebih dari 1000 varietas benih Pak Haerudin. Kami di Suka Mandi Pimpinan, kami punya yang namanya Gen Bank, jadi genetika bank yang sudah sekian puluh tahun di kami itu tersimpan lebih dari 1000 gen bank Pak. Bahkan di gen bank kalau Bapak dan Ibu lihat nanti Bapak Pimpinan, itu kami punya varietas beras itu dua warna merah putih. Saya setuju Bapak Haerudin bahwa terkait dengan *core business* tetap menjadi bagian dari konsen kami. PR-nya tadi terkait dengan peningkatan kualitas produktifitas dan tentu dengan *working capital*.

Terkait dengan program lain intinya kami melihat untuk optimasi lahan yang ada, karena selama ini lahan kosong yang adalah di Suka Mandi yang kurang lebih 100 sampai dengan 200 hektar sementara ini masih belum cukup optimal untuk memberikan value buat perusahaan, sehingga kami tadi berpikir ini bisa juga dimanfaatkan di dalam rangka meningkatkan, mengembangkan value kami untuk industri pangan.

Baik Pak, terkait dengan itu maka saya langsung saja

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur. Cuma satu yang kita harus akui dan saya belum pernah melihat, dari sekian ribu benih apa juta varietas?

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

1000 benih Pak.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Dari 1000 benih itu kita Indonesia ini 350 tahun dijajah, kita bertanya kenapa kok lama begitu dijajah oleh pihak luar, berarti Indonesia ini ada yang sangat menjanjikan. Dari 1000 sekian varietas benih di pasaran sekarang beredar harga beras sampai dengan 58 ribu per kilo yang dari luar. Jadi pertanyaan saya ada tidak Bapak membuat varietas seperti itu. Kami Tawarkan di bulan Februari kami akan membuat Demplot pertanian organik itu 100 hektar di Bali. Apa yang kira-kira Bapak bisa berikan konsep.

Jadi kami membuat pola yang baru Pak, kami ingin menggelitik Pemerintah jangan lagi membuat Demplot-demplot hanya kisaran 25 are. Sekarang saya mencoba terosan dengan teman-teman BPTP itu 1 kluster 1 hektar Pak. Dan kita buat berbagai macam varietas kita sesuaikan dengan daerah-daerahnya. Nah, kalau tadi Bapak menyampaikan ada benih-benih unggul mari kita buktikan Pak. Dan saya inginnya bagaimana kegiatan yang kita lakukan di negeri ini ada penilaian berjenjang, ada evaluasi Pak. Masa pertanian kita begini-begini terus, tidak ada beras unggulan yang kita bisa tonjolan di pasaran. Justru kita terjajah oleh pangan, saya kadang-kadang masuk swalayan lihat beras kita harganya 20 ribu, beras orang lain 58 ribu sampai dengan 70 ribu per kilo. Masa sih orang Indonesia tidak ada yang pintar membuat bebnih-benih yang bagus-bagus seperti itu. Nah, itu yang saya sampaikan Pak.

Jadi saya tunggu Sang Hyang Seri ini, yang pertama kita akan lakukan Demplot itu di tanggal 3 Februari Pak. Saya juga akan undang Bapak Menteri, kita ingin serius Pak. Jadi sekaligus kami akan melaksanakan fungsi kontrol kita disitu. Jadi saya mohon nanti kalau Bapak ada benih unggulnya silakan saya berikan berapa Bapak mau, kita sudah siap dengan BPTP-nya, siap dengan mahasiswanya, siap dengan petaninya. Tinggal Bapak lakukan dan berikan teknologinya saja.

Sekian dan terima kasih.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Interupsi Pimpinan, satu menit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Terima kasih.

Saya juga tertarik akan perbenihan, saya mendengar dengan seksama dari tadi Bapak bercerita bahwa ada 3.150 hektar kurang lebih *land bank* itu milik sendiri atau milik petani yang dihimpun oleh Bapak?

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

HGU Pak.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Ini luar biasa.

Nah, artinya selama ini bahwa Sang Hyang Seri itu berkonsentrasi di tempat itu. Sementara pemahaman kami dan beberapa artikel yang kami baca setiap tempat itu tidak sama secara lingkungan, kondisi tanah dan lain-lain sebagainya. Sehingga apabila benih ditanam katakanlah di Suka Mandi bisa saja hasil produknya itu tidak bisa kemudian diterapkan atau ditanam di Bali. Apa yang menjadi harapan kita produktifitas tinggi ini tidak akan tercapai. Oleh karena itu, saya mohon mungkin ini butuh kajian lebih dalam lagi, bahwa kita tidak hanya punya Suka Mandi Indonesia ini, mungkin punya tempat-tempat lain yang bisa dikembangkan sebagai pusta penelitian benih. Saya kira itu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kita lanjutkan dulu teman-teman, Bapak Dirut silakan Pak.

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Saya cukup menarik Pak, kami dalam hal ini dapat banyak support dan tantangan terkait dengan pengembangan benih. Betul Pak, prinsipnya adalah benih itu sangat salah satunya ditentukan oleh variable dari kondisi tanah, kandungan soilnya, kemudian kontur dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya ini menjadi tantangan buat kami Pak, terkait dengan produk-produk unggulan benih yang ada di kami. Insya allah nanti ijin Bapak Ketua, barangkali kalau memang sempat nanti di Suka Mandi kami ada gen bank

nanti bisa kita lihat sama-sama varietas mana yang memang nanti cocok karakternya sesuai dengan kondisi lahan di masing-masing wilayah.

Dan *Insyallah* Pak, kami punya staf yang memang paham betul terkait dengan varietas, hanya barangkali untuk pengembangan penelitian jujur kami sudah cukup lama berhenti Pak. Karena memang persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan Bapak Ketua. *Insyallah* kalau nanti ada dukungan terkait dengan pengembangan Suka Mandi atau SHS di dalam rangka menjadi pusat penelitian dan juga pusat pengembangan benih, *Insyallah* SHS akan kembali seperti dulu. Saya kira nanti kami siapkan dengan tim Pak, terkait dengan varietas yang cocok di Bali seperti apa.

Baik Pak, kami lanjutkan terkait dengan perbenihan kira-kira itu. Kemudian saya menyambung tadi yang rencana kami terkait dengan memanfaatkan lahan yang ada di Suka Mandi. Tentu nanti kami akan berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait, terkait dengan tata kelola, kemudian perijinan dan lain sebagainya untuk lahan yang kami miliki itu menjadi basis industry pangan di wilayah Jawa Barat.

Terakhir barangkali Pimpinan, ada dua point yang kami sampaikan sebagai dukungan strategi dan kebijakan. Yang pertama terkait dengan penguatan industry perbenihan Pak, ini tadi kami sampaikan bahwa PR kami adalah terkait dengan peningkatan produktifitas, produksi, dan peningkatan kualitas benih unggul yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kinerja bisnis industry perbenihan kami. Nah, ini mungkin terkait dengan investasi dan *working capital* pendanaan tadi. Sehingga kami disini mengusulkan dukungan kebijakan dan strategi salah satunya adalah terkait dengan misalnya mungkin perlu dipertimbangkan kembali salah satunya terkait dengan program subsidi. Mungkin tidak seluruhnya Pak, tapi mungkin juga bisa di wilayah-wilayah tertentu yang memang mungkin produksi benihnya belum bisa diproduksi secara swakelola mandiri oleh petani. Atau kalau misalnya nanti mau seluruhnya berarti *alhamdulillah* seperti tadi yang disampaikan juga oleh teman-teman Petani.

Kemudian yang kedua, yang menjadi tantangan usulannya adalah terkait dengan misalnya produktifitas padi hibrida. Nah, ini hibrida inikan rata-rata punya produktifitas di atas 10 ton per hektar. Tapi kalau saya lihat dari program-program yang ada untuk kebutuhan benih varietas hibrida juga kelihatannya tidak begitu besar. Kemudian yang kedua, dukungan yang kami harapkan adalah terkait dengan rencana kami untuk optimasi aset sehingga bisa memberikan value untuk proses penyehatan perusahaan, maka kami juga barangkali mendapatkan dukungan terkait dengan salah satunya tadi rencana investor dan juga terkait dengan pendanaan.

Saya kira itu Bapak Pimpinan, mohon maaf nanti barangkali di dalam diskusi bisa lebih jelas dan detail.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bapak Dirut bisa dilanjutkan.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Baik, terima kasih.

Bapak Adit mungkin untuk PERINUS.

DIREKTUR UTAMA PT PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO) (MUHAMMAD YANA ADITYA):

Terima kasih Ketua.

Yang terhormat Pimpinan Dewan,
Anggota Dewan yang terhormat.

Perkenalkan nama saya Muhammad Yana Aditya, Saya Direktur Utama PT. Perikanan Nusantara Persero sejak Juni 2019. Sebelumnya kami bertugas sebagai Direktur Keuangan pada PT Rajawali Nusantara Indonesia Persero.

Bapak dan Ibu sekalian.

Kami akan memulai presentasi ini mulai dari profil PT Perikanan Nusantara Persero. PT. Perikanan Nusantara Persero ini adalah hasil penggabungan dari 4 BUMN Perikanan pada tahun 2005. Jadi kalau misalnya diukur sampai tahun ini usianya baru 14 tahun. Jadi dari 4 BUMN tersebut adalah dari PT. Usaha Mina Persero, kemudian PT. Tirta Raya Mina Persero, kemudian PT. Perikanan Samudara Besar Persero dan PT. Perikani Persero. Saat ini berdasarkan dari Peraturan Pemerintah tahun 1998 semuanya digabung menjadi PT. Perikanan Nusantara Persero. Saat ini Dewan Komisaris kami adalah Bapak Zulfikar Mochtar Komisaris Utama PT Perikanan Nusantara, kebetulan beliau adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Kemudian Bapak Niranto Prabowo Komisaris beliau kebetulan juga menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian KKP dan Bapak Roy Simanjuntak. Adapun direksi kami ada bertiga, saya Direktur Utama, kemudian ada Bapak Hendra Triretnadi dan Bapak J. Ronald Atanama.

Bapak dan Ibu sekalian.

Dari visi PT Perikanan Nusantara, kami memang ingin menjadi sebagai perusahaan perikanan terbaik guna mewujudkan kedaulatan pangan. PT Perikanan Nusantara sendiri sejak dari awal memang merupakan PT atau perusahaan yang bergerak di perikanan tangkap, sehingga dari sisi infrastruktur maupun dari sisi perlengkapan memang menuju kearah kesana. Misi kami adalah satu menjadi perusahaan unggul, Tangguh dan tumbuh berkemajuan. Yang kedua adalah menjalankan bisnis perikanan tangkap

logistic dan perdagangan ikan untuk memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan yang serta mengutamakan layanan terbaik. Dan yang ketiga meningkatkan hubungan kerja sama dan keberpihakan kepada nelayan sebagai mitra strategis perusahaan serta menjaga kelestarian lingkungan.

Saat ini PT Perikanan Nusantara juga mengoperasikan beberapa fasilitas. Fasilitas ini Bapak dan Ibu, tersebar nanti di seluruh Indonesia. Jadi fasilitas pabrik es kami ada 170 ton, kemudian ada kapasitas cold storage itu 4.362 ton, ini tersebar. Kemudian ada dermaga kita ada 600 meter di 4 lokasi. Kemudian untuk kapal kami ada 8 kapal penangkap ikan dan 10 kapal pengumpul. Kemudian untuk docking kapal kami memiliki 15 jalur nanti tersebar juga di beberapa cabang kami di slide berikutnya kami akan sampaikan.

Kemudian kami juga memiliki 19 UPI, UPI itu Unit Pengolahan Ikan dengan HACCP *Certificated* saat ini HACCP *Certificated* kami baru B, ada di 6 cabang. Kemudian ada kapasitas 161 ton APF dan kapasitas 10 ton *brand freezer*.

Bapak dan Ibu sekalian.

Fasilitas tadi tersebar ada di mana? Nah, ini adalah tempat kami sekarang mengoperasikan dari semua perlengkapan yang ada. Pertama adalah di Padang, di Padang kami mengoperasikan produksi es 30 ton per hari, kemudian di Jakarta kami ada *cold storage* 2000 ton dan ABF 10 ton, kebutuhan ini adalah pengelolaan dari KKP. Kemudian di Tegal kami memiliki slip away docking kapal 5 jalur yang merupakan pusat untuk pemeliharaan kapal. Di Surabaya kami ada *cold storage* 275 ton dan 3 kalur kapal slip away. Kemudian di Sumenep cold storage 100 ton dan ABF 5 ton, ini kebetulan adalah pengelolaan aset dari Pemerintah. Kemudian di Benoa kami ada *cold storage* 327 ton, ada ABF 27 ton dan dermaga 100 ton. Di sini kami juga memberikan atau mengoperasikan kapal. Kemudian di Makasar kami ada *cold storage* 100 ton dan ABF 11,5 ton....

KETUA RAPAT:

Bapak Dirut, maaf kami potong ya.

Pak, rasanya kalau Bapak mau nyebut tempat Bapak beroperasi dimana dengan aset-asetnya kita bisa baca sendiri. Boleh kita lebih diperjelas dari sisi Bapak ini kendalanya apa, apa yang dibutuhkan dan masalah-masalah teknis yang perlu kami ketahui Pak.

Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PT PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO) (MUHAMMAD YANA ADITYA):

Terima kasih Pimpinan.

Menuju kearah menjawab pertanyaan Bapak Pimpinan tadi, kami arahkan menuju proses bisnis Bapak. Di proses bisnis ini kami ada *core business* yang memang menjadi bisnis utama kami, yaitu penangkapan dan pengolahan dari kapal sendiri maupun dari kapal kerja sama operasi. Dan kemudian pengolahan ini menjadikan sebagai bahan untuk dipasarkan. Saat ini kami sudah melakukan proses untuk ekspor sampai tahun 2019 sekitar 400 ton. Kemudian untuk lokal sudah sampai tahun 2019 21 ribu ton. Ini terdiri dari hasil sendiri maupun dari nelayan dan juga dari trading.

Lanjut, Bapak dan Ibu ini adalah proses yang tadi ingin kami sampaikan kepada Pimpinan. Ini adalah pola kemitraan dengan nelayan yang kami kembangkan terbaru. Jadi kami bersama dengan lembaga keuangan dalam hal ini yang sudah melakukan kerja sama dengan kami adalah Bank BRI. Dengan nelayan kami melakukan sinergi untuk melakukan kemitraan, kemitraannya bagaimana? Nelayan akan mendapatkan kredit dari lembaga keuangan setelah kami rekomendasikan, ikan dari nelayan kami *of taker*. Ini sudah kami aplikasikan kemarin di Pulau Bacan Maluku Utara tanggal 20 Desember 2019 dimana kami kemarin sudah melakukan proses kepada 500 nelayan di sana. dan kami akan kembangkan di seluruh cabang-cabang kita.

Model ini memberikan manfaat bagi nelayan, Perinus dan lembaga keuangan dimana lembaga keuangan mendapatkan kepastian pengembalian uang dari proses ini. Hal ini yang mungkin barangkali kami ingin dorong kepada Pimpinan terutama mohon perkenanya utamanya untuk lembaga keuangan yang mendukung kami bisa mempermudah proses kredit dengan nelayan. Karena selama ini proses kredit yang dilakukan terhadap nelayan hampir juga disamakan dengan yang lain. Mengingat sebenarnya nelayan sudah *punya of taker*, yaitu kami.

Yang kedua Bapak, pengolahan barang milik negara. Bapak dan Ibu, Perikanan Nusantara saat ini mengelola ICS Sumenep dan kemudian SKPT di Taluad, kemudian SKPT di Mimika, kemudian ICS di Muara Baru dan beberapa aset berupa termoking bentuknya truk sebanyak 11 unit. Ini adalah aset-aset negara yang kita kelola untuk mendukung dari kelancaran dari proses kemitraan dengan nelayan dan juga kemajuan dari sektor perikanan.

Bapak dan Ibu sekalian.

Saya kira barang milik negara yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan hanya ini, masih banyak sekali dan mungkin banyak sekali yang sedang akan dibangun. Dengan dukungan dari BUMN sebenarnya pengelolaan tersebut barangkal bisa lebih mudah dan bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua.

Namun kiranya sampai hari ini Bapak dan Ibu, perlu kami laporkan bahwa proses untuk melakukan pengelolaan atau proses untuk mendapatkan pengelolaan barang milik negara antara BUMN dengan Kementerian masih seperti proses yang standar. Kami berharap sebenarnya jika BUMN bisa mendapatkan kemudahan akan bisa lebih baik. Kebetulan kami sedang mengajukan ada 5 tempat yang lain, yaitu di Kendari, kemudian di Ternate,

kemudian di Jawa Timur di Brondong, kemudian di Kejawanan Cirebon dan di Pengambangan Bali.

Bapak dan Ibu yang terhormat.

Kami lanjutkan ini adalah satu program yang tadi ini yang ketiga yang kami mohonkan perhatian dari Bapak dan Ibu, terkait dengan inisiatif kami di pulau terluar. Kalau tadi kami sudah laporkan di sebelah timur di Talaud kami yang mengelola. Kemarin kami mendapat satu penugasan apakah kita juga bisa beroperasi di Natuna.

Bapak dan Ibu sekalian.

Kami sudah menyampaikan presentasi ini kepada Pimpinan dan kemudian ini adalah rencana kerja kami yang ada di Natuna. Pertama, kami akan membangun ICS di sana 250 ton. Kemudian kami akan membangun pendukungnya, yaitu pabrik es dan kemudian nanti kami akan kembali bermitra dengan Himbara nanti untuk mendukung pembiayaan nelayan. Kami sampaikan disana KUR untuk nelayan satu nelayan maksimal 50 juta, cukup lumayan artinya biar nanti nelayan juga bisa melaut, kami menjadi *of taker*-nya, kebetulan pasar-pasar kami sudah cukup banyak.

Kemudian yang paling biasa kami mungkin Bapak dan Ibu sering dengar adalah kami akan mencoba mengoperasikan KM Minajaya 512 gross ton. Ini yang selama ini tidak bisa kami operasikan mengingat ada SK dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2015 tentang Pembatasan Ukuran Kapal. Kami sudah sampaikan ini kepada Bapak Dirjen dan kami secara juga kami sampaikan juga kepada Bapak Menteri apakah dimungkinkan bahwa kapal Minajaya 512 gross ton bisa beroperasi di Natuna. Sebab kalau bisa beroperasi di Natuna kapal ini adalah kapal lepas, artinya bisa di tengah laut. Sekarang ini kami ada 3 Pak, sekarang ini tempatnya kami sandarkan untuk sementara di Makasar, di Bacan dan di Ambon. Bersandar sudah cukup lama sudah 4 tahun karena tidak bisa jalan, karena peraturan dan ini kami harapkan dengan adanya mungkin kemudahan untuk bisa beroperasi di Natuna.

Nah, salah satu juga yang kami usulkan adalah pembangunan dermaga perikanan di Natuna 100 meter. Dan harapan kami disana nanti kami bisa mengembangkan menjadi pelabuhan ekspor. Kenapa Bapak dan Ibu, harus ada pelabuhan ekspor disana? selama ini mungkin barangkali sahabat kami Perindo sudah beroperasi di SKPT Teluk Lampa yang ada di Pulau Natuna. Namun, kiranya tidak adanya pelabuhan ekspor disana sehingga proses pengiriman tetap harus dibawa ke Jakarta. Ini terus terang walaupun mungkin barangkali bisa tetapi ongkos logistic akan menjadi pertimbangan kami. Kami mengusulkan kepada Pemerintah kalau kami diminta untuk buka ICS disana mohon kiranya kami juga dipermudah untuk bisa membangun satu dermaga perikanan dan pelabuhan ekspor disana. Sehingga nanti akan mudah ekspor kami, karena disana dari Natuna lebih dekat ke beberapa daerah tujuan, utamanya menuju ke Vietnam, Thailand

dan juga mungkin barangkali ke Jepang. Dan mungkin barangkali itu juga bisa merubah struktur ekonomi yang ada disana.

Bapak dan Ibu sekalian.

Slide berikutnya tentang program hilirisasi hasil perikanan, selama ini Bapak dan Ibu barangkali tidak pernah melihat hasil atau mungkin barangnya Perinus, karena memang Perinus selama ini menjualnya adalah dalam bentuk hole ikan utuh dan mungkin loin yang tidak ada brandnya. Pada tahun 2019 kami secara gradual pelan-pelan kami membangun satu brand baru, hilirisasi hasil perikanan. Kami berharap proses hilirisasi hasil perikanan ini bisa didukung karena proses ini utamanya harus memiliki standar kesehatan, standar perdagangan juga yang memang harus kami penuhi.

Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, walaupun disini mungkin tidak ada di dalam slide. Perlu kami sampaikan mungkin beberapa waktu yang lalu dalam proses Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ada beberapa isu terkait dengan Jaring Ampung di PT Perikanan Nusantara Persero. Kami laporkan kepada Anggota Dewan disini yang terhormat, bahwa tanggal 17 Desember 2019 yang lalu PT Perikanan Nusantara dan Kementerian Kelautan Perikanan sudah menandatangani pertanyaan perdamaian di Kejaksaan Agung di Jaksa Pengacara Negara dengan masing-masing akan melakukan hak dan kewajiban. Pertama, PT Perikanan Nusantara diminta untuk menyelesaikan 100% dari Karamba Jaring Apung tersebut sesuai dengan standar. Dan yang kedua, Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah nanti memeriksa akan menerima dari Karamba Jaring Apung tersebut.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan, sebentar ya mumpung nyambung.

KETUA RAPAT:

Bapak Haerudin, silakan Pak.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pertama, Bapak Dirut jangan begini lagi ya. Saya masih muda tetapi tidak kebaca itu tulisan didalamnya, luar biasa PERINUS ini, terlalu ngirit. Yang kedua, kita tidak bisa membedakan sebetulnya core PERINUS sama KKP. Jadi apakah Bapak Dirut tidak mengusai tentang PERINUS, sistem kerja PERINUS, pola kerja PERINUS, sehingga kami bingung ya apa core kerja PERINUS ini. Apa dia membangun dermaga, apa pengelola hasil

tangkap ikan, apa bisnis hilir dan segala macam dari ikan atau apa. Dan apa dampak kepada para nelayan, berapa ribu nelayan yang dipelihara oleh PERINUS, apa tantangan dari PERINUS, apa ada impor ikan yang besar-besaran sehingga Perinus merugi dan nelayan merugi atau apa tantangannya. Jadi kami di Komisi IV DPR RI bisa menangkap apa yang harus kami dukung untuk PERINUS agar punya multi player effect kepada ruang nelayan kita.

Terima kasih Pimpinan.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Pimpinan, ujung pojok.

KETUA RAPAT:

Silahkan, senior kita Bapak Ibnu.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Terima kasih Pimpinan.

Saya mendengarkan sekilas dari PERINUS ini belum menceritakan neraca perdagangannya selama ini apakah untung atau rugi secara *highlight* saja.

KETUA RAPAT:

Bapak Ibnu, boleh saya sebenarnya itu yang tadinya mau kita bicarakan setelah ini Pak. Ini dari semua BUMN yang hadir pada siang hari ini tidak ada satupun yang mencantumkan *balanced* atau neraca keuangannya. Apa yang nanti mau kita diskusikan lebih lanjut lagi, kalau neraca keuangannya saja tidak ada.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Makanya itu kalau minta dukungan itu apa yang mau didukung, performa perusahaannya ini neracanya bagaimana untung atau rugi atau setengah rugi atau untung banyak dan lain sebagainya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Ibnu.

Ibu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Betul Pak, jadi kami mendengarkan miris, kayaknya rasanya tidak ada nasionalisme yang tinggi dari para Dirut ini untuk mensejahterakan

masyarakat. Saya ini dibesarkan dari petani garam loh Pak, saya lahir tahun 1948 di Cirebon. Jadi saya miris mendengarkan ini, kok rupanya hanya pencitraan bagaimana Dirut ini selalu berkuasa di BUMN. Tidak ada rasa untuk mensejahterakan para binaannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bapak Dirut mohon catatan dalam hal ini....

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Pimpinan, boleh Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mbak Wulan, silakan.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Terima kasih.

Lanjut dari teman-teman yang terdahulu, jadi rasanya kalau misalnya seperti disampaikan Bapak Ibnu tadi, kalau Rapat Dengar Pendapat Umum kalau misalnya memang kita ingin tahu kondisi dari Direktur ini dengan perusahaannya tapi kita juga tidak melihat atau tidak bisa juga mendengarkan apa yang terjadi. Nah, untuk itu apakah kita bisa kasih waktu untuk Dirut-Dirut ini melangkapi dan sambil rapat diskors, karena kalau misalnya kita minta waktu lagi hanya untuk menambahkan itu juga nanti lama. Dan nanti kita masuk lagi setelah Sidang Paripurna.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak Dirut saya rasa untuk neraca keuangan itu kan hal yang pasti semua ada. Saya rasa stafnya bisa langsung segera ya print kalau perlu kita minta neraca keuangan 5 tahun terakhir bisa tidak? Langsung saja jangan kita skors dulu Mbak Wulan karena nanti kita ini menunggu tidak tahu Rapur jam berapa, kita lanjutkan saja. Jadi mohon Bapak Dirut silakan timnya diinformasikan segera kita tunggu sekarang juga, sekaligus kita mendengarkan paparan dari BUMN berikutnya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan, sebelah kanan.

KETUA RAPAT:

Bapak Slamet silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Inikan mitra kita juga mungkin perlu sholat, perlu makan karena sudah jam 13.00 WIB ini. Usulan Mbak Wulan tadi walaupun sebentar saya pikir perlu dipertimbangkan.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Khalid.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya pikir ini hanya sekedar saran mungkin untuk kita semua. Saya melihat ini mohon maaf Bapak Pimpinan, melihat kalau begini alurnya pertemuan kita ini tidak akan ada solusi konkrit. Saya menyarankan karena permasalahan ini kita meminta *output* kepada perusahaan-perusahaan yang sedang sakit. Permasalahan Sang Hyang Seri, ini maaf untuk menampung saja mereka sudah tidak mampu, sudah koleps.

Saya menyarankan kita sebagai Komisi IV DPR RI dan juga mereka dari permasalahan-permasalahan internal kita duduk fokus, misalnya dengan Sang Hyang Seri permasalahannya apa, masih bisa kita obati atau tidak. Kalau memang tidak ya kita lakukan langkah baru, sehingga kita tidak mengharap sesuatu output yang baik pada perusahaan yang baik pada perusahaan yang sakit. Ini harus ada langkah konkrit kita, kalau begini habis paparan, setelah paparan kita bertanya mereka menjawab, pulang selesai, terus kedepan begitu terus. Saya menyarankan Pimpinan, kalau bisa kita duduk dengan Sang Hyang Seri misalnya permasalahan mereka apa, mereka harus menyampaikan secara terbuka. Jadi jelas apa yang harus kita lakukan sebagai Komisi IV DPR RI, apa yang mereka lakukan sehingga ada penyelesaian secara konkrit, kita tidak hanya Rapat Dengar Pendapat tanpa penyelesaian yang komprehensif.

Saya pikir itu saran dari saya Pimpinan, saya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Saya kira saya setuju dengan Bapak Halid, ini terlalu banyak yang diundang ini. Sudah gitu penyajiannya juga tidak standar, bermacam-macam penjelasan yang tidak fokus pada masalah yang pokok sehingga kita tidak bisa memberikan saran ataupun usulan untuk penyelesaiannya masalahnya. Saya lihat terlalu banyak jadi tidak fokus tadi, dan kita tidak bisa melihat adanya *core* kompetensi dari setiap perusahaan. Masing-masing menjelaskan unit usaha yang berbagai macam tapi tidak fokus kepada *core* kompetensinya. Yang kedua, penyajiannya tadi tidak lengkap. Saya kira kalau model diskusi seperti ini memang agak sulit ini kita mencari suatu kesimpulan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bapak Panggah.

Bapak dan Ibu, saya perlu informasikan sesuai dengan agenda rapat yang kita sepakati bersama minggu lalu memang tadinya rapat ini dibagi di dua sesi, pagi dengan BUMN Pertanian, siang bersama BUMN Perikanan. Karena ada Rapur kemarin Pimpinan memutuskan untuk dijadikan satu. Memang tidak ideal tapi tidak masalah kita coba kita selesaikan, kita dengarkan sebisa mungkin, kan ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau ingat di rapat internal kita minggu lalu ini kita tadi rubah polanya. Sebelum kita bertemu dengan eselon I mitra-mitra kerja kita maupun Rapat Kerja dengan Menteri nantinya kita ingin mendengarkan semua dari stake holder. Makanya kita mencoba mendengarkan dari semua stake holder yang ada di mitra-mitra kita sepadat mungkin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

Saya pahami, jadi biarkan presentasi saja dulu.

KETUA RAPAT:

Itu yang saya minta dari tadi.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Nanti ada tanggapan atau tidak tergantung waktu, bisa dipanggil satu kali, satu hari lagi sesuai dengan ide Bapak Khalid. Panggil, kalau ada waktu kita tidak apa-apa ada formula tentang konsinyering untuk menyelesaikan yang ini. Mudah-mudahan itu pada mau semuanya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Haerudin.

Makanya dari tadi saya mohon kesepakatan teman-teman Anggota, sebelum ada interupsi-interupsi lagi kita biarkan ini selesaikan dulu. Dari tadi saya sudah minta, tapi tadi ada interupsi-interupsi lagi jadi kita lama ini. Saya mengerti pasti setiap Anggota mempunyai interupsi yang sebenarnya pasti bagus, tapi karena keterbatasan waktu saya mohon kita persilakan BUMN.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan, begini Pimpinan, inikan menyangkut persoalan....

KETUA RAPAT:

Nah, ini Bapak Haerudin dari tadi ini saya mau coba selesaikan dulu, Bapak Haerudin sudah interupsi berapa kali siang hari ini.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan begini, kenapa ini interupsi banyak karena persoalan cara penyampaian yang harusnya simple masalah bukan muter seperti kita tawaf.

KETUA RAPAT:

Baik Pak, memang sekali lagi saya tekankan tidak ideal tapi marilah kita coba, kita terima dahulu. Kalau nanti seperti Bapak Haerudin bisa memungkinkan ya kita konsinyering lagi. Kita undang lagi, kita undang lagi sampai permasalahan saya setuju dengan Bapak Khalid tadi tuntas.

Boleh kita teruskan sampai selesai? Mohon tidak ada interupsi sampai bahan dari mitra BUMN selesai.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Pimpinan, interupsi.

KETUA RAPAT:

Bapak Slamet, mohon nanti bebeknya dulu disediakan baru Bapak Slamet bicara.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Ini demi keberlangsungan rapat kita hari ini Bapak Ketua. Mohon ijin, satu menit. Karena saya sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman kita tetap lanjut, akan tetapi kita harus melihat waktu Pimpinan, karena kita lihat dari arah kursi anggota pun hari ini sudah mulai berkurang. Kita juga menghargai mitra kita sudah datang sedangkan Anggota kita sudah

berkurang. Jadi yang kita harapkan diskors nanti kita lanjutkan rapat ini untuk Ishoma Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya rasa ini jam 14.00 WIB ini ada rapat Baleg. Saya ada Rapat Bamus, ini siapa yang memimpin sekarang Pak. Boleh tidak, kalau ada Bapak-bapak tadi ya, ini coba kita kesepakatan lagi, kalau ada yang ingin Ishoma silakan tadi yang sudah memberikan paparan kami persilakan. Saya tidak apa-apa, Anggota juga mau satu per satu melipir nanti kembali tidak apa-apa. Tapi saya ingin ini diselesaikan dulu, saya disini sampai selesai juga tidak apa-apa, saya sendiri.

Baik, terima kasih.

Bapak Dirut kita lanjut.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Baik, Bapak Pimpinan.

Terkait adanya kekurangan bahan dan materi presentasi kami minta maaf dan menjadi bahan koreksi kami. Tapi memang kami terus terang tadi memang saking bersemangatnya ini kelihatannya kesempatan saya selama jadi Dirut di BUMN baru ini saya bisa bertatap muka, sehingga banyak sekali yang ingin disampaikan sehingga mungkin saking semangatnya. Jadi mohon juga kedepannya kami akan lebih terstruktur dan berkoordinasi.

Ada satu lagi BUMN dari Berdikari.

KETUA RAPAT:

Ada dua Pak, Berdikari sama saya lihat bahan dari Perindo sudah tiba. Jadi kita ke Berdikari setelah itu Ibu selesaikan tadi presentasinya.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Terkait *financial highlight* tadi sebenarnya ada beberapa yang sudah menyampaikan cuma tidak dengan neraca lengkap, karena mungkin untuk mempersingkat penjelasan. Terus untuk yang bermasalah saya kira seperti Berdikari sekarang sudah sehat, jadi tidak semuanya dalam permasalahan keuangan sebenarnya.

Silakan Bapak Dirut PT Berdikari.

Plt. DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (PERSERO) (OKSAN O. M. PANGGABEAN):

Terima kasih Bapak Dirut.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati dan muliakan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kami langsung saja kepada profil PT Berdikari. Seperti diketahui bersama bahwa PT Berdikari awalnya berdiri tahun 1966 pada mulanya adalah sebagai *pilot project*. Jadi PT Berdikari ini dulunya dibawah Sekretariat Negara, jadi hampir semua project-project Pemerintah itu dikerjakan oleh Berdikari itu tahun 1966, hingga sampai tahun 2000 Berdikari resmi menjadi PT. Berdikari Persero di bawah Kementerian BUMN. Kemudian dengan berjalannya waktu dalam 5 tahun sebelum tahun 2016 seperti diketahui bersama bahwa PT Berdikari mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan dan hampir lebih kurang 250 miliar pada saat itu kerugian yang berakumulasi sejak tahun 2010 sampai dengan 2016. Sehingga posisi keuangan yang sangat memprihatinkan.

Kalau boleh saya baca memang untuk tahun 2016 pada saat itu Berdikari hanya mempunyai 230 miliar dengan laba minus 80 miliar. Kemudian dengan berjalannya waktu pada tahun 2017 ada upaya dari kami termasuk bantuan dari Pemerintah kami memasuki fase pemulihan yang ditandai dengan perbaikan posisi keuangan melalui penjualan aset dan menyelesaikan kewajiban terhadap perbankan dan karyawan. Memang tahun 2017 itu kami sudah mulai terutama di akhir tahun ada pergeseran aset kami di tanah Yos Sudarso sehingga dari tahap itu kami sudah bisa memasuki tahap untuk tahun 2017 dengan posisi yang optimis.

Proses transformasi bisnis kami dan SDM dengan fokus kepada peternakan itu dimulai pada tahun 2018, dimana PT Berdikari Persero mendapatkan kepercayaan untuk melakukan impor anak ayam *grandparent stock* dari Kementerian Pertanian. Dan selain kita mendapatkan impor *grandparent stock* kita juga mendapatkan seperti penugasan dari Pemerintah dengan melakukan impor daging kerbau sebanyak 20 ribu ton yang kami bisa selesaikan dalam jangka waktu 6 bulan pada saat itu.

Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan transformasi dengan meningkatkan pengendalian, memperbaiki SOP yang sebelumnya memang belum kami lakukan dengan sempurna. Kemudian kami melakukan *review structure* organisasi dan penyelesaian kewajiban yang masa lalu. Untuk diketahui bersama di tahun-tahun sebelumnya posisi neraca kami, posisi kerugian dan posisi hutang piutang kami yang cukup memprihatinkan sehingga di tahun 2019 kami sudah melakukan beberapa perbaikan. Di tahun 2019 ini beberapa hal yang sudah kami lakukan di antaranya adalah kami juga mendapatkan kepercayaan pada tahun 2019 ini untuk mendapatkan penugasan untuk impor daging sapi sebanyak 3.528 ton yang tadinya memang diberikan kepada 3 perusahaan, yaitu perusahaan PT PPI sebanyak

10 ribu ton, kemudian BULOG sebanyak 30 ribu ton dan Berdikari sendiri sebanyak 10 ribu ton. Di karena keterbatasan waktu ijin yang kami dapatkan di bulan Oktober sehingga kami hanya bisa merealisasikan sebanyak 3.528 ton sementara dua perusahaan lainnya tidak melakukan sama sekali. Kemudian tahun 2020 kami sudah mulai melakukan penyusunan RJPP untuk 5 tahun kedepan. Itu gambaran umum terhadap perusahaan kami.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa PT Berdikari Persero sebenarnya adalah mempunyai 3 anak perusahaan, kami punya PT Berdikari Mabel Nusantara yang bertempat di Jawa Timur, bergerak dalam bidang industry *wood working*, furniture dan perdagangan umum. Kami adakan ekspor produksi mabel dan ekspor ke Eropa dan saat ini juga kami sudah memasuki pasar dalam negeri lokal, seperti kami telah mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan kepercayaan untuk pembangunan hotel yang ada di Bali.

Kemudian kami juga mempunyai Berdikari Logistik Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa pergudangan dan transportasi yang mempunyai 4 cabang ada di Jawa Timur, ada di Sumatera, kemudian ada di Makasar dan satu lagi di sekitar Sulawesi Utara di daerah Bitung. Kemudian kami juga punya PT. Berdikari United Labstock bergerak dalam bidang peternakan dalam hal ini *breeding*, *fattening* dan *trading* yang saat ini berada di Sidrap.

Berikutnya kami sampaikan mengenai *summary* bisnis PT Berdikari dalam 2 tahun terakhir ini. Pertama adalah kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Berdikari Persero di tahun 2018 dengan kami melakukan impor *grandparent stock* itu karena keterbatasan di satu sisi adalah bisnis model yang kami lakukan adalah kami melakukan sewa kandang. Sewa kandang saat ini kami punya dua kandang, untuk *grandparent stock* pertama adalah di Pasuruan dan satu lagi di Tasikmalaya.

Kemudian kami juga melakukan pengembangan breeding untuk parent stock, parent stock sendiri kami saat ini sudah mempunyai 100 ribu ekor, kami punya 3 kandang, pertama adalah di Ciamis-Jawa Barat kemudian satu lagi di Medan dan satu lagi di Sukabumi, itu yang parent stock. Kemudian kami saat ini juga sudah menghasilkan final stock, final stock yang sudah kami hasilkan itu kami berikan, kami sebar, kami berikan kepada sebagian dari kemitraan dan sebagian lagi kami jual secara komersial.

Di tahun 2019 ini memang ada juga rencana kami untuk masuk kepada bisnis rumah potong hewan unggas yang kami akan lakukan sejak tahun 2019 proses perencanaannya yang tentunya akan mulai dilakukan di tahun 2020. Kami masuk kepada bisnis rumah potong unggas ini adalah sistem kemitraan yang kami lakukan tadi DOC final Stock yang sudah kami jual atau kami kerjasamakan dengan kemitraan kami tentu saja akan kami serap kembali. Kami sebagai *of taker* dan ada kepastian *supply* terhadap RPHU yang akan kami lakukan.

Di satu sisi bahwa ada kepastian *supply* dan kami ada kepastian *of taker* dari program kemitraan yang sudah kami lakukan. Yang tentu saja *effort*

yang kami lakukan berikutnya adalah bagaimana kami bisa mendapatkan penjualan baik di pasar BUMN maupun di perusahaan Horeka atau swasta lainnya atau di *wet market*.

Kemudian di bisnis berikutnya adalah rencana kami untuk mempunyai pabrik pakan karena seperti kita ketahui bersama pakan ini merupakan 70% komponen daripada proses perunggasan itu hampir 70% itu adalah pakan. Sehingga tahun 2019 kemarin kami sudah melakukan Maklon dan tahun 2020 rencana kami juga akan terus masih melakukan Maklon sampai kami mendapatkan pendanaan yang cukup bisa kami dapatkan. Karena untuk mendirikan pabrik pakan itu lebih kurang diperlukan hampir 100 miliar untuk proses pembangunan pabrik pakan tersebut.

Saat ini PT Berdikari sudah mengajukan permohonan untuk impor *grandparent stock* 72 ribu untuk tahun 2020. Seperti kita ketahui bersama bahwa memang sampai saat ini Pemerintah Indonesia terus melakukan impor *grandparent stock* sejak tahun 2012 sampai dengan 2019 ini rata-rata impor *grandparent stock* dari Amerika maupun Eropa itu lebih kurang rata-rata hampir 700 ribu ekor per tahun yang di impor. dari 700 ribu ekor itu yang bisa Berdikari dapatkan hanya sekitar 10% sehingga untuk kedepannya mungkin kami perlu mendapatkan satu support dari Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi untuk bisa kami mendapatkan support, mendapatkan kepastian daripada jumlah DOC *grandparent stock* yang bisa kita impor. Kenapa kami mulai masuk dari sektor hulu? Karena ini adalah kepastian supply terhadap proses perunggasan, baik untuk turunan ke *grandparent stock* maupun *final stock*. Itu yang kami harapkan kedepan.

Kemudian pada kesempatan ini juga kami akan sampaikan bahwa rencana kami kedepan, kami akan mempunyai kandang sendiri seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kandang yang sekarang kami pakai adalah kandang sewa yang tentu saja akan berdampak kepada cost, kepada HPP dan tahun 2020 ini ada rencana kami untuk membangun kandang sendiri, yaitu kandang *grandparent stock* di daerah Jawa Timur. Yang tentu saja akan membantu kami dalam proses kepastian atas penggunaan kandang tersebut.

Selanjutnya memang tahun 2020 juga kami ada rencana untuk membangun kandang *grandparent stock* karena *parent stock* yang akan memberikan *supply* kepada kemitraan kami untuk mensupply *final stock* tersebut. Tahun 2020 rencana kami untuk pemeliharaan *parent stock* sebanyak 215 ribu ekor dengan kandang sebanyak 6 kandang.

Itu yang bisa kami sampaikan untuk bisnis perunggasan. Selanjutnya kami akan sampaikan sedikit mengenai importasi daging kerbau maupun daging sapi Brasil. Seperti diketahui bersama bahwa memang kebutuhan nasional atas daging yang kami dapatkan adalah tahun 2019 kebutuhan daging nasional itu sebanyak 686 ribu ton. Dari 686 ribu ton itu produksi nasional hanya 429 ribu ton, sehingga dalam rangka untuk bisa menutupi kekurangan tersebut, defisit tersebut memang Pemerintah harus melakukan impor. Dari impor tersebut kuota impor daging kerbau yang sudah dirilis oleh

Pemerintah tahun 2019 sebanyak 80 ribu ton dan ijin daging sapi Brasil yang tahun lalu dikeluarkan adalah sebanyak 50 ribu ton. Sehingga masih kebutuhan itu masih defisit sebanyak 126 ritbu ton yang tentu saja dapat dipenuhi dari impor daging sapi, baik dari Australia, Amerika maupun dari Spanyol, New Zeland dan juga dapat dipenuhi dari impor Bakalan yang selama ini bisa dilakukan hanya dari Australia. Yang tentu saja akan sebenarnya kondisi kalau terus kita berelion kepada Australia tentu saja akan memberikan dampak yang besar terutama dari *cost* yang cukup luar biasa

Untuk tahun 2020 juga kami sampaikan bahwa ada kebutuhan daging yang sudah dirilis oleh Pemerintah juga kebutuhan daging tahun 2020 sebanyak 690.176 ton. Dengan asumsi kebutuhan konsumsi per kapita sebanyak 2,56 kilo. Produksi daging nasional yang sudah dirilis oleh Kementan berdasarkan rapat Komisi IV DPR RI tanggal 18 November 2019 itu produksi daging nasional sebanyak 450 ribu ton. Sehingga defisit itu masih terjadi sebanyak 240 ribu ton yang tentu saja bisa di supply dari impor daging kembali, baik daging kerbau atau daging sapi lainnya maupun dari impor Bakalan.

Pada kesempatan ini, kami Berdikari kembali mengajukan kiranya diberikan kesempatan kembali untuk bisa berkontribusi dalam hal penugasan ini karena memang dengan apa yang sudah kami lakukan dalam 2 tahun terakhir ini memberikan bantuan cukup signifikan terhadap kondisi *cash flow* kami, neraca kami sehingga kami bisa *survive* terutama untuk tahun 2018, 2019 kami *survive* selain dari daging impor kami juga dari bisnis peternakan tadi. Itu yang sudah kami lakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Berdikari yang sudah terjadi sejak 5-7 tahun terakhir.

Selanjutnya kami dalam kesempatan ini Bapak dan Ibu Pimpinan yang kami hormati. Dalam bisnis peternakan ini tentu saja komponen yang paling terpenting adalah 70% itu adalah pakan, terutama jagung. Saat ini kami Berdikari sebenarnya memerlukan *supply* jagung itu hampir lebih kurang 60 ribu ton itu per tahun. Kalau itu dalam kondisi sebagian yang kami kerjakan, namun kalau dia potensi yang kami dapatkan itu sebenarnya Berdikari memerlukan hampir 868 ribu ton itu per tahun jika di rata-ratakan memerlukan 54.289 ton per bulan. Itu kebutuhan jagung yang kami perlukan untuk bisnis peternakan ayam yang sudah kami lakukan.

Upaya yang kami lakukan sekarang ini adalah kami mendapatkan harga jagung yang cukup tinggi, karena kondisi yang harga yang cukup meningkatkan terutama di bulan Januari-Februari. Dalam kesempatan ini kami sampaikan juga kami sudah ada rencana berkolaborasi dengan bersinergi dengan PT Sang Syang Seri maupun dengan Pertani untuk bisa melakukan penanaman jagung di tanah yang dimiliki oleh Pertani atau Sang Hyang Seri...

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, ijin sebentar interupsi.

Saya mau klarifikasi sebentar Bapak Dirut Berdikari, harga jagung sekarang cukup tinggi itu maksudnya berapa?

Plt. DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (PERSERO) (OKSAN O. M. PANGGABEAN):

Sekarang informasi yang kami terima sudah hampir 5000 Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

HPP berapa Pak?

Plt. DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (PERSERO) (OKSAN O. M. PANGGABEAN):

HPP tersebut sudah sekitar 6.300 Pak sampai 6.400, sehingga harga jual sekarang pakan sekarang hampir 7.000 lebih Pak. Tadinya kalau misalkan harga jagung itu sekitar 3.900 sampai 4.100, HPP itu sekitar 6.000 kurang Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Jadi *cost* produksinya itu lebih tinggi daripada....

Plt. DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (PERSERO) (OKSAN O. M. PANGGABEAN):

Sekarang *cost* produksi lebih tinggi, itu yang menjadi....

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Oke, klarifikasi saja Bapak Ketua.

Terima kasih Ketua.

Plt. DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (PERSERO) (OKSAN O. M. PANGGABEAN):

Itu di tingkat bukan di petani Pak, itu sekarang itu kalau jagung itu Pak, dari petani masih sekitar 4.243 tetapi begitu, kalau 2.800 mungkin bisa Berdikari yang membeli itu semua Pak.

KETUA RAPAT:

Bapak Dirut bisa dilanjut dulu.

Plt. DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (PERSERO) (OKSAN O. M. PANGGABEAN):

Baik, memang kami memerlukan hampir 54 ribu ton Pak, itu 1 bulan Pak. Jadi kalau memang ada potensi itu mungkin kami bisa menyerap semua itu Pak, mungkin dalam kesempatan ini kami mohon support informasi dan kondisi atas potensi yang ada supaya kami bisa menyerap kembali Pak, semua jagung yang ada di Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat. Karena memang itu kami perlukan sebagai komponen penting dalam bisnis perunggasan yang sudah kami lakukan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan sekali lagi bahwa kami sekarang itu sedang membuatkan satu rencana kerja sama sinergi BUMN dengan BUMN pangan lainnya untuk bisa melakukan penanaman jagung minimal 1000 hektar. Dengan 1000 hektar itu akan menghasilkan sekitar 5 ton per hektar dengan dua kali tanam, saya kira minimal dapat mensupply kebutuhan jagung milik PT Berdikari.

Dalam kesempatan ini Bapak dan Ibu Pimpinan, juga kami sampaikan bahwa ada rencana Pemerintah untuk mengimpor jagung pakan dari negara lain yang ditugaskan kepada BULOG. Saya kira dalam kesempatan ini juga mungkin kami diberikan kontribusi.

KETUA RAPAT:

Apakah sudah selesai Bapak Dirut?

Plt. DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (PERSERO) (OKSAN O. M. PANGGABEAN):

Itu yang kami lakukan kalau memang masih kekurangan itu pilihan terakhir sebenarnya yang bisa kami lakukan. Namun, dengan kondisi kami akan bekerja sama dengan BUMN lainnya saya kira potensi itu bisa dapat disupply dari dalam negeri.

Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kemudian support Pemerintah yang kami perlukan untuk kedepannya adalah memang adanya kembali kami diberikan privileg Pak, terutama untuk impor yang harus kami lakukan terutama untuk DOC GPS, karena DOC GPS ini adalah kebutuhan yang terus kami perlukan untuk bisa memberikan supply terhadap bisnis perunggasan yang kami lakukan.

Saya kira itu yang bisa kami lakukan, lebih kurangnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Rekan-rekan saya barusan mendapatkan informasi bahwa Rapat Paripurna akan ditunda, tidak ada hari ini, Bamus tidak akan ada Rapat Paripurna hari ini. Berarti kalau boleh kita selesaikan yang terakhir dulu, sebelum nanti mungkin kita skors sebentar baru kita lanjut dengan tanya jawab.

Bisa kita setuju?

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Bapak Ketua, sebentar.

Sedikit saja tadikan memang ada permintaan untuk menambahkan data ya, di mana rugi labanya saja sedikit sepintas terkait dengan yang menjadi lingkup Berdikari ini, ada Berdikari Mebel, ada Berdikari Logistik, Berdikari *Life Stock*. Nah, ini sedikit saja bagaimana ini kira-kira anggarannya.

KETUA RAPAT:

Pak Panggah nanti boleh kita rampungkan dulu Pak, biar....

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Ini bagian dari penjelasan sebenarnya, melengkapilah begitu.

KETUA RAPAT:

Bisa dijawab secara singkat Pak.

Plt. DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (PERSERO) (OKSAN O. M. PANGGABEAN):

Secara sekilas untuk Berdikari Mebel Nusantara memberikan kontribusi yang cukup signifikan, positif Pak, secara konsolidasi kami positif Pak. Di tahun 2019 ini konsolidasi kami bisa *a cheap* 20% di atas target RKAP. Kemudian laba kami juga sekitar 10% di atas RAKP, sehingga tahun 2019 ini kami *acheap* dari target kami Pak, 2019 dan tahun 2018 juga begitu Pak. Untuk tahun 2020 ada peningkatan sekitar 20% Pak, itu yang kami rencanakan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, tapi saya rasa kita ingin melihat angka-angkanya, demikian ya Pak. Nanti kita bisa lihat angkanya Pak, tolong Bapak Dirut sekalian nanti kita ingin melihat benar-benar angkanya secara nyata.

Ibu adalah yang terakhir untuk sementara, kami persilakan tadi kita lanjutkan.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami lanjutkan, kami fokus kepada yang terakhir adalah di kinerja 2015-2019, mohon dapat ditayangkan. 5 tahun terakhir kami masih mendapatkan laba, kemudian terakhir di tahun 2018 kami telah memberikan kontribusi deviden kepada negara sebesar 2,6 miliar. Memang masih sangat kecil Pak, tetapi kalau dilihat dari persentasi laba yang kami peroleh itu sudah 10%. Kemudian selain daripada itu ada pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebesar 2,5 pada tahun 2018. Tahun 2019 ini masih dalam proses perhitungan, *insya Allah* juga kita bisa melakukan hal yang sama.

Untuk tahun 2020 strategi dan kebijakan yang kami lakukan adalah kami tetap fokus kepada *core business* kami. Yang pertama adalah di optimalisasi aset sarana dan prasarana terutama di pelabuhan perikanan. Kemudian adalah peningkatan perdagangan melalui ekspor dan perdagangan lokal. Selanjutnya adalah penguatan usaha budidaya yang juga merupakan *core business* kami. Kemudian untuk tambahan *supporting* adalah kami melakukan semua kegiatan saat ini sedang dilakukan tahapan untuk menggunakan IT sehingga bisa dilakukan semua digitalisasi, sehingga kedepan kita berharap ini jauh lebih baik dan bisa lebih efisien. Kemudian tambahan untuk *supporting* juga adalah penguatan organisasi dan kapasitas SDM yang bekerja.

Selanjutnya dari kebijakan dan strategi di tahun 2020 ini kami ada beberapa *quick win* di yang kami harapkan dapat dilakukan di awal tahun untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan. Yang pertama adalah pengembangan usaha pelabuhan, dimana kami sudah punya pelabuhan perikanan Lampulo yang saat ini karena ada perubahan dari Kementerian Kelautan untuk merubah Pelabuhan Lampulo menjadi Pelabuhan Lampulo yang sekarang yang dikelola oleh Kementerian, sehingga yang milik dari Perindo ini tidak terpakai lagi. Jadi kami akan gunakan untuk pembangunan docking dan disana telah kami survey tidak ada fasilitas *docking*. Kemudian demikian juga dengan cabang Berondong.

Selanjutnya adalah pengembangan salah satu segmen usaha, yaitu penjualan bahan bakar. Di beberapa cabang yang potensinya sangat bagus tetapi belum dioptimalisasi. Selanjutnya adalah pengembangan pengelolaan pasar ikan modern. Di Muara Baru terdapat pasar ikan modern yang sangat besar, saat ini sudah beroperasi. Kemudian kedepan kita akan menjadikan ini juga sebagai salah satu sarana wisata, sehingga selain daripada ada proses bisnis perikanan tetapi ada juga tambahan terutama untuk meningkatkan sektor pariwisata, itu dimungkinkan. Tetapi ini tidak melangkahi *core business* kami karena kami bekerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian yang terpenting lainnya adalah pengoperasian pabrik pakan yang sudah selesai di akhir tahun 2019.

Selanjutnya ini adalah proyeksi laba rugi Bapak dan Ibu Dewan yang kami hormati. Di tahun 2018 Bapak, kami laba rugi berjalan adalah 25,9 miliar kemudian di 2019 ini masih prognosa belum final di 12 miliar 700. Ada penurunan yang sangat signifikan di pendapatan usaha termasuk juga di laba, nanti ini akan mungkin berkaitan dengan dukungan yang kami harapkan dari Bapak dan Ibu Dewan yang terhormat.

Kemudian terkait dengan produksi, berapa kontribusi produksi Perindo terhadap produksi ikan nasional. Slide berikutnya, kita akan sangat melihat di tahun 2019 dari data Kementerian Kelautan bahwa produksi ikan nasional itu sebesar 18.000.760 ton per tahun. Kami baru bisa memberikan kontribusi sebesar 18.000 ribu ton, jadi sangat jauh sekali Bapak. Ini juga ada beberapa penyebab yang akan kami sampaikan di belakang.

Di tahun 2020 kami berharap bisa meningkatkan lebih dari tahun 2019 Pak. Selanjutnya kami melaporkan realisasi proyek....

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Interupsi sebentar Bapak Ketua, saya Ichsan Bapak Ketua, boleh sebentar saja. Dari data itu boleh tahu impor ikan yang dilakukan oleh Perindo masuk dalam data itu tidak Ibu?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Masuk Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Yang mana Ibu, berapa impor ikan yang Ibu lakukan dapat kuota impor berapa, terus kemudian masuk dalam produksi yang mana.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Di perdagangan Pak, itu yang di tahun 2019 itu ada 16.546.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Itu impor Ibu semua?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Oh, tidak Pak.

Itu yang terbesar ada perdagangan lokal Pak. Jadi kalau saya boleh memberikan persentasi untuk impor itu tidak lebih dari 10% sangat sedikit.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Yang saya tanya di dalam perdagangan itu ada berapa yang impor?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Untuk tahun 2019 kurang lebih sekitar 1.200 ton kurang lebih.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Artinya 1.200 ton dari 16.546 itu.

Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Ijin melanjutkan Bapak, baik kami melaporkan realisasi proyek dana PMN yang diberikan kepada Perum PERINDO. Pada tahun 2015 kami mendapatkan dana PMN sebesar 300 miliar. Kemudian ini sudah peruntukannya untuk 9 item yang ada di dalam paparan. Dari 9, 8 sudah pembangunan sudah selesai, fisik sudah selesai. Yang ke-9 adalah pabrik pakan itu sudah selesai tapi belum beroperasi. Yang 8 sudah beroperasi dan sudah memberikankontribusi kepada perusahaan. Di slide belakang nanti ada di mana kami pada tahun 2018 dana PMN dari 8 investasi yang diberikan itu menghasilkan pendapatan sebesar 8 miliar 297.

Selanjutnya kemudian manfaat yang diberikan dengan kalau ini adalah lokasi daripada dan proyek-proyek yang didanai oleh PMN. kemudian manfaat dari dana PMN yang dirasakan oleh masyarakat adalah, yang pertama adalah dari sosial ekonomi. Kami bisa memberikan kepada masyarakat adalah membuka lapangan pekerjaan dari 9 investasi yang didanai dari PMN itu kami sudah merekrut tenaga kerja sebesar 3.50 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ini juga mempunyai *multi effect* sosial di masyarakat, dimana salah satu contoh di Belawan kami membanun floting docking. Masyarakat yang ada disitu kemudian ikut terbantu dengan mendirikan usaha-usaha untuk mensupport *docking* tersebut. Contoh seperti toko cat atau toko-toko peralatan *docking*.

Kemudian dengan adanya PMN kami juga membayarkan pendapatan, pendapatan sebesar 250 miliar. Kemudian ini adalah tadi yang sudah saya sampaikan adalah manfaat dana PMN kepada perusahaan adalah sebesar 8 miliar 200. Di tahun 2020 kami yakin akan bisa memberikan lebih karena pabrik pakan yang merupakan pengguna dana terbesar PMN, yaitu 154 sudah akan beroperasi Bapak.

Baik, berikutnya ini Bapak yang kami sangat harapkan dukungan dari Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati. Bahwa kami menghadapi beberapa masalah yang kemudian ini juga menjadi salah

satu faktor penurunan pendapatan dan laba dari perusahaan. Yang pertama adalah adanya permasalahan terhadap pungutan jasa tambat labuh kami dengan Kementerian Kelautan.

Sesuai dengan pendirian perusahaan kami, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2013 kami ditugaskan untuk melakukan pelayanan jasa tambat labuh kepada seluruh kapal perikanan. Itu sejak Peraturan Pemerintah itu dan sebelumnya juga sudah ada. Nah, sekarang kemudian jasa ini dikelola oleh Kementerian Kelautan hanya berdasarkan keputusan Menteri Kelautan, sehingga ada tumpang tindih dari 2 peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Kepmen nomor berapa Ibu? Permen atau Kepmen?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Kepmen Bapak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Nomor berapa dan tahun berapa?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Saya cek sebentar Bapak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Harus jelas Ibu, jangan sampai kita bicara Kepmen tapi kemudian kita tahu tidak, tahun berapa mulainya. Mohon ijin Ketua.

Ibu ini Dirut ya?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Iya Bapak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bukan PLT ya.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Dirut.

Saya minta waktu 10 menit Bapak untuk mencari Kepmennya.

KETUA RAPAT:

Tidak apa-apa, sambil dilanjutkan Ibu.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Nah, yang nomor satu ini ada kaitannya dengan nomor tiga, bahwa yang pertama ini terkait dengan dua permasalahan yang sekarang kami hadapi. Untuk pelabuhan perikanan Nizam Zachman di Jakarta dan Pekalongan. Jadi pada bulan Oktober unit pengelola teknis atau UPT itu mengeluarkan surat untuk mengambil alih jasa tambat labuh ini. Sebelumnya Bapak terhadap 6 pelabuhan kami, yaitu yang di Berondong, Belawan, kemudian di Pemangkat itu sudah diambil duluan.

Hal ini sudah kami bersurat dan kami juga sudah menyampaikan ke Kementerian BUMN maupun Kementerian KKP, kami mencoba menyampaikan bahwa kami berdasarkan Peraturan Pemerintah pendirian tahun 2013 Nomor 9 itu juga berhak melakukan hal yang sama.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, klarifikasi.

Pelabuhan itu PPS ya Ibu ya, pelabuhan samudra ya?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Iya, yang di Jakarta PPS Bapak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

6 pelabuhan yang Ibu mau minta kelola itu.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Iya, jadi sebelumnya memang sudah kami yang kelola. Nanti mungkin akan kami sampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013-nya Pak, di mana di Pasal 3 secara jelas menyatakan penugasan-penugasan terhadap kami Pak.

Kemudian yang kedua, kami akan melakukan restrukturisasi hutang. Sebenarnya ini dukungannya sudah diberikan dari Kementerian BUMN dan ini sudah kami berjalan dengan diusulkan untuk direstrukturisasi dengan perbankan BUMN, ini sudah berjalan Bapak.

Kemudian yang keempat adalah kami dukungan yang diharapkan adalah adanya upaya penagihan kerugian tambak kami Pak, di Kerawang karena adanya pencemaran minyak oleh Pertamina. Ini juga dari pihak Pertamina sebenarnya sudah menyatakan akan memberikan, hanya saat ini sedang dilakukan perhitungan oleh BPKP. Jadi relative lebih ini bisa dilakukan.

Kemudian yang penanganan piutang macet, Bapak dan Ibu kalau melihat dari omset kami di tahun 2018 mencapai 1 triliun tetapi di tahun 2019 kami hanya mencapai tapi laba kami jauh lebih baik di tahun 2019, karena kami kemudian melakukan seleksi yang lebih selektif terhadap mitra kami dalam melakukan perdagangan. Beberapa perdagangan yang terjadi di tahun 2018 kemudian menyisakan piutang macet, sehingga ini yang kami sudah bekerja sama dengan Jamdatun untuk meminta pendampingan penanganan piutang ini, itu sudah dilakukan Pak. Dan kita berharap ini bisa dapat dimulai dilakukan penagihan di tahun 2020.

Saya menambahkan Pak, untuk Permen dari Kementerian adalah Permen 08/Men 2012 Bapak.

Demikian Bapak dari kami, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Terima kasih Ibu.

Silakan Bapak Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih.

Ibu Dirut yang saya hormati.

Yang selektif itu termasuk juga impor ya, jadi jangan ikan kembang impor ikan kembang lagi. Kita itu masak ikan kembang tapi kita impir ikan kembang, wah aneh bin ajaib. Jadi logikanya sederhana kalau kasus dulu itu, jadi orang mencari *success fee* melupakan *core business* sendiri.

Terima kasih.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, saya boleh klarifikasi sebentar lagi, terakhir.

Ibu Dirut, itu pasar modern Muara Baru itu dikelola oleh PERINUS atau oleh Kementerian sama Pelabuhan Nizam Zachman itu.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Baik, saya jawab dulu untuk pengelolaan pasar ikan modern oleh kami Pak, PERINDO Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Jadi itu dikelola oleh Ibu ya?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Oleh kami Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Itu tadi dilaporkan tidak tadi Ibu?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Ada Bapak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Neracanya seperti apa nanti kita lihat ya, nanti kita diskusi.

Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Saya tambahkan, ijin Pak.

Untuk pelabuhan perikanan Nizam Zachman Pak, pengelolaannya itu memang ada dua Pak, yang bertabrakan. UPT juga mengelola, kami juga mengelola Pak. UPT juga mengelola salah satu kebersihan dari UPT, kemudian jasa tambat labuh ini. Nah, kami tadikan kan sudah dibagi, kami sebagai pengelola pelabuhan yang menyediakan jasa, UPT adalah sebagai regulatornya seperti itu, tapi kemudian ini karena ada Kepmen ini masuk.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ini masuk PNBPN atau provit di perusahaan Ibu?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Provit di perusahaan kami.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bukan PNBP ya Ibu?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Bukan Pak.

Kemudian kami menjawab Bapak Haerudin, bahwa yang kami impor adalah ikan yang tidak ada di Indonesia Pak, demikian Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak dan Ibu sekalian.

Sekian paparan dari BUMN-BUMN yang telah hadir pada pagi hari ini. Para Dirut tadi saya ingatkan mohon *financial statement*, saya dalam arti ini bukan hanya proyeksi laba rugi tetapi kita ingin lihat neracanya Pak, kalau bisa kita lihat 5 tahun terakhir supaya kita benar-benar bisa melihat kesehatan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dalam arti BUMN yang Bapak dan Ibu Pimpinan.

Kalau saya boleh mendapatkan persetujuan kita break untuk ini jam berapa? Jam 13.30 WIB kita break untuk 30 menit.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Usul, tadi ada semangat yang luar biasa dari teman-teman Komisi IV DPR RI ingin membantu membedah atau ingin berbuat masalahnya apa sih, kita ingin ikut mendiagnosa itu. Sehingga ketika kemudian kita akan membantu kesana nampaknya kita tidak bisa kemudian borongan dipanggil. Sehingga saya usul persentasi yang hari ini menjadi catatan kita untuk kemudian kalau disetujui oleh forum dan Pimpinan, dipanggil satu-satu kita untuk membedah itu, misalnya Sang Hyang Seri sendiri, Berdikari sendiri. Saya saja dari catatan ini misalnya Berdikari kita ingin membedah bisnisnya kayak apa sih di perunggasan, saya orang unggas.

Jadi usulan saya hari ini cukup menjadi bahan untuk kita dalami, nanti ditambah tadi permintaan neraca dan juga rugi laba kita alokasikan waktu kita panggil satu per satu. Itu usulan kami Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya rasa itu usulan yang baik.

Ini saya rasa kalau untuk kita alokasikan satu hari untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu tidak akan cukup. Jadi itu usul kita terima Pak Slamet, kita hari ini istilahnya ya introduction sebagai paparan umum dulu nanti kita mungkin ada

pertanyaan-pertanyaan artian umum, kita akan kembali lagi untuk membedah permasalahan BUMN satu per satu nanti. Untuk sementara kita istirahat dulu....

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Pimpinan, boleh sebentar saja.

Terima kasih.

Jadi menambahkan sedikit Pak Ketua, jadi nanti kalau misalnya kita masuk lagi setelah *break*, setelah mereka juga memberikan data detail, diskusi kita lakukan, saya harap tidak ada jawaban tertulis. Jadi kita tuntas disini juga nanti kalau misalnya kita lanjutkan di dalam pemanggilan satu per satu dari direksi kita bisa perjelas lagi.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. H. SLAMET):

Pimpinan, justru kalau misalnya usul saya tadi diterima rapat hari ini sudah selesai, tinggal ditutup. Nanti kita adakan waktu, jadi tidak perlu diskorsing maksud saya begitu Pimpinan, kalau memang usul saya disetujui.

KETUA RAPAT:

Kita masih ingin sebenarnya, saya masih ingin menerima beberapa bahan lagi. Untuk juga nanti ini kayaknya mungkin ada teman-teman yang diluar juga mungkin masih ada satu atau dua, tapi mungkin tidak kita panjangkan biar kita nanti ada pendalaman lebih lanjut lagi.

Untuk sementara rapat kita skors 30 menit, kita kembali lagi pada pukul 14.10 WIB. Untuk itu rapat saya skors.

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.40 WIB)

Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari para Anggota. Kami sudah memulai menerima neraca pertama dari PT Rajawali Nusantara Indonesia dan kedua dari PT Pertani, kami tunggu sembari berjalan.

Kami persilakan untuk tanggapan pertama Ibu Endang Thohari. Waktu dan tempat kami persilakan.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak-bapak Dirut yang saya banggakan dan saya hormati,
Dan juga para Anggota Dewan teman-teman kita yang saya sayangi.

Saya ini sedih Pak, mendengarkan pemaparan Bapak-bapak Dirut. Saya 30 tahun bekerja di Kementerian Pertanian, kebetulan saya di sekolahkan di Perancis selama 7 tahun. Tapi tidak ada rasa saya untuk mengimpor dari negara-negara lain itu tidak ada, nasionalisme saya cukup tinggi Pak. Jadi saya dibesarkan oleh ayah saya di Cirebon, saya lahir di Cirebon tahun 1948. Bapak bisa bayangkan umur saya sekarang 72 tahun tapi semangat saya 27 tahun Pak, untuk tidak mengimpor dari luar negeri. Jadi saya prihatin Pak.

Saya disekolahkan ayah saya ke Fakultas Peternakan dari garam Pak. Saya masih ingat bagaimana saya membawa garam ke PN Garam tahun 1970-an naik becak, karena di belakang rumah saya itu adalah garam. Saya rumah di Kejawanon di pinggir jalan besar yang belakangnya itu laut. Ayah saya nasionalismenya tinggi juga Pak, ada pengumuman dari Kementerian bahwa itu mau dijadikan pelabuhan yang sampai sekarang mohon maaf ini Pak, mangkrak. Sedih kan Pak, saya masih punya tanah disitu Pak, yang diserahkan kepada Pemerintah untuk NKRI supaya garam kita bagus. Dan disitu ada balong-balong, balong itu adalah perikanan dari laut bandeng Pak, sekarang hilang semuanya Pak, anak dan cucu saya tidak bisa menikmati harta kekayaan yang diwariskan oleh ayah dan ibu saya.

Nah, tadi Bapak cerita tentang Australia, saya sedih miris, karena teman-teman saya peneliti dari UNDIP, dari ITB yang disekolahkan di Perancis sama dengan saya sekelas untuk mencari model-model bagaimana membuat garam yang ideal, setelah pulang ke tidak dipakai Pak. Saya masih ingat benar bagaimana, nama teman saya sampai hafal Pak, Pak Bandul Suratmo meneliti tentang energi surya untuk garam salah satunya, padahal di Perancis itu 4 musim. Jadi kalau musim dingin dia nganggur, ngomong anak saya, pulang dari UGM. Di Jogja pulang ke UGM tidak dianggap ilmunya, padahal itukan kita ini berjuang untuk memakmurkan Indonesia jadi bukan untuk impor.

Cobalah Bapak berpikir yang agak nasionalis Pak, pahlawan-pahlawan kita merebut kemerdekaan kan untuk memakmurkan bangsanya. Saya sedih Pak, mendengar itu. Saya peneliti 30 tahun kemudian 10 tahun saya dijadikan Direktur Agrikultur Riset Manajemen yang membuat DPTP seluruh Indonesia Pak, itu dari hibah Pemerintah Jepang. PMN itu utang Pak, jadi waktu saya jadi Direktur Pembiayaan saya tolak Pak.

Saya membawa grand dari Pemerintah Perancis untuk membuat bank pertanian, tapi karena tidak ada political will yang kuat tidak jalan Pak, dijadikan BLT. Jadi saya dengan Sang Hyang Seri, dengan Pertani itu sudah hafal Pak. Saya miris Pak, Sang Hyang Seri itukan depannya balai besar pertanian padi yang dulu saya membawa Presiden Afrika yang mau belajar menanam padi ke balai besar penelitian. Saya yang menterjemahkan Pak,

saya mendampingi Bapak Soeharto untuk menterjemahkan swasemda pangan. Jadi saya sedih Pak, mendengar itu. Saya di Perancis sekolah 7 tahun Pak, dijadikan *Presidence de delaper, asosiasong depromosiong economilurah* (Bahasa Perancis). Karena bangga dengan Indonesia yang bisa swasembada pangan, bisa membantu negara Afrika. Nah, kok sekarang mundur gitu loh Pak.

Kemudian Berdikari Pak, Berdikari saya sedih saja, apalagi Bapak dari Bogor ya? bukan. Jadi di Balitnak ini Pak, sudah ada peneliti-peneliti kita yang membuat varietas baru, *parent stock* baru, tapi tidak dilirik Pak. Bapak malah nyewa-nyewa kandang, padahal Balitnak itu peneliti-penelitinya disekolahkan di Australia, ke Amerika, ke Perancis, semua dokter dan peneliti saya kenal disitu, karena saya di Badan Litbang Pertanian 30 tahun. Jadi saya sedih Pak, mereka sudah mengeluarkan saya sebut ini Pak, ini saya agak emosi karena umur.

Jadi Pak, di Balitnak itu sudah mengeluarkan beberapa varietas, yaitu ayam KUB, ayam sensi, domba compass agrinak, domba bahtera, domba komposit garut, itik alabimaster, itik mojomaster, itik PMP, kelinci rexi, kelinci reza. Nah, kenapa tidak Bapak manfaatkan, padahal itu hasil penelitian dari peneliti-peneliti kita yang sudah professor-profesor dan belajarnya di luar negeri akan tetapi punya nasionalis yang tinggi untuk mengembangkan potensi lokal kita. Nah, mestinya Bapak-bapak itukan merangkul mereka, belum lagi perguruan tinggi Pak. Jadi saya sedih Pak, kenapa Bapak harus menyewa kandang disitu tanahnya luas di Balitnak Ciawi itu, Bapak bisa pergunakan itu.

Teman-teman saya yang di tempatkan di BUMN yang tadinya idealis karena sistem di BUMN itu pencitraan masuk penjara Pak, sahabat saya di Perancis yang ahli dalam remote sensing di Sang Hyang Seri terus ke BUMN. Apakah teman-teman pada nengok, tidak ada yang nengok, saya yang nengok nangis Pak. Jadi cobalah Bapak berpikir bagaimana potensi lokal kita dikembangkan oleh para peneliti-peneliti kita. Siapa yang akan menghargai ilmu Pak, sedih saya Pak. Kami disekolahkan kesana itu Pak, sengsara karena kita harus efisien sampai kerja Pak. Kami-kami itu di Perancis kerja pada waktu musim panen anggur.

KETUA RAPAT:

Ibu Endang, mohon maaf saya potong sedikit.

Kami kalau duduk disini dengan segala hormat kepada Ibu Endang, kita mengerti Ibu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Baik Pak, hanya itu saja jadi mungkin ada koordinasi Pak, ada koordinasi yang penting antara badan-badan Litbang Pertanian, perguruan tinggi dan BUMN karena BUMN Berdikari itu saya ikut merintis Pak. Tadinya kita karena ingin ada sapi-sapi unggulan kita di antaranya sapi dari Grati, sapi

dari Bali, tapikan Bapak inginnya impor saja. Nah, ini harus dirubah Pak, brand image impor itu Bapak harus hilangkan karena potensi lokal kita ini banyak sekali Pak. Kita negara agraris yang punya varietas unggulan banyak dan keanekaragaman hayati kita banyak.

Terima kasih Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Ibu Endang, saya jelaskan di sini jangankan antara BUMN dengan Kementerian antar Dirjen saja ego sektoralnya sangat-sangat besar sekali. Salah satu contoh Ibu Endang, tahun 2019 ada satu program yang dianggap tidak laik namanya ayam bekerja. Di Litbang ada sekian ratus miliar, di Dirjen Peternakan lebih besar lagi, semua hampir 1 triliun. Terus kenapa sih tidak jadi satu, karena apa? tadi itu ego sektoral.

Yang kedua, mengenai Alsintan di tanaman pangan ada, di PSP juga ada, kenapa tidak dijadikan satu? karena mohon maaf ini, teman-teman BUMN Pangan ini dianggapnya tidak sejajar dengan Kementerian Ibu Endang. Ini loh kendalanya hanya disini, mana mereka sejajar. Dulu Ibu Endang, periode yang lalu siapa pun Dirut yang datang kalau Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian cuma duduk di belakang sana melongok, betul tidak? Cuma duduk melongok ngeliatin dengerin ngomong, waktu pulang ya pulang. Sementara mereka juga banyak kerjaan Ibu Endang. Makanya sekarang ini kita panggil, masukan Ibu Endang sangat bagus, kita bedah, kita masukkan, semangat kita sama, kita semua punya jiwa nasionalis bagaimana BUMN ini bangkit kembali, kan gitu Ibu Endang.

Lanjutkan Bapak Budi, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Ketua yang sangat bijaksana.

Kita lanjut Bapak Yohanis Lema, silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih buat para Direktur Utama yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan perusahaan masing-masing. Rapat kita hari ini menampilkan BUMN yang ada disektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Dan ini penting sekali sebagai barisan penyangga dan juga katakanlah pengelola untuk mengembangkan sektor pertanian, kelautan dan perikanan. Tetapi kalau dari berbagai informasi dan referensi yang saya baca bisa kita simpulkan bahwa BUMN terutama di sektor pertanian itu berada pada zona *financial distress*.

Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, mengatakan bahwa kalau dia menggunakan *cz score indicator* BUMN-BUMN di sektor ini, itu tingkat kerentanannya itu menjurus kepada koleps atau kebangkrutan. Ini kira-kira posisi awal yang perlu saya tegaskan, ketika kita mau mengecek kesehatan seorang manusia tentu yang kita periksa ada darahnya, kalau kita ingin melihat sehat tidaknya suatu korporasi tentu yang harus kita lihat sejak awalnya itu adalah neraca-neraca ini. Maka tadi ketika tadi presentasi oleh Bapak-bapak, jujur secara pribadi yang saya ingin lihat itu adalah yang baru diberikan beberapa menit terakhir ini Pak. secara pribadi saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu dari Perindo, dalam presentasi Ibu walaupun disusul tadi saya melihat Ibu menampilkan neraca ini. Yang kedua, Ibu juga menampilkan apa yang menjadi persoalan dan kebutuhan dan apa yang diharapkan berupa dukungan politik dari Komisi IV DPR RI.

Saya kira yang kami butuhkan dari Komisi IV DPR RI ini kami harus tahu apa yang menjadi permasalahan Bapak dan Ibu sekalian. Ibarat pasien kalau dia pergi ke dokter, dokter akan bertanya apa keluhan anda. Saya kepala pusing, perut sakit dan yang lain-lain, dan kemudian dokter mendiagnosis sampai pada suatu kesimpulan, kamu demam *conclusion* dan kemudian ada terapinya. Saya berharap kedepannya kita, ketika rapat karena tadi ada kebutuhan untuk kita rapat memperdalam satu per satu korporasi. Saya berharap kita bisa menggunakan ilustrasi yang bisa saya katakan itu. persoalan saya adalah ini dan kenapa ini terjadi, akar persoalannya apa dan solusi yang diharapkan seperti apa, sehingga kita lebih efisien menggunakan waktu.

Untuk BUMN Pertanian, saya ingin bertanya mengapa sulit sekali melakukan ekspansi dan terkesan tidak kompetitif. Padahal ada perusahaan swasta misalnya, kita lihat mereka kok bisa begitu kompetitif begitu. Saya kasih contoh misalnya PT. Buyung Putera Sembada, apa sih yang membedakan swasta dan perusahaan milik negara ini BUMN. Buat BUMN tadi Sang Hyang Seri, saya baca tadi pagi itu saya tracking, saya kebetulan seorang wartawan Pak, saya tracking mohon maaf tidak ada berita yang positif tentang korporasi Bapak, semua berita yang mengerikan. Saya ingin tanya kalau dibuat lima penyebab utama, itu kira-kira akar persoalan di lima aspek ini apa saja Pak, saya ingin tahu itu. Dan kira-kira dalam bayangan Bapak, Bapak bicara tentang restrukturisasi ada tiga tadi, itu apa yang harusnya dilakukan terkait dengan lima. Kita perlu menemukan apa akar persoalan Pak.

Yang berikut Pimpinan saya Bapak Budi sudah mengatakan *core business* Bapak kan dibidang benih. Mohon maaf Pak, apa yang membuat Bapak begitu percaya diri di benih saja hari ini kita belum bisa melihat sesuatu yang membanggakan, terus tiba-tiba Bapak ingin melakukan ekspansi. Saya ingin tahu ini apa yang membuat kita yakin.

Yang berikutnya saya ingin menyambung yang dikatakan oleh Eyang Puteri tadi. Saya ingin katakan dunia ini bergerak karena pemikiran, karena gagasan, karena ide, dan itulah riset. Saya ingin tahu kira-kira kontribusi dari riset terhadap BUMN Bapak-bapak sekalian ini ada dimana, apakah ada kerja

sama misalnya dengan LIPI, misalnya dengan Litbang dan segala macam. Saya ingin tahu Pak, karena swasta pun sebenarnya mereka bisa berkembang maju karena kekuatan riset Pak.

Yang berikutnya soal garam, tadi ada yang menyebut Direktur PT. Garam disebut Bipolo, itu di kampung saya Pak, di Kabupaten Kupang, saya dari Dapil NTT. Ada lagi Nunkurus sebenarnya Pak, sebelahnya. Saya mendengar komitmen dari Presiden Joko Widodo untuk mengalokasikan dana mungkin ini di Kementerian nanti, sekian besarnya, jumlahnya triliunan kalau tidak salah untuk mengembangkan garam disana, di Kabupaten Kupang, Teluk Kupang. Karena melihat bahwa garam disini ini kualitasnya untuk Indonesia sangat baik Pak. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan secara teknokratis karena Bapak ahli, tadi saya mengikuti Bapak menjelaskan dari aspek teknisnya, apakah garam ini bisa kompetitif dengan garam impor yang berasal dari Australia ataukah kualitasnya masih dibawah. Kalau kualitasnya masih di bawah upaya-upaya teknokratis apa yang perlu dilakukan, teknologi-teknologi apa yang perlu diintegrasikan, dimanfaatkan, sehingga kemudian kualitas garam di Kabupaten Kupang ini bisa diberdayakan.

Yang berikutnya tadi saya mendengar soal pakan dari PT. Berdikari, pakan lebih konkrit disebut jagung Pak. Nah, ini nanti mungkin kita akan bicara dengan Kementerian Pak, lagi-lagi NTT Pak, kampung saya Pak. Jadi saya protes kalau orang bilang NTT itu nanti tuan tolong, NTT itu kaya raya, kami punya Laboan Bajo, Komodo, kami punya Kelimutu, kami punya Sumba, termasuk Timor yang kering itu sebenarnya sangat potensial untuk ditanam jagung dan kemudian kami bisa panen sapi Pak.

Problemnya adalah lahan disana dibiarkan tidur, manusianya tidur, kenapa? Ya tanah di NTT itu bukan air tanah atau tanah berbatu tapi batu bertanah dan itu tidak diolah, tidak dibuka. Nah, kalau lahan ini dibuka ekstensifikasi dengan menggunakan mekanisasi kita bisa tanah jagung yang merupakan pakan Bapak tadi.

Yang terakhir Pak, soal perikanan dan kelautan. Kemarin saya reses saya bertemu dengan nelayan di NTT, mereka katakan dan saya lihat sendiri NTT itu potensial di TCT Pak, Tuna, Cakalang dan Tongkol. Tetapi kata mereka "kami tidak punya pengawetan, tidak punya pabrik pengolahan untuk menambah nilai", dan kemudian ada masa tertentu tuna, cakalang dan tongkol ini dibuang begitu saja Pak. Nah, saya ingin tahu apakah BUMN Pertanian itu atau di KPP saya orang baru mohon maaf. Apakah ini juga bisa dipikir sebagai sebuah orientasi kedepan untuk bisa mengembangkan hal ini.

Demikian Bapak Budi beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya sampaikan mohon maaf.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Berikutnya Bapak Johan, Bapak Johan kita lewati dulu, Bapak Sutrisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan

Saya langsung saja menghemat waktu ini.

Pada yang hadir Bapak dan Ibu, sebagai penanggungjawab perusahaan, bahwa aktifitas usaha bisnis Ibu dan Bapak itu dihadapi oleh dua Komisi, Komisi IV DPR RI ruang lingkupnya adalah terkait bagaimana menjaga, meningkatkan produksi, bagaimana distribusi pangan. Kalau usaha sepenuhnya nanti di Komisi VI DPR RI. Oleh karena itu, harapan saya adalah bicara porsi pertanian bagaimana masalah bibit, bagaimana masalah pupuk, bagaimana teknologi, bagaimana pengolahan dan lain sebagainya.

Saya akan memulai saja dari Garam, Bapak Dirut Garam. Pertanyaan saya Pak, yang bikin neraca garam ini Bapak atau siapa ini, jangan panjang-panjang Bapak atau siapa. Oke, pertanyaan saya sebelum nanti ditanya lebih lanjut. Harga garam tahun kemarin berapa harga garam rakyat. Menurut Bapak stok yang harus disiapkan oleh Pemerintah agar aktifitas usaha tahun berikutnya bisa jalan, mesti berapa minimal Pak? 1,2.

Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan pada neraca garam, ini pada tahun 2017, 2018, ini Bapak mendapatkan untung yang luar biasa ini. Bapak untung 2017 181,6 juta dan tahun 2018 131 juta, 2019 hanya 12 juta. Padahal kalau kita perhatikan pada posisi produksi garam, yang diproduksi oleh rakyat pada tahun 2017 itu 1.111.000 dan tahun 2018 2.719.000, seimbang dengan impornya, impornya 2,7 juta. Tahun 2019 produksi garam rakyat 2,3 juta kemudian impornya 2,724. Hanya persoalannya adalah pada stok, stok akhir tahun ini 2017 hanya 325 ribu ton. Kemudian tahun 2018 1,3 juta ton, 2019 1,9 juta ton. Artinya apa? kenapa harga garam rakyat jatuh? harga garam rakyat tidak diserap oleh segmen industry, itu persoalannya.

Sedangkan kalau mengandalkan kebutuhan konsumen, masyarakat biasa ini sebagian kecil di bawah 500 ribu ton. Penggunaan garam kita adalah 3,5 itu untuk industry. Pengguna semuanya adalah 4,1 juta ton, persediaan kita 6 juta ton. Nah, pertanyaan saya adalah siapa yang berkewenangan mengatur itu semua Pak? yang berkewenangan mengatur itu semua adalah negara, adalah rakyat, adalah Pemerintah yang mendapatkan mandate dari rakyat. Kenapa negara tidak memerintahkan industry untuk menggunakan garam rakyat. Ini persoalannya, garam rakyat ditinggalkan tidak dimanfaatkan. Apakah industry tidak akan jalan, manakala Pemerintah memerintahkan agar prioritas memanfaatkan garam rakyat. Ini persoalan yang mendasar dari garam rakyat tidak disentuh pada tahun 2019 ini. 1,9 itu adalah produksi dari garam rakyat.

Oleh karena itu, rekomendasinya adalah agar kita merekomendasikan Pemerintah untuk bisa memprioritaskan untuk memanfaatkan garam rakyat,

dimanfaatkan baik untuk kepentingan konsumen masyarakat pada umumnya maupun juga untuk kepentingan industry. Karena tahun-tahun sebelumnya justru PT. Garam pun juga untungnya juga cukup memadai. Saya mengusulkan supaya konkrit riil rekomendasinya minimal dibuatkan Panja Pak, supaya jelas nantinya solusinya, Panja Garam.

Yang kedua ke PT. Sang Hyang Seri, PT. Sang Hyang Seri yang setahu saya, saya dari Majalengka, Dapil saya Subang itu. *Core business* Bapak adalah spesial bidang pembibitan. Saya ngitung gampang saja Pak, Bapak tidak kerja saja 3.200 hektar sawah apalagi 3 kali panen. Tempat saya itu, 1 hektar 1,5 ton Pak, sewanya dua kali panen sudah berapa, sudah 3 ton. Itu tidak bekerja Bapak sudah dapat duit 45 miliar dari sewa lahan itu. Apalagi kalau dijualnya untuk pembibitan itu bisa berapa kali lipat daripada harga biasa.

Saya menangkap semuanya yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu semuanya, orientasinya disampaikan kepada Komisi IV DPR RI berharap untuk mendapatkan bantuan keuangan dari negara, semuanya. Karena sebut saja neracanya juga rugi ini, neraca Pertani ini kalau tidak menilai kembali asetnya tidak bisa bayar ini. Supaya bisa seolah-olah ada cadanan dana bisa membayar dinilai kembali itu semua aset-aset.

Rajawali Nusantara juga, pendapatannya sebagian besar bukan dari main bisnis, bukan dari usahanya, dari pendapatan lainnya. Artinya apa? yang Bapak dan Ibu mesti lakukan adalah bagaimana melakukan satu inventarisasi proses bisnis Bapak, konsentrasi pada *core business* Bapak. Karena sekali kita nanti akan ada gangguan ini akan terganggu semuanya, padahal dihadirkan kesini orientasinya adalah bagaimana mendukung program Pemerintah bahwa negara ini supaya bisa swasembada pangan.

Orientasi kita adalah Bapak dihadirkan lebih awal disini untuk diperjuangkan manakala ada usulan, manakala ada program yang memang sangat bagus untuk dtindaklanjuti untuk dibicarakan dengan mitra kerja kita.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bapak, sudah 3 menit.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Kalau 3 menit Pak, sudah sekian banyak ya sudah main sandiwara saja kita.

KETUA RAPAT:

Bukan sandiwara, kan saya sudah jelaskan kepada Bapak, ini Tatibnya 3 menit. Saya yang memimpin disini Pak, kalau Bapak seolah-olah sandiwara kan sama saja Bapak melecehkan saya.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Bukan, kita sudah dua kali rapat ini. Terus terang saja saya orang baru, apa yang kita hasilkan selama akita Rapat Kerja ini, maksud saya inikan juga 6 pengusaha baru dua perusahaan. Pak Ketua, silakan mau kemana arahnya saya stop.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih.

Selanjutnya Mbak Lulu silakan.

F-PKS (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pertanyaan saya tidak banyak tapi mungkin lebih kepada PT Sang Hyang Seri. PT. Sang Hyang Seri inikan dalam salah satu pertemuan Menteri Keuangan sebenarnya di Komisi lain, tetapi disitu disebutkan bahwa satu diantara BUMN yang juga punya potensi kebangkrutan dan itu sangat besar, serius, itukan BUMN di bidang pertanian yang antara lain disebut adalah PT Sang Hyang Seri. Kalau kemudian saya cek juga melalui googling ternyata dari tahun-tahun kebelakang masalah di Sang Hyang Seri ini ternyata juga tidak pernah bergeser dari isu apakah korupsi, kemudian juga ketidak mampuan untuk memenuhi pembenihan dan seterusnya. Di sisi yang lain justru petani kita yang mencoba ingin mandiri dari sisi penyediaan benih justru sebagian ada yang mengalami kriminalisasi.

Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana sih kita mau membedakan antara *core business* Sang Hyang Seri dengan Pertani. Ada juga sih sebagian yang kemudian mengusulkan kenapa sih ini tidak digabungkan kalau dua-duanya ini sudah mengalami situasi yang *distressing* sangat besar.

Saya kira kalau memang sudah dirumuskan ya berarti kita akan satu rumusan disitu Ketua. Tetapi sebenarnya yang ingin kita dalam mungkin adalah tadi juga kita sama-sama baca ada pendapatan lain-lain juga dari RNI. Sebenarnya dari lain-lain itu apa gitu, jadi *core business* yang selain selama ini yang disampaikan itu apakah ada bisnis-bisnis lain yang dimasukin oleh BUMN kita ini *nuwun sewu* kita tidak ingin tiba-tiba nanti kita akan menemukan kasus Jiwasraya diruangan ini dan itu bisa sangat mungkin terjadi. Karena apa? Karena pengetahuan kita yang sangat detail tentang *core business* ini tidak ada.

KETUA RAPAT:

Ijin Mbak Lulu.

Bapak para Dirut, tolong pertanyaan Anggota ditulis, karena nanti harus dijawab. Apabila Anggota merasa jawabannya belum pas nanti beliau-beliau ini bertanya kembali.

Mbak Lulu lanjutkan.

F-PKS (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Saya kira itu sih mudah-mudahan pointnya ditangkap Bapak, yang paling pokok poinnya karena memang kita sudah mendengar langsung dari Menteri Keuangan dan juga Menteri BUMN bahwa yang dibidik itu salah satunya adalah Menteri yang kebetulan menjadi bagian daripada mitra kita, maka sebaiknya ini yang bisa diungkapkan disini. Jangan sampai kita diberitahu orang-orang lain, inikan satu hal yang sangat kita sayangkan, lebih-lebih kalau kita tahu dari awal persoalan yang dialami secara internal kan pastinya kita juga bisa memberikan solusi. Jadi bukan dalam kondisi sudah sakit parah tidak bisa tolong dan paling terakhir kan amputasi. Nah, inikan solusi yang paling terakhir yang sebenarnya sama-sama tidak diinginkan, tetapi apa hendak dikata jika memang itu semua harus terjadi. Jadi saya kira itu Bapak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Lulu.

Selanjutnya Kanjeng.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua, teman-teman para Dirut yang saya hormati dan Anggota Dewan.

Setelah saya mendengarkan penjelasan dari para Dirut, di Komisi IV DPR RI kita sudah Rapat Dengar Pendapat rapat dengan mitra BUMN, satu pun tidak ada yang untung. Dari mulai PTP I sampai XIV ruginya 40 triliun lebih, BUMN Kehutanan, ini BUMN Pertanian dan Kelautan. Mesti ada yang salah bahkan teman-teman sekarang memegang jabatan seperti obat nyamuk pindah sana, pindah sini, muter-muter mati di tengah nanti akhirnya.

Nah, saran saya apa yang harus dilakukan kedepan yang harus bisa karena pengalaman saya sebagai birokrat memegang ada 5 komisariss, komisariss utama semakin kesini bukan semakin baik tapi semakin jelek. Nah, ini mungkin teman-teman perlu lah, tadi disampaikan oleh Ketua apa yang harus kok teman-teman menyampaikan resepnya apa sih yang harus kita perbaiki. Saya lihat bahkan diantara kalian ini saya dengar ada yang tidak gajian, inikan menyedihkan itu kerja gajinya masih tertunda.

Dan saya fokus ini Bapak dari Dirut Garam. Saya mau bertanya sekarang ini tadi disampaikan oleh kordinator kita kerugian ataupun impor barang dari luar hampir 7,9 juta US Dolar atau berapa tadi itu luar biasa. Dan yang punya kita lautnya lebar saja garam masih impor. Saya baru-baru ini pulang ke Kebumen, Kebumen itu punya laut terpanjang di Jawa Tengah, tapi satu-satunya kabupaten termiskin di Jawa Tengah dari 34 kabupaten. Nah, saya agak terkejut di belakang rumah saya ada bangun garam dengan pola tunnel Pak, ini gambar-gambarnya bagus garamnya. Garamnya putih karena tunnelnya ini ukurannya 20x10 ini apakah bisa dilanjutkan tidak ini. Kadar NHCL-nya 96%, tunnelnya ukurannya 20 meter, 80 meter persegi sehingga dari 80 meter persegi itu dalam 15 hari tanpa perlakuan apa-apa, penguatan itu menghasilkan 1,2 ton per tunnel. Kalau satu hektar itu 10 ribu meter persegi, 8000 meter persegi saja untuk tunnel ada 100 tunnel Pak. Kalau 100 tunnel kali 1,2 ton maka 120 ton 15 hari per tahun, satu tahun 10 bulan kali 2 jadi 240 ton per hektar per tahun. Ini binaan dari kelautan.

Nah, kalau membutuhkan 2,5 juta ton ini hanya membutuhkan 10 ribu hektar. Kalau pantai selatan saya kira Pak, dan NHCL-nya itu 96 dan sekarang diambil oleh Kimia Farma Pak. Artinya apa? berarti kita bisa. Tolong Pak, kalau memang ini terus saya akan teruskan sebagai usaha pribadi, keluarga, teman-teman di Kebumen, karena Kebumen itu miskin, nganggur Pak. Ini tidak ada di kasih perlakuan apa-apa Pak, saya kaget kemarin pulang loh kok begini. Airnya dialirkan dari air laut, diendapkan 15 hari langsung 1,2 ton. Lah, kalau ini seperti ini mudah-mudahan Kebumen yang tadinya termiskin bisa terbalik Pak. Dan masyarakat tidak perlu teknologi seperti yang disampaikan tadi. Ini tolong Pak, kalau perlu kita sama-sama melihat kalau memang itu bisa dikembangkan dan harganya, jangan sampai nanti kami kembangkan besar-besaran harganya tidak seimbang. Dan air laut ini jernih Pak, kita alirkan dari pantai 1 kilo pakai pipa. Jadi ini di daratan bukan di pasir dan sangat sederhana sekali.

Jadi teman-teman Komisi mungkin dari airport baru itu hanya 1 jam ke Kebumen sekarang. Bisa kita kunjungan lihat ini ya, karena kemarin Bapak Dirjen dari KKP sudah kesana. Ini harapan saya apa Pak, mohon bisa membantu saudara-saudara saya yang miskin Pak. Masa termiskin nomor satu dari 35 kabupaten di Jawa Tengah, Kebumen kampung saya.

Yang lain saya kira saya tidak akan tanya, tadi teman-teman sudah tanya, apa resep kita untuk bisa bangkit, itu pertanyaan saya. Kalau ngeluh tadi iya Pak, yang harus begini, harus ditambahin modal atau divestasi jual aset dan sebagainya itu hal yang biasalah. Tapi apa kira-kiranya karena saya tahu Bapak itu ketergantungan ada berapa kementerian, pertanian, perdagangan, perindustrian, BUMN. Jadi kadang-kadang bingung, Bapak ditanya sekarang ini besok pindah lagi, sudah ditanya lagi, akhirnya numpuk-numpuk menjawab pertanyaan bukan menyelesaikan masalah.

Saya kira cukup Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kanjeng cukup? Terima kasih.

Jadi Bapak dan Ibu, nanti kalau masalah kenapa ada garam impor nanti kita tanyakan kepada pakarnya. Karena dulu yang mengeluarkan ijin impor garam itu adalah beliau, nanti terakhir beliau saya kasih ngomong. Mohon maaf Pak.

Selanjutnya Bapak Bambang Purwanto.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan rekan-rekan Anggota serta para Dirut BUMN.

Saya sependapat dengan Ibu Endang, bahwa Indonesia ini sangat kaya raya, luar biasa baik laut dan daratnya. Teknologi ini juga sudah banyak yang pintar-pintar, kemudian kelembagaan ada, petani juga ada. Tapi kita sangat tergantung impor terus, padahal bisa kita produksi dalam negeri, ini pasti ada yang salah. Saya menyoroti hal ini tentu terkait dengan komitmen Pemerintah ini harus kuat. Kemudian juga dari BUMN terutama SDM Pengelola BUMN, kemudian juga petaninya juga perlu di-*up grade* termasuk bagaimana mereka peralatan yang mereka miliki.

Seandainya ini dilakukan duduk bersama saya yakin Indonesia bisa swasembada. Yang penting adalah komitmennya dulu, kalau saya mendengar tadi dari paparan teman-teman sepertinya setengah hati juga ketika tidak bisa memenuhi kuota kemudian lemah. Ini harusnya kita dari Komisi IV DPR RI memberikan dukungan dan bisa memanggil juga para petaninya apa persoalan disana, kemudian sinkron tidak dengan teman-teman di BUMN ini. Seperti tadi yang disampaikan garam, ini juga sinkron antara petani dengan BUMN dari PT. Garam.

Kalau kita bisa duduk bareng Ketua, minimal bergantian kita panggil baru duduk bareng bisa membuat satu kebijakan, karena regulasi ada di kita juga. Seandainya ini bisa dilakukan *insya Allah* Indonesia pasti akan bisa swasemda.

Terima kasih Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih.

Selanjutnya Bapak Slamet bebek, silakan.

Oh, Slamet Ariyadi namanya, mohon maaf salah sebut saya.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Beliau mempromosikan bebek Madura.

Terima kasih.

Yang pertama, kepada PT Garam ini dari tadi teman-teman berbicara tentang garam. Dan saya berasal dari putera garam, asli pulau garam Madura. Berbicara tentang garam hari ini menjadi isu sentral Ketua, ini yang perlu saya sampaikan karena Madura bagian dari Indonesia, saya ingin berbicara kemarin setelah saya reses banyak keluhan dari para petambak garam yang mana berdasarkan data dari dinas kelautan yang ada di 4 kabupaten di Madura ini ada 454 ribu ton yang belum terserap pada akhir 2019. Dengan kluster Sumenep 105 ton, Pemekasan 44 ribu ton dan Sampang, kebetulan saya asli Sampang mohon dikoreksi untuk PT Garam kalau ini salah tolong disalahkan. Sampang ada 305 ribu ton yang belum terserap, ini data dari Dinas Kelautan dari berbagai kabupaten. Sedangkan punya PT Garam tersendiri yang tidak terserap ada 400 ribu ton, betul Bapak Dirut? Sedangkan data dari Kementerian Kelautan, stok pada akhir tahun 2019 ini ada 1,9 juta ton yang tidak terserap, skala nasional.

Pertanyaan saya, sampai kapan Indonesia, sampai kapan negara tercinta ini akan selalu melakukan atau melaksanakan impor garam. Yang saya inginkan kita dari Komisi IV DPR RI harus mencari solusi. Kalau boleh saya usulkan kepada Pimpinan yang terhormat Bapak Sudin sebagai orang tua saya di Komisi IV DPR RI, kita harus betul-betul serius untuk menangani terkait masalah garam yang hari ini menjadi isu nasional. Apalagi dari Kementerian Perekonomian sudah menetapkan 2,9 juta ton untuk melaksanakan impor pada tahun 2020.

Jadi kalau boleh saya mengusulkan dari teman-teman mohon disepekat, kalau tidak sepakat harus sepakat. Kita harus melaksanakan ataupun melakukan, mengadakan Pansus Garam. Jadi kita harus lebih serius karena ini yang menjadi korban adalah masyarakat tambak garam. Kalau hari ini kita hanya berleha-leha, kita hanya rapat, rapat dan rapat terus kapan kita akan memperjuangkan tentang penambak garam. Sedangkan dari pertanyaan dari Menteri Kelautan kemarin menginstruksikan saya lansir dari media Detik.com menginstruksikan untuk tidak mempermasalahkan, untuk tidak memperdebatkan masalah impor garam ini. Akan tetapi kami sebagai keterwakilan khususnya rakyat Madura yang hari ini populasinya petambak garam yang juga sangat besar kami harus memperjuangkan ini Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Cukup.

Yang kedua, untuk Perinus (Perikanan Nusantara) Ketua. Terkait dengan Perikanan Nusantara, tolong karena tadi juga ada beberapa ulasan tentang Sumenep, karena Sumenep ini bagian dari Dapil kami Ketua. Kami kemarin melakukan reses yang disayangkan itu sumber daya alam perikanan yang ada di Sumenep hari ini yang mati secara mayoritas bukan orang Sumenep apalagi bukan Madura Ketua. Terus terang kemarin sangat disayangkan ketika kapal-kapal dari luar Madura menjajah ke Kepulauan Sumenep dan sangat merugikan bagi para nelayan-nelayan di Sumenep. Ini saya pertanyakan kepada Perikanan Nusantara seperti apa kinerja setelah ini dalam mampu untuk membantu masyarakat nelayan di Sumenep.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi, siapa tadi namanya? Slamet Ariyadi.

Ini tidak perlu dibentuk Pansus, jadi inikan kewenangannya di Menko. Jadi nanti kita undang dari Menko yang untuk industri itu rekomendasinya dari Kementerian Perindustrian. Bukan begitu Bapak Panggah? DKKP, bukan Perindustrian lagi. Nanti kita buat rapat gabungan, karena ini juga menyangkut Kementerian Perdagangan perihal SPI-nya. Tahu SPI apa? SPI itu Surat Persetujuan Impor. Nanti kita panggil rapat gabungan, bagaimana supaya jangan ada garam impor pada tahun 2020. Jangan galak-galak bikin Pansus Pak.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Gini Ketua, entah Pansus mau diselenggarakan atau tidak yang terpenting hari ini kita ada keseriusan. Dan yang terpenting Ketua sudah merespon positif bagaimana tentang garam yang hari ini mencuat betul-betul diselesaikan, kalau perlu stop impor Ketua.

KETUA RAPAT:

Masalah stop impor itu bukan kebijakan kita, maka saya tadi saya tawarkan solusi kita panggil Kementerian Ekonomi dan Menko Ekuin, panggil KPP kalau perlu panggil Perindustrian, kita duduk bersama kita buat rekomendasi. Selama stok garam lokal ada jangan diimpor.

Pak Suhardi Duka, silakan Pak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua, Anggota Dewan yang terhormat,
Dan saudara-saudara para Dirut yang saya banggakan.

Pada prinsipnya tadi selain saya mendapatkan bahan dari Bapak-bapak, saya juga mencatat beberapa point-point yang penting dari persoalan yang Bapak-bapak dan Ibu hadapi. Pada prinsipnya adalah karena ini adalah lintas Komisi, mungkin Komisi VI DPR RI untuk kepentingan keuangan negara. Kami Komisi IV DPR RI untuk kepentingan petani dan nelayan, karena ini Komisi Petani dan Nelayan dan kami juga mewakili masyarakat itu. Yang saat ini juga petani kita belum sejahtera akibat berbagai hal termasuk kalau harga komoditas naik, apakah itu beras, apakah itu pangan lainnya seperti ikan, tiba-tiba inflasi. Tekan lagi harga, supaya jangan inflasi, petani lagi di korbankan.

Pulsa naik aman-aman saja, Telkomsel yang enak, Indosat yang enak, tidak ditekan harganya dan lain sebagainya, selalu petani jadi korban. Fakta dilapangan bahwa saat ini petani kita kekurangan bibit. Yang kedua, bibit juga tidak berkualitas. Pertama, kalau sudah kurang apa yang bisa ditanam, tidak bisa ditanam. Ada bibit ditanam diharapkan bisa jagung 8 ton atau 10 ton, ternyata bibitnya asalan akhirnya hanya 2 ton. Kesejahteraan apa yang mau didapatkan oleh petani dengan kondisi yang seperti itu. Katakanlah seperti bibit jagung merk Bima itu di daerah saya tidak mau ditanam oleh petani, karena asalan. Apakah kontraktirnya yang salah karena membeli saja kemasan kemudian dikasih masuk bibit asalan atau sembarang atau memang bibitnya yang salah, kita tidak tahu. Karena bisa saja pabriknya bagus, bibitnya bagus, tapi kontraktornya yang nakal. Dia hanya beli kemasan baru diambil jagung sembarang dikasih masuk, maka itu adalah jagung untuk kandang bukan untuk bibit. Ini yang terjadi di daerah saya terhadap jagung, ada yang panennya bagus, ada yang bersebelahan tidak bagus karena persoalan bibit.

Oleh karena itu, maka pandangan saya dan saya duduk disini untuk kepentingan bibit pasti saya support mati-matian, apakah dalam bentuk kebijakan atautkah nanti dalam bentuk keuangan, untuk kepentingan bibit, karena ini untuk kepentingan petani. Untuk kepentingan bisnis saudara itu menjadi hal yang berbeda, itu pandangan saya.

Jadi saya minta kepada Bapak-bapak dan saudara-saudara pertajam untuk kepentingan pengadaan pengadaan dan peningkatan kualitas bibit apa yang anda butuhkan dari Komisi IV DPR RI pasti kami support, karena itu untuk kepentingan petani dan nelayan.

Khusus untuk perikanan apakah perikanan Indonesia atau perikanan nusantara, saya ajak Bapak masuk di daerah saya. Daerah saya potensi ikannya itu 500 ribu ton satu bulan. Tapi yang baru didapat tarik oleh nelayan baru 50 ribu ton. Jadi potensinya sangat masih besar.

KETUA RAPAT:

Pak Suhardi Duka, saya tanya itu ikanya umumnya apa, lautnya dalam atau tidak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Dalam.

KETUA RAPAT:

Laut dalam itu kendalanya adalah pembatasan GT Kapal oleh Ibu Menteri yang lalu.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Kan sudah berganti Ibunya kita ganti kebijakannya pasti.

KETUA RAPAT:

Makanya tadi saya tadi tanyakan dulu, kalau Cuma 100 GT atau 150 GT rasanya kalau laut dalam sangat susah, sama seperti dicanangkan di Laut Natuna. Makanya tadi saya tanyakan kalau lautnya dalam pasti butuh kapalnya lebih besar.

Lanjut Pak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Terima kasih.

Jadi saya berada di Alki II dan saya juga mengajak kepada Perikanan Nusantara atau Perikanan Indonesia untuk bangun pelabuhan I di Sulawesi Barat. Kita bangun pelabuhannya lengkap yang Bapak atau Ibu kelola ini untuk menunjang Ibu Kota Negara yang pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Provinsi kami yang paling bersebrangan. Dengan demikian untuk menunjang Ibu Kota disana nanti perlu pelabuhan ikan yang lengkap di kabupaten Mamuju atau Sulawesi Barat. Kita buat proposalnya Ibu, kita dukung, kemudian kita wujudkan satu pelabuhan perikanan yang saat ini tidak ada di Sulawesi Barat. Tentu Ketua juga akan mendukung saya kalau ini yang ingin kita wujudkan di Sulawesi Barat.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak Suhardi Duka, saya rasa kalau dari Perinus atau Perindo tidak bisa mungkin bangun. Jadi Bapak silakan bicara dengan Bupati, siapkan DID-nya kita mintakan dana ABPN dari Kementerian KKP. Setuju Pak? Cuma harus ada DID-nya Pak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Setuju, kalau hanya itu saya ajak teman-teman dari Perikanan Indonesia bisa membantu saya untuk memberikan kajian akademiknya.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Bapak Slamet yang bukan bebek.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat dan juga mitra kerja.

Yang pertama, kembali mengusulkan yang tadi berkaca tadi disampaikan oleh Bapak Sutrisno bahwa kita ingin ada niat baik untuk kemudian ikut membedah memikirkan dan apa sih kemudian kita bisa bantu di Komisi IV DPR RI. Ada 6 perusahaan dihadirkan Pak Sutrisno baru menyampaikan tiga, sisa tiga, waktunya sudah habis dan tidak mungkin kita sampai detail Pimpinan. Sehingga usulan kami tetap kepada yang awal tadi, kita minta ada forum khusus dipanggil satu per satu kita beda. Satu contoh tadi saya ngobrol kecil dengan Bapak Dirut dari Berdikari, hanya berbicara sub sektor bisnisnya tentang unggas itu tidak mungkin kita dalam waktu dekat kemudian kita akan apalagi saran kita datar-datar saja untuk membedah.

Ketika ketika berbicara tentang perusahaan BUMN ini untungnya tentu kita ujung akhir adalah disamping memang pelayanan sebagai BUMN hadir untuk rakyat dalam bentuk pelayanan tapi kita juga akan bicara tentang untung rugi. Ketika kemudian kita bicara tentang untung rugi berarti kita kan harus membedah. Neraca ini tidak kita bicara baru diberikan sekarang 6 perusahaan satu kali waktu, sampai jam 22.00 WIB kita juga tidak selesai dari sisi kedalaman kita menganalisa, sehingga konkrit Pimpinan usul saya untuk kemudian dialokasikan waktu dari Komisi IV DPR RI dipanggil satu per satu dari BUMN ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya ini meraba-raba apakah ini ada kaitannya tumpang tindih impor terkait dengan kebutuhan pangan kita. Silang sengkabut dan lain-lain ini, data dan lain itu bisa jadi ujungnya karena amanat Undang-Undang Pangan terbentuknya badan pangan belum terbentuk Pimpinan, sehingga nampaknya Komisi IV DPR RI harus serius untuk kemudian menyampaikan kepada Pemerintah badan pangan harus segera terealisasikan, karena kalau tidak semua sektor tidak terkait dengan impor ini, jadi tidak ada koordinasi satu atap, sehingga amanah Undang-Undang ini nampaknya Komisi IV DPR RI

mempunyai kewajiban untuk terus mendesak, mendorong untuk kemudian sekedar direalisasikan.

Itu saja Pimpinan, usulan dari saya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak Slamet, maaf saya menjelaskan, seharusnya ini dibagi dua sesi, tapi karena hari ini tidak ada Paripurna, aturannya ada Paripurna pada jam 15.00 WIB, maka digabung, tadinya kan dipisah. Yang pertanian pagi, yang Perinus dan Perindo itu sore. Tapi karena tidak ada Paripurna maka digabung. Usulan Pak Slamet tadi perihal masalah dipanggil satu per satu tidak masalah kita panggil lagi. Nanti setelah inipun Pak Slamet mau bertanya lagi silakan, karena waktunya *insya allah* paling cepat jam 24.00 WIB, dengan ketentuan Anggota jangan pada pulang.

Mengenai badan pangan nasional, Undang-Undangnya sudah ada, bahkan kami sudah mendesak Pemerintah untuk segera dibentuk. Tetapi Pemerintah mungkin masih gamang yang mau ditunjuk siapa, kalau Bulog ditunjuk, Bulog sendiri rugi Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan, mohon maaf.

Paling tidak kita harus bersuara di Komisi IV DPR RI, kita tidak dalam posisi Pemerintah, mau Pemerintah menunjuk siapa yang kita penting awasi dan kita dorong realisasi Undang-Undang, itu yang pertama. Yang kedua, kita jadi Dewan ini masih *insya allah* sekitar 4 tahun lebih Pimpinan, sehingga tidak perlu sampai jam 24.00 WIB tidak apa-apa, yang penting kita tuntaskan ini. Ini masalah kita bersama, sehingga fokusnya kita juga kurang. Anggap kita sama-sama ada Perindo disatukan Perinus pada satu sesi kita juga tidak akan fokus.

Usulan tadi kalau memang diterima dan kira rapat juga *insya allah*, masih 4 tahun lagi kalau memang masih ada umur, sehingga kita agendakan di jadwal-jadwal berikutnya. Seperti itu saja Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Panggah, Pak Panggah saya ingatkan mengenai importasi peragaraman itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 yang bunyinya rekomendarinya dari Kementerian Perindustrian. Mungkin saya salah mohon bantu Bapak jelaskan.

Terima kasih.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Tahun berapa?

KETUA RAPAT:

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan, rekan-rekan Direksi dan rekan-rekan dari Komisi IV DPR RI.

Memang betul bahwa saya luruskan dulu memang dulu rekomendasi itu dari Kementerian Perindustrian tetapi yang mengeluarkan ijin adalah Perdagangan. Memang belakangan ini kemudian dipindahkan ke KKP mengenai rekomendasi. Oleh karena itu, sebenarnya rekomendasi ini juga angka-angka nanti juga berdasarkan rapat koordinasi Kementerian Perekonomian yang dihadiri oleh Perindustrian, KKP, kemudian Kemenko itu sendiri. Sehingga kami sangat setuju tadi ide dari Pimpinan, untuk memanggil secara khusus stake holder sekarang ini, yaitu Kemenko kemudian KKP, perindustrian, kemudian kalau perlu asosiasi industry makanan dan minuman, PT. Garam sudah pasti dan juga asosiasi garam. Itu mungkin diundang secara khusus untuk membedah secara mendalam isu-isu yang terkait dengan garam ini.

Saya melihat masih banyak pihak yang masih salah mengerti soal isu garam ini. Secara umum memang terlalu menyederhanakan persoalan, artinya selalu isunya bahwa kita negara yang pantainya terpanjang kedua setelah Kanada barangkali, yaitu 80 ribu kilo meter, lautnya luas kenapa masih impor garam. Itu selalu pengertian secara umum yang mungkin tidak mengerti masyarakat ini. Oleh karena itu, setuju sekali Bapak Pimpinan untuk kita secara khusus membedah ini, saya akan bicara angka-angka tetapi sebelum itu barangkali kami ingin mengingatkan kembali apa bedanya swasta dengan BUMN. Ini yang kadang-kadang suka digebah uyah saja, ini perusahaan yang diperlakukan sama, padahal ide dasar adanya BUMN ini adalah bedanya dengan swasta adalah BUMN mengemban misi pengembangan atau *agent of development*. Saya kira ini masih belum berubah sejak dulu sampai jaman reformasi ini, ini yang saya kira yang makin lama kok saya lihat semakin kabur.

Oleh karena itu, saya kira ini perlu ditegakkan lagi prinsip ini, prinsip BUMN ini sehingga memang karena mengemban misi pengembangan tentu harus mendapatkan dukungan yang memadai dari negara. Ini yang saya ngurus BUMN sudah puluhan tahun ya, ini persoalannya semakin kabur ini,

apalagi kita dulu sama-sama di Bulog, semakin tidak jelas kita ini ditugasi apa. Oleh karena itu, saya kira ini perlu penegasan sekali lagi kalau perlu disuarakan ini oleh Komisi IV DPR RI untuk menegaskan lagi bahwa BUMN itu ada keberpihakan karena ada misi pengembangan atau *agent of development*.

Nah, kalau saya lihat ini dari jenis usahanya yang tadi dipaparkan ini semakin merambah kemana-mana. Seperti RNI misalnya ya teh, ya farmasi dan Alkes, kemudian ada sawit, ada tebu, perdagangan dan lain-lain. Ini sebenarnya kompetensi intinya apa yang ingin dibangun sehingga kita ngerti keberpihakannya seperti apa, bantuannya seperti apa terkait dengan misi pengembangan yang dibebankan.

Demikian juga saya kira dari Bapak Dirut Pertani tadi, ada pembenihan ada perberasan, kemudian ada pupuk dan pestisida, ada sarana pertanian, penggilingan, pengeringan dan lain-lain. Nah, ini ada *overlap* dengan BULOG juga, padahal BULOG perlu ini masalah pengeringan kita tahu bahas panjang lebar ini masalah sarana dan prasarana di BULOG yang sampai saat ini belum terealisasi. Itu juga setahu saya Pertani itu dulu berangkat dari pestisida yang paling *core business*-nya itu jaman Bimas dulu ya, jaman subsidi pestisida kan Pertani ini yang menjadi penyalur utama. Kenapa tidak kembali kesitu saja dibangun kompetensi intinya.

Saya kira juga tadi di Berdikari, ini ada ngurusin mabel, ada Berdikari Mebel Nusantara, ada Berdikari Logistik Indonesia, ada Berdikari United Life Stock. Nah, ini mau dipilih mana ini, meskipun juga pemanfaatan aset seperti tadi saya dengan Bapak Dirut Sang Hyang Seri, kita ini sebenarnya punya aset-aset yang bisa dioptimalkan selain kompetensi inti adalah soal pembenihan. Nah, ini juga tidak masalah hal seperti itu tapi jelas kompetensinya, perbenihan tadi juga disampaikan rekan-rekan. Perbenihan saya kita masih carut-marut tidak karuan. Nah, kenapa ini tidak kemudian didalami dan ditekuni, tentu saja ini mengandung misi tadi bahwa perbenihan ini merupakan faktor yang penting selain yang pupuk dan lain-lain terhadap keberhasilan penen. Oleh karena itu, perbenihan ini menjadi sesuatu yang penting untuk dibela-belain kasarnya begitu, kalau perlu anggaran Kementerian Pertanian sebagian masuk kesana.

Ini kalau soal garam ini sebenarnya saya akan bicara banyak Pak, supaya lebih dimengerti. Jadi garam ini memang tadi sudah disebutkan ya, kita tidak mungkin untuk bisa swasembada itu jangan mengharaplah. Swasembada itu jelas-jelas tidak realistis, karena demikian konsumsinya itu. Jadi untuk CAP Plan itu sekitar 2,2 juta ini angka dari yang ada ya 2019. Kemudian ada Aneka Pangan itu sekitar 591 atau sekitar 600 ribu ton. Kemudian konsumsi itu sekitar 1,3 atau 1,4 macam-macam ada rumah tangga, komersial, pengasinan dan lain-lain, sehingga total pangan dan konsumsi itu sekitar 1,9 atau 2 juta.

Kalau kita produksinya itu 2 sampai 2,7 inipun tidak stabil Pak. Tahun 2010 itu hanya 30 ribu ton, saya tahu itu. Nah, ini naik turun tergantung daripada musim. Nah, ini bagaimana mengatasi fluktuasi ini, tadi teknologi

sudah ada dikembangkan KKP pakai ditutup gitu, itu saya kira bisa. teknologinya tidak terlalu sulit ya, yang penting produksi ini stabil, baik quantity-nya maupun kualitasnya, karena faktanya sekarang itu yang standar K1 itu tidak lebih dari 1 juta dari 2 koma, katakanlah di 2 juta.

KETUA RAPAT:

Pak Panggah, pengertian K1 itu apa, supaya kita semua tahu.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

K1 itu yang kotorannya itu memenuhi standar dan kadar NACL-nya itu kalau tidak salah 95% keatas, hampir 94,7% itu disebut K1. Itu dari 2 juta ton atau 2,7 ton fluktuatif ya, itu kita tidak lebih dari 900 ribu produksi itu. Nah, kalau industry makanan dan minuman dikasih yang K2 dan K3 ya kasihan tidak akan laku makanan, cepat busuk, cepat berjamur dan lain-lain.

Oleh karena itu, saya kira kita fokuskan saja pada kemampuan kita produksi untuk aneka pangan dan konsumsi yang sekarang 900 itu bisa ditingkatkan menjadi sekitar 2 juta. Teknologinya bisa kita kembangkan kok, ini saja ini jangan punya cita-cita ingin CAP Plan juga mau diswasembada itu hanya pernyataan orang-orang politik barangkali bisa. Tapi untuk kenyataannya ini tidak bisa ini.

Jadi saya kira ini supaya clear disini tidak ada pengertian yang simpang siur kita tugaskan. Dulu PT. Garam kita kasih tugas Pak, kita kasih monopoli Pak, tapi menjualnya seenaknya terus terang saja, sehingga dari industri makanan protes ya kita lepas lagi, supaya ini satu tangan maksudnya. Itu tahun berapa itu pernah kita kasih monopoli tapi jualnya itu seenaknya Pak, akhirnya industry makanan protes, akhirnya kesempatan itu jadi hilang lagi. Nah, ini tanggungjawab seperti ini juga saya kira kalau kita ada pembelaan, ya pembelaan itu harus dipertanggungjawabkan dengan penuh, sehingga memang program-program yang kita resahkan selama ini bisa secara realistis bisa kita wujudkan.

Saya kira demikian Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Panggah atas pencerahannya.

Bapak dan Ibu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, rekomendasi impor garam itu dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Waktu itu jamannya Ibu Susi distop semua tidak ada rekomendasi. Akibatnya apa? terjadi gejolak, pabrik kaca, pabrik paralon, pabrik pipa hampir semuanya tidak produksi, karena mereka membutuhkan garam impor. Akhirnya Presiden mengambil kebijakan yang tadi saya mengatakan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 harus melalui rekomendasi Kementerian Perdagangan dan dikeluarkan ijin impornya oleh Kementerian Perdagangan.

Ini untuk pencerahan kita semua, Undang-Undangnya sudah mengatakan tidak boleh impor, tetapi waktu tidak impor terjadi pabriknya tutup.

Selanjutnya Bapak Khalid silakan.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang kami muliakan.

Sebenarnya tadi sudah diawal sudah ada interupsi, tapi tidak apa-apa saya memperkuat yang saya sampaikan waktu interupsi saja. Bahwa sebagaimana kita simak bersama perkembangan dan penjelasan yang diberikan oleh beberapa BUMN kita di bidang pertanian dan perikanan terlampau banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akhirnya tadi waktu interupsi saya meminta agar kita bisa melakukan pertemuan secara khusus, agar kita bisa membahas secara khusus.

Ijinkan pada kesempatan ini kembali saya menguatkan, kami harapkan kepada Pimpinan agar misalnya seperti Sang Hyang Seri bila perlu dipanggil dulu oleh Pimpinan dan Kapoksi, menginventarisir semua permasalahan, kemudian kita bahas kedalam rapat internal kita sehingga kita jelas arah tujuannya kita kemana, sehingga rapat daripada Komisi IV DPR RI dengan kemitraan kita ada *output* akhir sehingga tidak tumpang tindih kayak hari ini ada yang kecewa karena tidak cukup waktu untuk bicara dan lain sebagainya. Saya hanya memperkuat itu, agar kita mencari waktu tersendiri untuk Sang Hyang Seri atau untuk garam dan sebagainya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Usulan yang baik sekali Pak, kalau saya teman-teman mau Rapat Dengar Pendapat tiap hari pun saya tungguin, walaupun empat Pimpinanannya kadang datang, kadang tidak datang.

Selanjutnya Bapak Haerudin silakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota yang terhormat,
Mitra kita dari stake holder pangan, baik yang menyangkut tentang pertanian dan kelautan yang sudah hadir hari ini yang saya hormati.

Sebetulnya kita setuju dengan idenya Bapak Slamet dan idenya Bang Khalid memang butuh fokus untuk bersama teman-teman mencari solusi. Beliau hadir disini itu adalah sedang sakit, itukan BUMN negara di bidang pertanian sedang sempoyongan, makanya semua diambil, ini diambil-ini

diambil bagaimana bertahan hidup biar bisa gaji minimal karyawan. Kan ada kejadian di tahun-tahun lalu salah satunya tidak mampu gaji karyawan. Malah kira-kira kalau tidak salah nunggu PMN datang, karena ketidak mampuan.

Saya pikir bukan hanya salah sendirian tapi ini sistem, kita mendorong mereka bagaimana punya kemampuan. Kalau kata tadi Bapak Panggah bahwa kita tidak mungkin bisa sampai swasembada garam, saya secara pribadi sangat yakin bisa, asal harus bertahap Pak, tidak bisa dengan serta-merta. Jadi saya sampaikan saya yakin swasembada itu bisa, asal baik Kementerian Kelautan, baik PT. Garam Indonesia dengan seluruh kekuatannya fokus kemampuan kita. Hentikan impornya, itu juga duit impor, kenapa tidak serap teman kita yang tadi belakang saudara Slamet. Sudah bilang Pak Slamet sekian ribu ton belum terserap, ada apa masalahnya. Malah Kementerian Kelautan masih mikir impor dengan Indag, padahal ini belum terserap. Kan ini kontradiksi interminis, situasi yang disini sedang dibutuhkan kok ini jalannya kemana-mana.

Maksud kita Bapak-bapak semua, ini mitra kita sedang sempoyongan tanda petik sakit, tidak sesuai apa yang seharusnya. Dan ini Dirut baru banyak yang warisan sakitnya, tali temali. Nah, kita tahu betul bagaimana ini sembuh, agar sembuh butuhlah ada diagnose yang baik. Biar sembuh butuh obat yang tepat, biar sembuh butuh support seluruh stake holder agar ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita hari ini menghakimi, bertanya sih tidak ada masalah tapi kalau hari ini minta dibangun pelabuhan orang disini lagi sakit. Orang Sang Hyang Seri sedang ngap-ngapan, banyak karyawan sedang kerepotan. Orang Berdikari sudah kesusahan mana yang bisa bertahan hidup.

Kenapa saya sampaikan dari tadi, Pak apa adanya bicaranya disini jangan muter kayak ilmu pengetahuan. Bapak ini pelaksana teknis, tinggi-tinggi strategis, kebijakannya ada diatas. Kondisi Bapak seperti ini, modal saya seperti ini, kelemahannya seperti ini, tantangan saya seperti ini, saya butuh ini Pak, kan sederhana 5 menit selesai, tidak sampai jam 16.00 WIB.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Selanjutnya Mbak Wulan, Mbak Wulan tidak ada, Pak Ichsan Firdaus.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Terima kasih Ketua.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Para Dirut yang saya hormati,
Para direksi dan teman-teman Komisi IV DPR RI, Pimpinan yang saya hormati.

Sebelum saya menjelaskan terlalu detail, saya mau bertanya dulu. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Bapak Panggah tadi terkait dengan bahwa BUMN inikan sebenarnya bagian untuk upaya mensupport pembangunan yang ada di sektor pertanian dan kelautan. Ini saya mau tanya Sang Hyang Seri sama PT. Pertani. Sudah 2 tahun ini Bapak sudah tidak mendapatkan PSO, betul ya Pak? Saya mau tanya tidak apa-apa salah satu saja. Berapa kontribusi PSO terhadap kinerja perusahaan Pak, presentase saja?

KETUA RAPAT:

Pak Ichsan bertanya langsung?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Iya saya tanya langsung sebentar Ketua.

KETUA RAPAT:

Kepada Pertani atau Berdikari atau SHS.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

SHS saja dulu.

KETUA RAPAT:

Oke, jawab SHS.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Berapa kontribusi PSO Pak, sebelum PSO itu dicabut?

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi kapasitas produksi kita 82 ribu ton per tahun, kalau 40% kapasitas produksi itu bisa terpenuhi berarti kita bisa memproduksi kira-kira 30 ribu ton.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Selama ini PSO berapa Pak, 2 tahun sebelum dicabut PSO ini?

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Sebelum dicabut rata-rata produksi 20 sampai 30 ribu Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Berarti hampir 50% itu tingkat ketergantungan perusahaan terhadap PSO sebesar itu ya. Pertani? Kurang lebih sama 50%.

DIREKTUR UTAMA PT PERTANI (PERSERO) (Dr. FEBRIYANTO, S.E., M.Com., MTQM.):

Kurang lebih sama Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Baik, 50% itu dari sektor komersil, di luar PSO ya? oke, 50%.

Artinya kalau PSO itu tidak diberikan lagi dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian berarti menghilangkan 50%. Ini nasibnya sama dengan perusahaan yang pernah ditempati oleh dua Dirut ini Pak, namanya Badan Usaha Logistik Pak, Bulog. Ketika BPNT itu dilaksanakan maka 70% pendapatan Bulog itu hilang karena BPNT. Berarti problemnya adalah kalau memang kita ingin menyehatkan lagi dua perusahaan pertanian ini, maka kita harus bangkitkan lagi PSO Pak. Itu kalau boleh saya ini, ini 50% pendapatan hilang gara-gara PSO-nya dicabut oleh Menteri Pertanian yang terdahulu. Tetapi kita juga harus bertanya kenapa PSO itu dicabut, apakah karena kinerja perusahaan BUMN ini tidak layak untuk diberikan PSO atau ada kepentingan lain.

Saya ingin mendapatkan pendalaman nanti Pak, setelah saya selesai bertanya saya ingin tahu penyebab kenapa dicabut PSO selama 2 tahun terakhir ini. Karena seharusnya menurut saya kalau memang PSO itu dipakai, digunakan setidaknya memulai untuk menyehatkan kembali perusahaan BUMN. Seperti Bapak Panggah tadi yang menyampaikan bahwa BUMN itu sejak kelahirannya menurut saya juga dilakukan atau didirikan untuk mendorong dan membantu pembangunan sektor pertanian. Nah, ini saya ingin minta penjelasan apakah karena kinerja perusahaan buruk atau karena hal yang lain. Saya ingin penjelasan nanti, itu yang pertama.

Yang kedua, PERINDO dan PERINUS. Saya mau tanya Bapak atau Ibu pernah mendengar ide terkait dengan BULOG Perikanan, Bapak Dirut PERINUS dulu.

DIREKTUR UTAMA PT PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO) (MUHAMMAD YANA ADITYA):

Pernah mendengar Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Sampai sejauhmana itu Pak, desain BULOG Perikanan itu. Sepengetahuan saya di dalam Undang-Undang Perlindungan Nelayan dan Petambak Ikan itu di dalam Undang-Undang tersebut ada klausul untuk mendirikan namanya BULOG Perikanan dan di dalam pemikiran kami pada saat itu, pada saat pembentukan Undang-Undang itu justru BUMN dua inilah yang akan menjadi *core business* dalam mengelola BULOG Perikanan itu. Termasuk pengadaan *cold storage*, termasuk pengelolaan nelayan dan sebagainya. Nah, saya mau tanya apakah kemudian sampai sejauhmana implementasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Nelayan itu. Apakah hanya sekedar macam kertas, jangan-jangan seperti apa yang disampaikan Bapak Slamet tadi, Badan Pangan Nasional.

Badan Pangan Nasional itu tahun 2012 Pak, dan menurut amanat Undang-Undang maksimal 2 tahun harus didirikan. Tetapi sampai sekarang sudah 7 tahun itu belum terealisasi.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Ichsan?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Terakhir, yang ketiga saya mau tanya PT Berdikari. PT Berdikari ingin mengembangkan peternakan katanya, tetapi yang dilakukan adalah impor. Saya mau tanya Pak PT. Berdikari, Bapak punya lahan tidak Pak? Jangan-jangan Bapak dalam pengembangan peternakan itu hanya melibatkan pihak ketiga saja. Saya khawatir itu Pak, kalau memang tidak punya lahan untuk apa kemudian kita support untuk pengembangan peternakan itu. Yang saya tahu Pak, PT Berdikari itu hanya melibatkan pihak ketiga saja. PT Berdikari hanya mendapatkan support atau subsidi atau apapun namanya dari Pemerintah. Tapi kemudian dipihak ketigakan dan kemudian hanya sekedar, mohon ijin PT Berdikari hanya berperilaku seperti *rent seeker* Pak. Nah, sekarang berapa lahan yang dimiliki PT Berdikari, dimana lokasinya dan apa yang harus dilakukan.

KETUA RAPAT:

Cukup, nanti dijawab Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Saya pikir cukup itu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Yang terakhir Mbak Wulan barusan datang.

Silakan Mbak.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Langsung saja, melanjutkan dari Bapak Ichsan. Jadi saya lebih fokus kepada Berdikari. NTT nanti Pak, tenang saja ada urusannya dengan NTT ini. Jadi disini saya membaca sedikit realisasi dan rencana impor untuk Sapi Bakalan Australia 2019 sampai 2020. Disini ada beberapa segmen yang sudah terealisasi, pertanyaan tadikan saya juga belum mendengar yang disampaikan dari Bapak kemana ini sapi-sapinya. Karena tadi Bapak sampaikan bahwa ada lahan untuk sapi di Sidrap dan di mana Pak, kalau boleh diulang? Hanya di Sidrap.

Kebetulan saya pernah kesana Pak, sapinya itu kalau gendut kayak saya sih enak dilihatnya. Karena apa? salah satu dari karyawan dulu menawarkan sapinya kepada keluarga saya. Berhubung itu saya lihat disana, apa yang terjadi saya lihat ternyata tidak ada bodynya sama sekali. Jadi sangat-sangat terseok-seok, tua dan lain sebagainya, pokoknya tidak layak. Untuk itu, bukan karena ini perusahaan yang oleh Pemerintah. Jadi kalau misalnya rugi bisa minta lagi, rugi bisa minta lagi, sebenarnya kan kita malu. Saya kalau didudukan di porsi Bapak disitu, mungkin saya sudah mengundurkan diri. Paling tidak apa? menunjukkan bahwa siapa yang siap kerja disitu. Karena apa? ini banyak sekali yang mungkin. Kemudian sisa kuota, kuota lagi tadi juga tidak disampaikan sama Bapak, karena yang saya dengar tadi hanya ayam, ayam dan ayam.

Terus kemudian ini juga tadi menyambung dari saudara Bapak Panggah. Jadikan Berdikari ini tadi yang mebel, ada life stock dan ada satu lagi, tolong coba kita konsen disatu dan itu memberikan provit buat Pemerintah. Jadi ini yang bisa kita lihat jadi jangan sampai selalu yang tadi kita dengarkan, saya dengarkan sendiri dari sepanjang ini perasaan rugi dan rugi. Jadi kalau misalnya rugi ya buat apa ada, karena ini akan juga menjadi beban hutang Pemerintah.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Mbak Wulan, hanya menjelaskan saja begitu saya duduk menjadi Anggota Komisi IV DPR RI Berdikari itu sudah ada pabrik mebel. Mbak Wulan tahu kan, jadi waktu saya duduk disini pabrik mebelnya sudah ada, bahkan dulu sudah ada asuransi, terus asuransinya dijual.

Jadi Bapak dan Ibu para Direksi, di depan ini tadi sudah mendengar semua pertanyaan walaupun pertanyaannya baru sedikit kita akan dalam sampai tuntas kalau bisa hari ini...

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Bapak Ketua, ijin.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Ono.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Saya mau menambahkan, saya belum daftar tetapi ijin saya bicara.

KETUA RAPAT:

Ya, salah sendiri kenapa tidak daftar.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Karena memang mengambil posisi terakhir Bapak Ketua.

Terima kasih Pak.

Yang saya hormati Bapak Dirut.

Langsung saja ini terkait dengan RNI, mungkin tadi disinggung sama teman-teman yang lain, tetapi karena saya Dapil disana ada PGII Rajawali ya. Informasi yang saya dapat bahwa tutupnya beberapa pabrik kalau tidak salah di Cirebon ada satu pabrik terkait dengan luas tanah yang terus berkurang. Salah satunya juga di Indramayu ada penguasaan oleh masyarakat terakhir saya dengar sih sekira 3.500 hektar dari 12 ribu hektar yang dikelola oleh PG Jati VII. Nah, mohon informasi sekarang itu statusnya seperti apa. Karena terakhir kemarin masih saya mendengar masih terjadi konflik antara masyarakat dengan RNI.

Nah yang kedua, Rapat Dengar Pendapat inikan saya yakin mempunyai tujuan untuk membedah, kenapa sih BUMN yang berhubungan dengan bidang Komisi IV DPR RI ini termasuk BUMN yang kurang bisa bernafas panjang. Nah, tentunya ini terkait dengan beberapa regulasi yang dibuat mungkin saja oleh Kementerian mitra kerja Komisi IV DPR RI. Nah, sehingga saya minta masing-masing BUMN apa sih hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada Kementerian. Kalau ada regulasi seperti tadi sekilas disampaikan oleh Bapak Yana misalnya terkait dengan ijin kapal yang 150 GT kalau bisa dicabut. Nah, yang lainnya ini seperti apa. Dan BUMN saya yakin tidak bisa berdiri sendiri karena ini merupakan pilar ekonomi negara. Jadi perlu ada negara melakukan intervensi bila BUMN itu ingin besar.

Saya terus terang membedakan misalnya BUMN Karya, dimana mereka sangat kuat malahan cenderung ada protes dari swasta, kenapa ada monopoli semua pembangunan infrastruktur dikuasai oleh BUMN. Nah, kenapa BUMN yang menyangkut pangan ini malahan kita tidak berdaya, apa

permasalahannya. Apa terkait dengan dukungan regulasi, dukungan permodalan apa sumber daya manusia dari BUMN sendiri yang sangat lemah yang tidak bisa mempunyai daya saing. Nah, sehingga sekali lagi saya minta terkait dengan bahan apa yang perlu kami sampaikan, perlu kita dorong Menteri-menteri itu untuk memperkuat BUMN-nya.

Yang ketiga, terkait dengan masalah garam. Memang tidak bisa seketika kita menolak impor, karena memang isu yang sekarang ada berkembang selain isu kedaulatan, isu ketahanan bicara juga isu stabilisasi terutama harga, ketersediaan. Sehingga pada saat bicara Undang-Undang memberikan peluang kepada Pemerintah untuk melakukan impor apapun. Nah, tetapi kita juga punya regulasi yang tentunya ini sesuai dengan peraturan di WTO. Kita punya komite pengamanan perdagangan, sehingga pada saat misalnya Madura terkait dengan produksi garam. Pada saat garam itu tidak terserap, pada saat garam itu harganya turun maka kita mempunyai upaya bagaimana KPPI itu melakukan penelitian lalu pada akhirnya kita bisa membuat kebijakan *safe guard* untuk dikenakan tarif impor misalnya atau bahkan mengurangi. Beberapa kejadian kemarin pada saat produk impor itu mengganggu terkait dengan petani lokal, nelayan lokal maka Pemerintah bisa melakukan moratorium terkait dengan impor atau bahkan mengenakan tarif impor.

Nah, hanya saja garam inikan kita tidak mempunyai data yang jelas. Pada saat bicara PT Garam dengan berapi-apinya Dirut mengatakan bahwa kita ini mampu, kita ini bisa, nah sekarang datanya mana. Sehingga pada saat kita mempunyai data yang jelas kita bisa teriak impornya janhan 2,7 juta ton, cukup 1 juta ton saja. Pada saat Pemerintah tetap misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, karena tidak percaya terkait dengan data dari Kementerian, dari PT Garam, maka kita punya mekanisme untuk mengajukan gugatan melalui KPPI untuk dilakukan *safe guard*. Nah, ini proses yang sebenarnya setelah diatur oleh Undang-Undang, kita mempunyai keleluasaan sehingga pada saat bicara kedaulatan bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan tapi ya tadi kembali pada saat bicara regulasi apa hal yang perlu kita dorong.

Saya yakin pada saat misalnya Bapak-bapak sekalian, didorong untuk diberikan PMN lagi belum tentu juga bisa jalan, pada saat regulasinya tidak mendukung. Jadi ujungnya duit juga tidak menyelesaikan masalah, sehingga pada saat tadi PSO dicabut inikan menjadi sesuatu yang melemahkan BUMN. Nah, sekali lagi mohon kita minta dari masing-masing BUMN apa yang perlu kita dorong dalam hal regulasi, dalam hal kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh Kementerian. Apabila ini menyangkut dengan Kementerian yang lain, mohon ijin Bapak Ketua bisa saja kita melaksanakan rapat gabungan Komisi. Dan bicara untuk membedah BUMN menurut saya ya secara kelembagaan mungkin kewenangan dari Komisi IV DPR RI, mungkin ada di Komisi VI DPR RI untuk bicara sehat atau tidak. Tapi pada saat bicara peran BUMN terkait dengan pangan inipun akan berhubungan dengan produsen-produsen pangan yang merupakan tanggung jawab dari Komisi IV DPR RI.

Jadi mungkin itu Bapak Ketua, saya tidak panjang lebar lagi. Itu saja yang saya minta, mudah-mudahan Rapat Kerja nanti yang disampaikan Menteri Kelautan merubah beberapa regulasi ya kita minta pada saat Kementerian Pertanian saya yakin melalui Rapat Kerja pertama itu seakan-akan penuh gebrakan sampai saat ini juga kita belum melihat gebrakannya seperti apa. Nah, kita tunggu itu.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Ono.

Jadi Bapak dan Ibu....

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Pimpinan, boleh sedikit tadi saya lupa.

KETUA RAPAT:

Boleh.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Terima kasih.

Kepada Bapak dari PT. Berdikari tolong dong diperjelas tadi *previlage* impor yang ingin didapatkan oleh Berdikari. Terus yang kedua, sebenarnya apa sih arah dan tujuannya dari impor sapi bakalan Australia di 2019-2020 dengan jumlah yang sangat besar 30 ribu kalau tidak salah, itu apakah untuk menjamin ketersediaan sapi pada berikutnya atau tidak mungkin nanti kedepan itu tidak perlu lagi ada impor-impor lagi. Jadi tolong apakah ini menjadi tonggak awal disitu supaya kita tidak tergantung impor terus kepada negara lain tentang sapi atau bagaimana.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Jadi Bapak dan Ibu, saya jelaskan PT. Perindo, PT. Garam, PT. Pertani, RNI, Berdikari, Perinus dan Sang Hyang Seri. Mereka ini pendahulunya sudah sekolah semua, karena kinerjanya busuk, kinerjanya tidak benar, hampir semua sudah masuk S3. Dan nanti tolong dijelaskan secara gamblang jangan ditutup-tutupi Bapak-bapak selaku Dirut sudah baru berapa bulan menjabat. Dan dalam keadaan bagaimana keuangan perusahaan. Karena tadi ada teman yang bilang kinerjanya buruk, emang

buruk, tapi kita harus lihat dulu latar belakangnya. Dari begitu menerima bolanya bola sudah panas, dipegang lagi salah-salah ikut masuk S3 juga nanti.

Silakan Bapak Eko dijelaskan berapa lama menjabat, bagaimana waktu Bapak menerima tongkat estafet keuangannya.

Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Dari beberapa pertanyaan Anggota yang saya hormati....

KETUA RAPAT:

Ijin, kalau ada teman-teman yang mau bertanya langsung bertanya melalui meja Pimpinan. Saya persilakan apabila memotong pembicaraan, kalau dirasa belum puas jawabannya.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Jadi secara umum memang boleh kami gambarkan BUMN ini makin belakang semakin transparan informasinya kepada publik. Nah, saya sedikit memberikan pengalaman sedikit. Saya 3 tahun yang lalu ditugaskan dari Bank Mandiri masuk ke Berdikari. Masuk Berdikari itu boleh dibilang perusahaan ini sebenarnya sudah mati. Saya menerima warisan tanah yang di Sidrap tadi, betul Ibu sapinya satu ekor pun tidak ada. Tapi sudah tercatat dipembukuan itu membeli sapi sekitar 3000-an satupun tidak ada, akhirnya kami turunkanlah audit investigasi BPKP.

Nah, kondisi perusahaan juga sama Ibu, Berdikari itu dulunya sebenarnya seperti konglomerat BUMN, punya Bank Duta, punya asuransi, banyak sekali. 3 tahun lalu saya masuk itu yang ada hanya Gedung yang sudah mau ambruk, karyawan tidak gajian, hutang sana-sini, aset praktis hampir tidak ada. Nah, secara professional sama juga yang kami lakukan sekarang masuk RNI, saya rasa teman-teman juga lakukan. Kita masuk perusahaan itu tidak bisa langsung cepat mengambil tindakan tapi kami melakukan audit dulu, supaya *clear* sebenarnya apa sih kondisi perusahaan ini. Setelah itu baru pelan-pelan kami menata. Memang di dalam penataan itu barulah muncul benturan-benturan kalau kami boleh bilang ada regulasi-regulasi yang menyangkut arah kebijakan perusahaan kami.

Contohnya di Berdikari, kami difokuskan untuk kembali fokus kepada industry peternakan. Kami mulai rintis ayam, mulai merintis sapi bakalan tetapi mulai bukan dari nol tapi dari minus, sehingga kami mengajukan impor *grandparent* pun yang selama ini 100% dikuasai oleh swasta itu babak belur

juga, tapi akhirnya mendapatkan amanah, kepercayaan karena kami melakukan GCG, penataan GCG yang benar, akhirnya kami sekarang sudah bermain di *grandparent*, *parent*, *renstock* sampai untuk pemberdayaan UMKM di sektor vendir stock-nya, itu yang kami lakukan Ibu. Jadi *insya allah* kedepannya akan fokus terus ke peternakan sehingga sapi-sapi yang tadi hilang dan segala macam itu akan tidak muncul lagi. Dan perlu juga diketahui beban yang hilang itu adalah jatuh ke manajemen yang sekarang. Itu yang kami sekarang sangat berat, reputasi sudah tidak ada, jangankan pinjam duit ke bank Bu, untuk supplier pun sudah tidak ada mau. Tapi *alhamdulillah* sekarang sudah mulai tertata dengan rapi.

Nah, dukungan-dukungan itulah yang kita perlukan. Jadi kami juga sudah mengembangkan selama saya di Berdikari untuk kedepannya kita tidak lagi impor *grandparent*. Sama benar Ibu Endang bilang *parent stock*, kita sudah bekerja sama terus tapi kita tidak berhadapan dengan misalnya di kelembagaan pun tidak semua kepala disana sama isinya bu. Jadi itu juga kami hadapi, saya kenal Ibu Endang mungkin Ibu lupa sewaktu saya di Bank Mandiri sekitar 2004-2005 sering jalan dengan Ibu. Saya tahu visi Ibu, jadi saya tahu Ibu, waktu itu mengembangkan *micro finance* untuk bekerja sama dengan Kementan. Jadi intinya itu Bu, itu pengalaman saya ketika saya ditugaskan ke BUMN yang bermasalah.

Saja juga sekarang ada nuasa untuk membuat suatu klaster tadi seperti saya sampaikan, adalah mulai menata lagi BUMN-BUMN yang selama ini hampir bisnisnya bersinggungan, faktor perkembangan teknologi maupun kebijakan itu sudah saatnya mungkin dikonsolidasikan. Tadi Bapak dan Ibu sudah menyampaikan juga masalah PERINUS dan PERINDO sulit membedakan. Jadi hal-hal seperti itu sudah dalam kajian kami, sekarang saya baru 3 minggu di RNI itu ditugaskan sebagai yang bisa mengelit untuk secepatnya mengkonsolidasikan dalam waktu 6 bulan. Jadi termasuk anak-anak perusahaan, sama seperti Berdikari ada di mebel, itu sebenarnya kita sudah mulai pelam-pelan itu mau di-*spin off*. Spin off-nya mungkin kita konsolidasikan seperti mebel, itu ke PERHUTANI atau INHUTANI yang lebih pas, karena mebel itu juga menggunakan membeli bahan bakunya dari perhutani dan Hutani.

Jadi hal pemikiran Pemerintah itu sekarang memang kita lagi godok, sama juga dengan SHS dengan PERTANI. Dengan kondisi seperti ini tapi memiliki lahan dan kompetensi dalam pembibitan tapi kondisi finansialnya tidak memungkinkan akhirnya kita konsolidasikan bagaimana caranya kita mengundang investor ataupun pihak-pihak swasta yang memang memiliki kebutuhan akan lahan dan kompetensi, seperti juga ikan. Tambak-tambak rakyat itu mulai kita tata lagi menjadi mitra-mitra binaan. Jadi betul-betul kami sebenarnya sudah mengarah kesana, Cuma memang kejar-kejaran dengan waktu tapi kami secara professional kami tidak akan mengeluh dan itu akan kami lakukan dengan tim sekuat mungkin....

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Interupsi Bapak Ketua.

Kebetulan hari Jumat nanti, besok selesai sholat Jumat saya akan diundang oleh para peneliti dari badan Litbang Pertanian. Nah, apakah Bapak bisa tadi mengakomodir hasil-hasil penelitian mumpung disaksikan oleh orang banyak. Jadi saya sedih Pak, karena para peneliti kita yang sekolah sudah jauh-jauh, menghasilkan *parent stock* itu tidak pernah diajak kerja sama. Jadi akhirnya Pak, kita tidak ada political will yang kuat untuk memberdayakan semua sumber daya manusia yang ada di Indonesia kita ini. Nah, kalau berkenan saya akan kemukakan keresahan-keresahan Bapak dan kita ingin bikin formula bagaimana untuk mengakomodir dan saya bersedia menjadi mediator.

Terima kasih, mohon maaf Bapak Ketua.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Terima kasih Ibu Endang, nanti saya akan diskusikan dengan tim dari Berdikari untuk bisa mem-*follow up* hadir dipertemuan itu. Saya teruskan kembali, jadi secara gambaran umum BUMN pangan seperti itu. Dan terima kasih memang banyak masukan, kritik terhadap kami dan ini menjadi memperkuat kami untuk semangatnya saya yakin Bapak dan Ibu semangatnya sama adalah untuk pembenahan kedepannya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, saya mau tanya sedikit boleh.

KETUA RAPAT:

Banyak juga boleh.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Dirut RNI ya?

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Ya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak, ini terkait dengan holding pangan itu memang sudah ditunjuk bahwa RNI sebagai *core-nya* atau belum ada holding pangan sebenarnya Pak.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Baik Pak, saya tambahkan penjelasan.

Jadi arah ke holding pangan itu ada Pak, Cuma sekarang kita modelnya di nomenklatur yang ada. Kalau yang sudah berbentuk holding dia, tapi dinamakan semua kluster istilahnya Pak, jadi kluster pupuk, kluster semen, kalau dia sudah berbentuk holding jalan, tapi kalau yang belum kita dipersiapkan kearah sana. Jadi mengkonsolidasikan, bisnis modelnya disamakan dulu semua, solid, baru kita ajukan Peraturan Pemerintah untuk menjadi holding pangan dalam hal ini.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Tapi cikal bakal holding itu nanti *core*-nya di RNI kemungkinan desainnya?

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Iya Pak, arahnya kesana kebetulan awalnya tadi ditunjuk Ketuanya dulu, saya waktu di Berdikari. Nah, kemudian dalam perjalanannya dalam satu bulan saya dipindahkan ke RNI, karena ada pemikiran kemungkinan RNI akan menjadi holding, karena RNI sebenarnya sudah holding.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Jadi dibawahnya nanti SHS, Pertani, semua itu?

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Betul Pak, ada 9 kalau tidak salah.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Tapi sub sektornya yang perikanan ini tidak masuk dalam holding.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Masuk Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Masuk holding itu?

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Iya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Jadi yang didepan ini adalah bagian dari holding pangan sub sektor diluar non pupuk?

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Iya Pak.

Jadi saya sampaikan yang masuk klaster pangan itu ada Berdikari, RNI, PERINUS, PERINDO, SHS, PERTANI, kemudian ada Garam, ada BGR, ada PPI. Makanya di depan saya kasih gambaran secara ini bahwa *end to end* itu semua sudah ada Pak, ada logistiknya, ada processing-nya, ada main di retailnya, PPI dan BGR. Ini yang tim saya lagi godok Pak.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Boleh Pimpinan, sedikit.

Bapak, menyambung tadi yang disampaikan bahwa tadikan katanya Bapak menerima sudah dalam keadaan payah untuk yang di Berdikari itu sampai sapinya tidak ada. Terus kemudian inikan mau lebih konsen ke masalah sapi. Terus kemudian yang saya tanyakan tadi, kemungkinan impor yang ada di 2019 dan 2020, apakah impor bakalan ini akan diteruskan. Mungkin misalnya dari Berdikari sendiri mempunyai grand desain nanti kita akan swasembada sapi dan swasembada daging misalnya. Kemungkinan jadi kita harus perlu mengimpor itu dalam jangka waktu berapa, misalnya jangka waktu 5 tahun tetapi selanjutnya kita tidak pernah ada impor atau jumlah dari sapi yang diimpor itu berapa, sehingga kepenuhan atas daging dan sapi negeri sendiri terpenuhi.

Kita tahu bahwa NTT juga itukan banyak juga sapi, jadi Jawa juga produsen sapi, NTT juga iya, itu Bali juga iya. Nah, itu apakah sudah menjadi sudah dikerjasamakan sedemikian rupa, sehingga untuk menjadi nanti grand desain kedepan itu dengan adanya impor sapi itu kedepan Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi mungkin yang menjawab Berdikari ya, ini masalah Berdikari ya Mbak Wulan.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Siap Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya jelaskan, periode yang lalu Menteri Pertanian membeli kapal angkut sapi. Sekali jalan mungkin bawanya 2000-3000 ekor, selanjutnya cuma ekornya saja sapinya tidak ada. Kenapa? Biaya angkutnya terlalu mahal, karena waktu berangkat kosong, pulanginya bawa sapi Cuma 2000 ekor. Dikalikan saja cost operasional kapal angkut dibandingkan sapi dari Australia yang sekali jalan minimal 30 ribu ekor. Kendalanya hanya di transportasi saja Mbak Wulan.

Tadi Berdikari pertanyaan Ibu Wulan silakan dijawab.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Saya kasih kesempatan Berdikari, Cuma nanti Ibu, nanti dari Berdikari bisa *sharing* bisnis modelnya.

Terima kasih Pak.

Plt. DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (PERSERO) (OKSAN O. M. PANGGABEAN):

Terima kasih Bapak Dirut.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Memang sudah seperti yang disampaikan oleh Bapak Dirut Bapak Eko dari Rajawali, bahwa pada awalnya memang seluruh bisnis peternakan sapi itu dilakukan di Sidrap di PT. BOS. Namun, dalam 5 tahun terakhir memang ada kondisi mismanagement disana, sehingga apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Dirut atau Bapak Eko bahwa itu benar. Jadi 3000 ekor sapi yang didalam neraca itu ada ternyata di dalam secara fisik tidak ada.

KETUA RAPAT:

Bapak Dirut, sudah berapa lama jadi Dirut di Berdikari?

Plt. DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (PERSERO) (OKSAN O. M. PANGGABEAN):

Saya masih PLT Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, masih PLT, ya sudah *alhamdulillah* supaya jangan masuk S3 Pak.

Plt. DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (PERSERO) (OKSAN O. M. PANGGABEAN):

Saya masih PLT 2 minggu Pak, itu yang pertama.

Yang kedua, dalam rangka menjaga stabilitas daging sapi memang seperti diketahui kebutuhan sapi secara nasional itu 686 tahun 2019. Dan akan meningkat lagi di tahun 2020 sesuai dengan asumsi kebutuhan konsumsi daging itu 2,56 kilo gram per kapita per tahun. Namun, produksi nasional itu hanya sekitar 429 ribu ton, sehingga memang masih ada defisit sebesar 256 ribu ton. Dari 256 ribu ton itu tahun 2019 itu Pemerintah mengeluarkan ijin impor daging kerbau sebanyak 80 ribu dan ijin impor daging sapi Brasil itu 50 ribu ton, sehingga masih ada kekurangan 126.858.

KETUA RAPAT:

Bapak Dirut, yang 80 ribu sama yang 50 ribu dijelaskan di alokasikan kemana supaya Komisi IV DPR RI tahu.

Plt. DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (PERSERO) (OKSAN O. M. PANGGABEAN):

Untuk kuota daging kerbau 80 ribu itu dialokasikan ke Bulog, ke Bulog 100% untuk ijin impor daging sapi Brasil itu dialokasikan tadinya ke Bulog 30 ribu ton, 10 ribu ton itu dialokasikan ke PPI dan 10 ribu ton dialokasikan ke Berdikari. Namun, dikarenakan ijin daging sapi Brasil itu keluar di bulan Oktober sehingga waktu yang diperlukan harus sekitar 50 hari. Jadi hanya Berdikari yang bisa melakukan impor itu sebanyak 3.528 ton.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, saya mau tanya.

50 ribu daging sapi Brasil Pak Dirut, itu pertimbangannya kenapa dikasih BULOG 30 ribu, 10 ribu Berdikari, itu pertimbangannya apa Pak. Apa karena Berdikari tidak boleh dikasih 30 ribu atau karena Berdikari memang hanya sanggupnya 10 ribu atau karena keinginan atau karena apa, kita perlu detail saja Pak. Kenapa tidak 50 ribu dikasih langsung ke Berdikari semua, kenapa harus dibagi ke Bulog maksud saya begitu, kan BULOG sudah dapat 80 ribu Pak, *full* 10%. Coba dijelaskan saya minta tolong Pak.

Plt. DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (PERSERO) (OKSAN O. M. PANGGABEAN):

Jadi di tahun 2018 sebenarnya Berdikari sudah mendapatkan penugasan untuk impor daging kerbau sebanyak 20 ribu ton. Dari 20 ribu ton itu kita bisa menyelesaikan 100% Pak, itu 2018 untuk daging kerbau. Untuk daging kerbau di tahun 2019 Berdikari tidak mendapatkan alokasi penugasan. Tapi di akhir sekitar di bulan Juni ada Rakortas yang melakukan keputusan untuk melakukan impor daging sapi Brasil. Di Rakortas itu sudah diputuskan Pak, memang untuk ke Bulog 30 ribu, Berdikari 10 ribu dan PPI 10 ribu, karena memang PPI di tahun 2018 juga pernah melakukan impor daging kerbau sebanyak 13 ribu ton. Jadi itu merupakan satu keputusan dari Rakortas Pak, kami hanya menerima penugasan itu dan penugasan itu dapat kami lakukan sesuai dengan keputusan yang diberikan. Hanya saja karena

waktu yang diberikan tinggal hanya 2 bulan untuk menyelesaikan 10 ribu ton jadi kami tidak bisa melakukan sepenuhnya Pak. Jadi kami hanya melakukan sekitar 3.528 ton.

Jadi kembali lagi mengenai daging sapi tadi Pak, memang kami sudah melakukan impor sapi di tahun 2019 ini dalam rangka memang ijin sapi itu bebas. Pemerintah memberikan kuota kepada seluruh feed loter untuk melakukan impor sapi untuk bakalan. Dalam rangka tadi menutup defisit kekurangan yang 126 ribu ton. Karena alokasi tadi kebutuhan untuk penugasan ke daging kerbau tadi sudah, daging sapi sudah, sehingga ada defisit 126 ribu ton yang harus dipenuhi dalam negeri. Sebagian dari impor itu dilakukan oleh swasta karena sifatnya sudah bebas, itu dari Australia, bisa jadi dari New Zeland atau juga dari Spanyol, tetapi sebagian itu juga ada lakukan impor sapi bakalan. Jadi yang kami lakukan adalah sifatnya seperti komersil untuk melakukan impor sapi bakalan.

Untuk tahun 2020 ini ada rencana Pemerintah memang untuk melakukan penambahan impor indukan untuk menambah populasi. Karena kalau memang yang diimpor adalah bakalan itu bukan menambah populasi, sifatnya hanya memenuhi kekurangan defisit yang sudah ada, tapi kalau untuk nambah populasi tentu saja harus dilakukan dengan impor indukan. Di tahun 2020 ini Berdikari sepertinya sudah akan diarahkan untuk bekerja sama dengan satu perusahaan dari Spanyol untuk melakukan peternakan indukan yang tentunya akan kami lakukan nanti di Sidrap. Kami sudah melakukan pertemuan dua kali, sudah menandatangani MoU sepertinya nanti kami akan lakukan sistemnya Demplot dulu. Kami akan coba sekitar 100-200 ekor untuk kami lakukan di Sidrap. Sifatnya adalah semen itu indukan itu adalah indukan dari dalam negeri, memakai bibitnya dalam negeri seperti sapi Bali atau Madura tetapi semennya itu dari glasian blon dari Spain yang tentunya punya genetic yang lebih bagus. Harapannya dalam 1 tahun katanya setelah kelahiran bisa memberikan kontribusi bobot 400 kilo. Jadi kedepannya mungkin kami akan coba itu sementara waktu beberapa ekor dulu, tentunya program ini nanti akan kami sampaikan kepada Pemerintah bahwa program ini cukup untuk bisa diakomodir untuk projek berikutnya. Dan kami tahu dari Kementan sudah mengetahui hal ini, karena dari perusahaan yang bersangkutan juga sudah melaporkan kepada Kementan.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Boleh sedikit Pimpinan.

Kenapa Pak, dari Spain yang dipilih atau tidak mungkin dari yang terdekat, biasanya kita kan ambil dari Australia. Apakah karena Australia dekat mungkin transportasi atau apa, mungkin harga atau bagaimana, tolong Pak.

Plt. DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (PERSERO) (OKSAN O. M. PANGGABEAN):

Sepertinya ini karena mereka sudah, yang saya dengar mereka sudah mempresentasikan hal ini di depan Kementan, Bapak Dirjen PKH. Dan potensi provitabilitas daripada sapi dari Spain ini lebih baik dari sapi Australia, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja Pemerintah mungkin mencari sumber lain yang tidak hanya relaion kepada Australia saya kira. Karena Spain juga punya genetik sapi yang baik. Itu yang kami ketahui Ibu.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Pimpinan, boleh?

KETUA RAPAT:

Begini Mbak Wulan, kadang-kadang terjadi juga neraca defisit perdagangan yang jomplang, contohnya Indonesia dengan Pakistan. Kita ekspor CPO tapi mereka tidak bisa impor apa kepada kita. Mungkin biasanya itu menutup defisit perdagangan.

Silakan Mbak Wulan.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Terima kasih Ketua.

Kalau masalah sapi kayaknya ada gregetnya ini saya.

Bapak, jadi yang akan menjadi tempat Demplot tadikan di Sidrap, kalau boleh tahu mungkin sudah ada semacam presentasi. Itu berapa dulu Pak, dan itu butuh berapa lama.

Itu saja cukup saya Pak, terima kasih.

Plt. DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (PERSERO) (OKSAN O. M. PANGGABEAN):

Risetnya sudah ada di mitra kita PT yang menjadi mitra kita yang akan bekerja sama dengan kita. Kita coba kemarin kebetulan baru meeting kita dua hari yang lalu. Itu sebenarnya sudah pernah dilakukan di beberapa mitra swasta dan hasilnya cukup signifikan. Sehingga kami dapat informasi dari Kementan sepertinya diarahkan kepada Berdikari untuk melakukan kerja sama ini. Dan kami sudah menandatangani MoU itu dan kami coba dulu sekitar 100 ekor di Sidrap, ini dalam 1 tahun Ibu.

Kebetulan di tahun 2020 juga Kementan punya program untuk melakukan pengadaan indukan sebanyak 14.400 ekor. Kami tidak tahu apakah ini memang indukannya dari eks Australia atau memang dari negara

lain kami kurang begitu tahu Ibu, karena ini program Kementan yang harus dilaksanakan di tahun 2020 ini.

Demikian Ibu.

KETUA RAPAT:

Lanjut siapa Pak Eko yang akan menjelaskan.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Mungkin garam Pak.

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (Persero) (BUDI SASONGKO):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Dan kami akan menjawab dari Bapak Darori, PT Garam juga punya Pak, tadi sudah kami gambarkan disana tentang sistem tunel atau sistem pyramid namanya. Sistem pyramid ini memang hasilnya bagus, tapi perlu menjadi diperiksa bahwasanya untuk menciptakan menjadi garam itu harus memiliki brenteng atau lok waduk. Kalau lok waduknya itu besar hasilnya pasti besar, jadi tidak otomatis dari laut langsung kita saring saja tidak, harus ada lok waduknya.

Kalau rakyat untuk membikin itu pasti akan bikin itu, Cuma skalanya mungkin rendah. Persoalan yang pertama adalah, kedua juga tentang skala ekonomi Bapak. Untuk membuat tunel itu harus membutuhkan plastik, plastik ini kalau yang terbaik yang dibuat oleh Antartika itu per meter bisa 2,5 juta, belum membikin kayunya atau ragangannya itu desainnya itu ada 3, plastik, kayu sama membuat juga didalamnya harus ada geomimbran-nya Pak. Nah, ini yang membuat biasanya skala ini kecil.

Dan sebagai peneliti kami di PT Garam mempunyai Litbang besar, mereka-mereka meneliti adalah yang dipentingnya adalah asrow-nya Pak, jadi hasil garam itu juga, hasil dari plastik itu ada mineralnya tetesan itu, itu yang lebih mahal daripada garam. Nah, kalau kita ribuan hektar pakai itu barangkali apalagi tadi per hektar tadi ya bisa 240 ton per tahun. Itu 240 ton per tahun itu adalah per tunelnya atau per hektarnya. Kalau setahu saya adalah itu sebenarnya adalah per tunelnya. Sebenarnya kalau kita memanfaatkan itu seluruhnya bisa bagus Pak, tapi skalanya tidak bisa kita untuk seperti *on farm*, garam murni yang sekarang ini Pak, besarnya. Apalagi mineral laut itu juga menentukan.

Mineral laut yang ada di Pantura itu rata-rata sekarang itu 2 derajat sampai 2,5 derajat bumi bahkan ada yang kurang, karena sudah teraliri oleh

sungai-sungai besar. Setelah kita alirkan 2 sampai 2,5 derajat bumi kita bentuk namanya lok waduk Pak. Disitu harus menciptakan minimal bisa 10 sampai 17 derajat bumi baru dialirkan ke tunel ini Pak. Nanti bisa kami di Sumenep ada itu, di Sumenep memiliki *pilot project* 5 kalau tidak salah disana, terus di Pamekasan. Kalau nanti Bapak-bapak tindak kesana bisa kita perlihatkan ada.

Untuk Bapak Lema, atau yang di Bipolo Pak, untuk menjadi periksa sebenarnya Menteri ATR pada tahun 2016 itu sudah memberikan HGU kepada pelaku-pelaku usaha garam termasuk di PT. Garam ini sebelum yang di Bipolo itu diberikan HGU sebesar 225 hektar. Termasuk ada 7 sampai dengan 12 pengusaha garam. Itu posisi peluangnya adalah 3.500 hektar yang sampai sekarang juga belum tuntas, mohon ijin. Lah, PT Garam yang dilakukan oleh Bapak Panggah beliau ini mantan orang tua kami di Perindustrian. Yang di Bipolo itu juga dulu dibina oleh beliau di Perindustrian yang dikerjakan oleh bersama rakyat di sana sejak tahun 1998 ya Pak, tetapi setelah tahun 1998 berjalan kira-kira 7 tahun diserahkan kepada rakyat tidak jalan, tanah itu nganggur kurang lebih 13 tahun. Baru kami masuk di tahun 2016, desain dari Perindustrian kami sempurnakan kita dapat 300 hektar Pak, 304 hektar tepatnya. Yang sampai sekarang sudah berjalan 60% produksi per hektarnya sekarang sudah mencapai 60 ton per hektar. Dengan harapan tahun 2021 itu bisa mencapai 100 ton per hektar Pak. Kenapa? Memang di Bipolo ini Kupang ya, di Kupang pada umumnya sampai Malaka, TTS, Nagakeo, itu salinitas air bagus sekali Pak.

Dan memang saya belum membuktikan selama 3 tahun disana ternyata musim hujanya lebih pendek daripada Madura, tidak terbukti lebih dari 19 dekade kering. Sehingga pada saat Madura masih kering kemarin di Bipolo sudah hujan, bahkan dia keringnya terakhir kemarin 3 tahun berturut-turut. Nah, untuk itu kami apa teknologi yang ditawarkan oleh PT Garam. Sekarang kami di Gresik Manyar ada tanah 283 hektar, kami menjadikan bancmark teknologi Pak. Nanti ada tunelnya, ada Gekinya, Gekin itu sama Geki bukan Gekin. Itu teknologi dari Korea Selatan. Jadi air laut itu kita sedot langsung kita masukkan sebagai *stock pile* tapis kala ekonominya belum terhitung karena baru bulan Juni 2020 ini nanti, ini masih DID dan masih dalam proses penataan lahan.

Ketiga kita juga akan membangun juga yang membuat desain lahan industri yang piur tanah tidak pakai geomembran dan SOP-nya sudah ada dengan sistem bet namanya. Terbuka dalam tahun ini PT Garam sudah menghasilkan 450 ribu ton memakai sistem itu Pak, sistem bet, Jadi air yang masuk ke borem itu minimal adalah 3 derajat bumi, masuk ke evaporasi awal 5 derajat bumi, evaporasi tengah itu 7 derajat bumi, masuk evaporasi akhir itu 11-12 derajat bumi, masuk ke lok waduk itu 17 derajat bumi, kita simpan sampai 22 derajat bumi, kepersiapan kristalisasi itu 25 sampai 26. Kalau dulu kan air berapapun masuk kristalisasi Pak, sehingga MG-nya itu tinggi, SO4-nya tinggi, NACL-nya di bawah 97 Pak. Nah, ini yang kami pikirkan dengan rakyat terintegrasi inilah yang kami usahakan nanti bersama KKP agar dapatnya desain-desain ini kita sempurnakan.

Yang kedua, barangkali....

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Bapak, soal Bipolo tadi, kalau kualitasnya bagus, kuantitasnya juga mencukupi, ini kita butuh percepatan. Karena terus terang pak, bagi saya orang NTT, wakil rakyat dari NTT ini momentum yang harus saya tangkap, jangan sampai lepas, kan begitu konkrit Pak. Apa yang perlu dilakukan didorong oleh Komisi IV DPR RI ini, supaya ini jangan wacana-wacana keluar lagi, wacana-wacana keluar lagi. Kita butuh model, karena dari segi kualitas saya kemarin juga ngobrol sama beberapa pihak yang mengerti tentang garam mereka katakan ini kualitasnya oke. Pertanyaan saya juga selanjutnya, artinya untuk ekspor ada harapan gitu Pak, soal ini.

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

Mohon ijin Bapak Lema.

Kita yang terbesar PT Garam disana 300....

KETUA RAPAT

Bapak Lema kita jangan berpikir ekspor dululah, jangan seperti Kementerian Pertanian. 2020 ekspor besar 500 ribu ton kita bicara dalam negeri dulu, nanti Dirut PT Garam saya minta dengan hormat Bapak kunjungi Dapil beliau. Kira-kira bisa tidak dibangun model seperti diatas.

Yang kedua, kalau memang PT Garam mutunya bisa diterima untuk industry nanti saya telepon temannya Bapak Panggah, PT Asahi Mas untuk ketemu Bapak. Bukan begitu Bapak Panggah, itu saja.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua, mumpung belum jauh.

Bapak Dirut, kalau sistem tunnel yang sedang berkembang di Pantai Selatan khususnya seperti ini di kampung saya, itu kira-kira untung tidak rakyat, kalau tidak kami hentikan ini, karena ini lagi ramai-ramainya karena garamnya tidak kotor sama sekali, putih *memplak Jowone Kuwi*. Tolong kalau memang ini rugi ya kami akan stop ini, karena kasihan nanti hutang bank untuk bikin seperti ini, Bapak-bapak tidak menerima malah rugi itu.

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

Mohon ijin, memang kami yang digunakan oleh kami di tunnel di Madura Pak, itu memang plastiknya yang bagus Pak. Saya nanti akan segera kesana deh, untuk menentukan.

KETUA RAPAT:

Pak Kanjeng, yang paling untung itu jual es balok, laku tidak laku habis.

Silakan Bapak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Dirut PT. Garam ini terkait dengan ada namanya Pugar di Kementerian Kelautan Perikanan. Ini sebenarnya integrasi ada peran PT. Garam terhadap Pugar ini, karena kita sudah menyetujui Pugar inikan sudah hampir 5 tahun programnya Ibu Susi kalau tidak salah itu.

KETUA RAPAT:

Bukan. Itu programnya Menteriya Bapak Pak Iksan. Pugar itu tidak jelas. Diberikan bukan kepada petambak tetapi kepada semua orang yang beraliansi ke Pak Iksan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Saya minta analisisnya Pak. Apa kontribusi PT Garam kepada Pugar itu Pak ... (suara tidak jelas).

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua, saya masih ada tambahan sedikit.

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

Sebenarnya Pak Iksan ini sudah paham nih Pak Sudin. Dulu sebelum Pugar kan Kugar, jaman Pak Fadil ya Pak Iksan ya. Pak Sudin juga lama, dan Pak Firman Subagyo. Saya tidak berani jawab ya. Karena Pugar ini adalah murni dari KKP Pak. Tapi Pak, PT Garam mendampingi di 25 sentral produksi dalam mendesain itu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dari 25 wilayah, berhasil tidak?

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

Yang paling sukses Brebes bagian Madura, terus kemarin Ujung Pandang.

KETUA RAPAT:

Berapa banyak yang berhasil?

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

Karena faktor lahan Pak.

KETUA RAPAT:

Eenggak. Yang saya tanya berapa banyak yang berhasil?

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

Itu yang bisa menjawab terus terang KKP Pak, bukan kami Pak.

KETUA RAPAT:

Bukan. Kan Bapak pendamping tadi.

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

Iya.

KETUA RAPAT:

Berapa banyak yang berhasil?

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

Kalau laporan kemarin yang 30% dari total.

KETUA RAPAT:

30%?

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

Iya.

KETUA RAPAT:

Ya berarti yang salah KKP dan pendampingnya.

Silakan Pak Sutrisno.

Habis ini yang lain silakan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ketua, pertanyaan terpotong tadi ini Pak Dirut. Saya ingin menyelesaikan permasalahan garam rakyat. Tapi kan datanya juga perlu lengkap. Tadi saya menyampaikan bahwa penggunaan garam 2019, itu kan 4,1 Juta. Stok akhir tahun 1,9 juta. Kalau Pemerintah mengizinkan impor Tahun 2020 ini 2,9. Artinya apa? Tahun 2020 akan ada stok garam 4,8. Nah kalau itu kondisinya berarti rakyat kita tidak punya kesempatan untuk memproduksi garam di Tahun 2020. Oleh karena itu pertanyaan saya adalah Bapak adalah ahlinya. Karena apa, pengalaman 2017-2018 garam rakyat itu terserap oleh industri. Pertanyaan saya Pak, garam rakyat itu bisa terserap disektor mana saja? Kami ingin merekomendasikan sebelum mengimpor agar menggunakan dulu stok garam milik rakyat itu. Jangan kemudian harus mengimpor 2,9, baru itu ada solusi. Rakyat punya kesempatan untuk memproduksi kembali di Tahun 2020. Kasihan rakyat tidak bisa makan nanti Pak kalau tidak bisa bekerja. Tidak mungkin dia bekerja ditempat lain. Ini persoalannya. Mari kita urutkan, tadi sudah disebut satu per satu tuh. Untuk CAP, ini garam rakyat boleh tidak, bisa tidak diserap, berapa jumlahnya, baru kita rekomendasikan supaya pakai dulu itu. Itu adalah satu-satunya solusi yang bisa kita lakukan untuk berikan kesempatan rakyat tahun depan bisa makan. Bisa juga memproduksi kembali Itu Pak yang tadi terpotong sebenarnya. Karena ingin merekomendasikan ... kita agar masalah garam rakyat ini adalah solusi, ada penyelesaian.

Silakan Pak. Mana saja dan berapa jumlahnya yang bisa diserap?

Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

Kami tanya ke guru saya juga nih. Jelas itu semua kebijakan Pemerintah. Dari total garam dalam negeri yang 1,9, data dari KKP dan perindustrian terakhir (ratas). Itu sesungguhnya kami berharap Pak Panggah. Okelah kalau CAP tidak bisa dianukan, itu karena murni memang. Apakah perikanan juga tidak bisa dari dalam negeri. Kami mempunyai konsep ke Presiden Pak, Menteri Perdagangan, KKP dan Perindustrian. Kami dan ada rekomendasi didalam slide kami. Kalau bisa mereka itu seluruhnya wajib importir itu wajib menyerap garam dalam negeri. Katakan umpamanya CAP Pak Panggah, bisa tidak 10% apakah merusak daripada equipment maupun hasil. 10% dari total 2,2 katakan.

Terus perikanan, masa perikanan masuk cluster industri ini Pak. Ambillah 50% untuk perikanan dari dalam negeri. Untuk *treatment water*, pengasinan kita, pertambangan. Anggaph ambil 50% saja. Itu akan tuntas Pak. Dalam 1 tahun garam dalam negeri terserap ... rakyat, termasuk PT Garam. Dan memang stok yang paling bagus adalah buffer stok tahun ini paling tidak bisa memenuhi tahun depan Pak. Karena kenapa? Bapak tadi mengatakan 2016 terserap bagus, 2017. Karena disana anomali cuaca Pak. Musim kemaraunya pendek. Bahkan dengar harga garam bisa menembus 3 sampai 4 Juta per kilo per ton. Setelah itu kembali lagi begitu musim bagus di

Tahun 2018 mulai agak turun lagi harga. Dan sekarang lebih turun lagi, karena musim yang bagus.

Jadi sesungguhnya kami mempunyai konsep. Impor ini memang bisa direduce dengan cara-cara salah satunya adalah seluruh industri tidak. Karena selama ini yang wajib menyerap kalau tidak salah Aneka Pangan ya Pak Panggah ya. Hanya Aneka Pangan saja Pak. Dan pabrik Aneka Pangan itu hanya di Jawa Timur yang terbesar. Kapasitasnya diatas 400.000 ton. Lah kalau sekarang perikanan, perindustriannya disebut didalam ini yang ini, semua importir menyerap katakan, rata-rata 20% saja Pak kalikan dari itu sudah lebih dari 1,2 Juta ton loh Pak.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Untuk ikan asin bisa kan itu. Pengasinan ikan itu.

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

Itu kan diimpor juga itu.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Tidak bisa diserap dari situ?

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (BUDI SASONGKO):

Sesungguhnya dalam negeri seharusnya bisa.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Asalnya juga dari daerah laut kita. Oh gitu ya. Oh tidak ada fee katanya Pak.

KETUA RAPAT:

Cukup?

Dilanjut. Pak Eko, siapa lagi yang akan menjelaskan?

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Mungkin PERINUS, silahkan.

DIREKTUR UTAMA PT PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO) (MUHAMMAD YANA ADITYA):

Terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan dan Anggota yang terhormat,

Mohon ijin. Saya Yana Aditya jadi Direktur Utama sejak Juni 2019. Jadi sudah 6 bulan Pak. Ketika kami masuk kondisi keuangan sudah minus, operating cash flow juga sudah minus juga. 3 hari setelah kami menjabat, kami diperiksa Pak oleh Kejaksaan Tinggi Aceh oleh kasus KJA itu. Dan kemudian sebulan itu ada tersangka.

KETUA RAPAT:

Tersangka di KPK itu?

DIREKTUR UTAMA PT PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO) (MUHAMMAD YANA ADITYA):

Kejaksaan Tinggi Aceh Pak.

KETUA RAPAT:

Oh Kejaksaan Tinggi.
Yang KPK?

DIREKTUR UTAMA PT PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO) (MUHAMMAD YANA ADITYA):

Yang KPK bukan Perinus Pak.

KETUA RAPAT:

Oh.

DIREKTUR UTAMA PT PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO) (MUHAMMAD YANA ADITYA):

Jadi situasi sudah seperti itu Bapak. Tugas kami waktu itu adalah bagaimana agar tidak terlalu dalam jatuh ini perusahaan.

Terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaan dan tanggapan. Kami akan memulai dari Pak Aan Silena yang terkait dengan yang ada di NTT. Terima kasih Pak, itu memang daerah yang sangat potensial untuk tuna, cakalang dan tongkol. Kebetulan memang kami punya daerah operasi. Dekat disitu Pak. Jadi di Benoa. Di Benoa ini wilayah operasinya mencapai ke Larantuka, Flores dan di Maumere. Nah kami akan mencoba hubungi kontak person Bapak kalau misalnya nanti terlewat Pak. Kami disana menjadi *off taker* Bapak. Jadi penampung dari hasil nelayan. Yang memang selama ini untuk didaerah Benoa dan Surabaya kami jadikan sebagai pangkalan ekspor. Kalau misalnya nanti bisa kami rangkai dengan program yang sudah kami sampaikan tadi diawal dengan kerjasama dengan KUR. Kami akan berterima kasih kalau nanti misalnya kami bisa dikontakan dengan komunitas nelayan tersebut Bapak.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua ijin, sedikit Pak.

Jadi terus terang, kapal-kapal yang masuk dari Bali itu kapal-kapal besar Pak. Mereka tebar rumpon, dan kemudian ikan-ikan semua perairan di Nusa Tenggara Timur itu terangkat semua Pak. Bawa lari ke Benoa sana Bali, NTT nol Pak. Nah ini harus menjadi perhatian juga. Saya juga pasti akan ngomong sama KKP soal ini Pak. Kemarin keluhan nelayan di NTT itu soal itu. Sampai akhirnya mereka kejar-kejaran dilaut soal itu Pak.

KETUA RAPAT:

Soal itu maksudnya soal apa Pak?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Rumpon. Diangkut semua Pak Sudin. Semuanya diangkut, mau kecil, besar dan segala macam. Dan nelayan di NTT itu ikannya mereka tidak ini. Nah kira-kira seperti itu Pak. Makanya saya tadi bertanya, apakah perlu ada semacam hilirisasi berupa pabrik pengolahan ikan atau apa, sehingga masyarakat di NTT ikannya itu jelas.

Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PT PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO) (MUHAMMAD YANA ADITYA):

Terima kasih Pak Lema.

Memang didaerah. Kami terangkan posisi dulu Pak ya. Disana ada kapal tampung Pak. Tugasnya adalah mengambil atau membeli ikan-ikan yang ada dinelayan sekitar. Memang karena jumlah kapal kami tidak terlalu besar yang ada di daerah NTT. Hanya sekitar 1 kapal, ada 2 kapal yang lain ijinnya belum selesai di KKP sebagai kapal tampung. Tapi kita berharap tahun ini sudah bisa bertambah lagi.

Harapan kami begini Pak, mohon ijin. Jika nanti nelayan local yang ada disitu memang bisa berhubungan dengan kami sebagai off taker, kami harapkan: pertama bisa menjadi buffer stok buat kami. Yang kedua, dari nelayan juga mendapatkan kepastian dari kami.

Yang kedua terkait dengan kemungkinan untuk membangun industry perikanan disana. Kami nanti akan survey dulu saja Pak kalau diperkenankan. Karena ada beberapa tempat yang memang. Kami laporkan disini sekalian. Yang memang punya potensi seperti itu. Mungkin barangkali ada beberapa regulasi yang mungkin barangkali bisa dijadikan sebagai relaksasi Ketua. Karena yang namanya industri membutuhkan support dari supply ikan yang pasti. Nah supply ikan yang pasti itu dihasilkan kalau tidak dari budidaya ya berasal dari tangkap. Nah tangkap itu ada alatnya yaitu kapal dan alat pancing. Nah ini yang mungkin barangkali kita diskusikan lebih detail karena

mengingat ada yang tadi saya sampaikan sudah disidur oleh Pak Ono tadi waktu terakhir mengenai ijin kapal.

Demikian Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Dirut,

Menarik ini, relaksasi kebijakan. Apa yang dimaksud dengan relaksasi kebijakan. Apa yang dimaksud dengan relaksasi kebijakan.

KETUA RAPAT:

Disini ada Pimpinan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Saya mohon ijin dulu Ketua.

Agak menarik tentang relaksasi kebijakan.

Mohon maaf Ketua. Agak saking tertariknya saya. Karena sudah 5 tahun ini tidak ada relaksasi kebijakan diperikanan dan kelautan Pak. Nah ini saya minta tolong.

DIREKTUR UTAMA PT PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO) (MUHAMMAD YANA ADITYA):

Baik. Pimpinan mohon ijin.

Relaksasi kebijakan yang kami maksudkan adalah realisasi terkait dengan surat edaran Dirjen Tangkap tentang ukuran kapal Tahun 2015. Memang ini merupakan pembicaraan yang sudah berkali-kali disampaikan. Mungkin sudah ada diskursus wacana yang ada didalam media juga. namun kiranya kami berharap agar proses ini bisa dipercepat. Karena bagaimana pun juga industri-industri perikanan kita membutuhkan supply dari jumlah ikan yang cukup banyak.

Demikian Pak.

KETUA RAPAT:

Tadi sudah dijelaskan oleh beberapa Direktur. Nampaknya semuanya fine saja tidak ada perlu bantuan Komisi IV. Tadi kan sudah dijelaskan nih. Semuanya akan begini, akan begini. Berarti tidak perlu bantuan Komisi IV Pak Eko. Kan begitu kan.

Ya selanjutnya siapa tadi?

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Mungkin pak wawan..

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Baik.

Terima kasih Pak Eko.

Pimpinan dan Anggota Dewan,

Saya ke Sang Hyang Seri setelah dari Bulog itu kira-kira akhir Tahun 2018 Pak Ketua. Kondisi saat itu kami masuk ke Sang Hyang Seri antara yang hadir ditempat ini. Kondisi perusahaan barangkali ditempat kami yang sangat luar biasa Pak.

KETUA RAPAT:

Luar biasa hebatnya atau luar biasa apanya ini. Mesti jelas kalau ngomong.

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Belum Pak. Baru koma Pak Ketua.

Yang pertama, kami masuk pegawai belum menerima kewajibannya. Jadi sama dengan Pak Eko tadi pengalaman di Berdikari. Kira-kira saya masuk kesana ada kurang lebih 5 atau 6 bulan gaji belum dibayar Pak. Kemudian kondisi keuangan *operating cash flow*, kami negative Bu.

KETUA RAPAT:

Saya tanya, kalau karyawan anda 5-6 bulan tidak gajian berarti tetap makan. Itu ada sesuatu. Tolong dijelaskan secara gamblang. Karena yang saya tahu beberapa lokasi Sang Hyang Seri disewakan oleh oknum. Jadi kalau 5-6 bulan tidak kerja. Kalau saya berhentilah kalau saya. Jadi tolong jangan ditutup-tutupi, kita cari solusinya, misalnya lokasi A ini disewakan oleh si B. Si B diberhentikan saja sudah. Si A yang sudah bayar dikasih hak pakai misalnya. Ya sudah saya kasih kamu 3 tahun. Setelah 3 tahun kamu keluar tanpa kompensasi tanpa apa, kembalikan lagi ke SAS. Hal ini saya dengar sudah lama sekali. Ini tidak bedanya dengan Inhutani. Jadi ini terbuka saja Pak Dirut. Kalau tidak bagaimana kita mau cari solusinya.

Silakan.

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Betul Pimpinan. Dan selama Tahun 2019 Inshaa Allah saya sudah memberhentikan beberapa pegawai dan juga menurunkan jabatan-jabatan mereka menjadi staf. Itu sebagai bentuk dari komitmen yang disampaikan oleh Pak Pimpinan tadi. Tetapi bahwasannya ada beberapa praktek seperti itu tidak menutup kemungkinan Pak Ketua. Terkait dengan pengelolaan lahan kita. Mungkin yang dimaksud Pak Ketua yang di Sukamandi barangkali.

Kami lanjutkan Pak Ketua, kondisi operating cash kami negative. Kemudian saat itu kami betul-betul tidak punya modal sama sekali Pak Ketua. Uang kas yang ada dilaporkan Direktur Keuangan saat itu hanya kurang lebih 5 sampai dengan 10M. Sementara gaji dan operasional sendiri 1 bulan saat itu kurang lebih 8M Pak. Jadi itu kira-kira kondisi kami saat awal masuk ke Sang Hyang Seri seperti itu Pak Ketua.

Kemudian 2019 karena kami sudah ... 5 sehingga tidak ada perbankan yang mau memberikan pinjaman kerja ke kami. Maka didalam upaya kita memperoleh pendapatan kami melalui sinergi bekerjasama dengan BUMN maupun BUMS. Salah satunya adalah dengan anak perusahaan SNI yang namanya Nusindo. Kami bekerjasama, kami diberikan modal. Kemudian Nusindo diberikan status sebagai distributor benih kami. Kemudian disitu kita ada bagi hasil dengan Nusindo.

Kemudian yang kedua, kami mencoba mendekati perbankan yang kira-kira punya kewajiban dengan kami. Salah satunya Alhamdulillah 2019 kami mendapat konsep project financing dari BNI senilai 70 Miliar. Itulah selama 2019 modal itu kami lakukan perputaran. Maka kemudian omset atau penjualan kami memang tidak bisa mencapai optimal sesuai dengan kapasitas produksi yang kami punya Pak. Kami punya kapasitas produksi tadi disampaikan ke teman-teman Anggota Dewan. Ada 82.000 ton 1 tahun. Kami hanya bisa memproduksi 2019, itu hanya 15.000 ton Pak Ketua. Karena apa? Peluangnya ada, potensinya ada. Tetapi memang kondisi saat itu 2019 kami sangat kesulitan untuk memperoleh modal kerja.

Nah sekarang 2020 Pak Ketua, kami dengan kondisi KOL 5 tersebut. Alhamdulillah untuk sinergi BUMN dan juga swasta sudah cukup meningkat. Mungkin untuk Tahun 2020 kami lebih optimis bisa lebih mendapatkan omset lebih besar daripada Tahun 2019. Jadi ini sebenarnya persoalan pokok yang ada dikami di Sang Hyang Seri Pak. Jadi pendapatan kami rendah, omset kami rendah. Dari situ kemudian dampaknya apa? Margin yang kami peroleh pun kemudian kami rendah Pak. Dari margin seperti itu kemudian operating cash kami juga pasti negatif. Itu semua karena apa, karena memang dari awal tidak punya kemampuan untuk memproduksi dan menyerap produk-produk

benih yang ada di, baik itu dilahan kami maupun kemitraan dengan teman-teman petani. Itu di 2019 kondisinya Pak Ketua.

Nah terkait tadi langsung menyambung pertanyaan beberapa Anggota Dewan yang terhormat. Kami sebetulnya hanya ingin mengatakan Pak Ketua, ini mungkin detail teknis termasuk menjawab tadi Pak yang dibelakang disampingnya Pak Slamet, Pak Sutrisno. Ini agak detail teknis Pak Ketua, tapi saya harus jelaskan. Ini kadang banyak yang kurang pas termasuk diinternal kami sendiri. Kami punya lahan.

KETUA RAPAT:

Pak Sutrisno dijelaskan secara detail ya, supaya paham Pak.

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Kami punya lahan Pak Ketua 3000 hektar di Sukamandi. Dan itu selama ini prosesnya adalah dengan cara kerjasama kemitraan dengan petani. Mereka menyewa lahan kami. Bersih dari sewa lahan itu 1 bulan itu kurang lebih 6 Juta 500 per hektar. 1 musim Pak Ketua. Jadi kalau 6 juta 500 kali 3000 itu kira-kira 18M. Kalau saya mengupayakan itu 2 musim maka saya kira-kira punya 36 sampai dengan 40M. Begitu Pak. Ya tadi sama angkanya.

Kemudian dari situ, pendapatan kami bukan hanya dari sewa. Kami juga melakukan sewa itu dalam bentuk setoran gabah. Jadi bukan mereka bayar sewa cash Pak. Mereka bayar uang sewa dalam bentuk benih senilai 2 ton per hektar. Karena kami menilai per hektarnya itu kira-kira kurang lebih kita beli per kilonya itu adalah 5000. Nah selain dari sewa senilai 6,5. Kami juga ada dari keuntungan-keuntungan omset penjualan benih. Dan itu untungnya Pak Ketua, itu kurang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Febri. Kita hanya 5% jual kepada program Pemerintah. 5% Pak margin kita dari pelaksanaan penjualan benih kira-kira ke program Pemerintah. Sehingga kalau hitungan saya Pak Ketua. Ini hitungan saya Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Dirut,

Dulu setahu saya kan bedikari maupun SHS dapat PSO ya.

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

PSO selesai 2018 Pak.

KETUA RAPAT:

Tidak ada lagi ya setelah itu?

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Tidak ada lagi Bapak.

KETUA RAPAT:

Jadi pasar bebas?

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Betul-betul *free market* Pak. termasuk program Kementan pun itu adalah free market. Karena kita bersaing dalam lelang.

KETUA RAPAT:

Kira-kira kenapa sebab dia bisa free market?

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Kebijakan Kementerian Pertanian barangkali Pak Ketua ijin.

KETUA RAPAT:

Anda tidak jujur jawabnya.

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Sebetulnya itu kan kebijakan Kementerian Pak Ketua. Itu satu.

KETUA RAPAT:

Kenapa kebijakan Kementerian seperti itu. Apakah, misalnya oh Pertanian sama SHS benih bibitnya jelek. Itu mungkin salah satunya. Atau ada yang tidak terpenuhi persyaratannya. Jelas kan.

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Setahu kami nih Pak Ketua ya. Itu modelnya hampir sama dengan Raskin menjadi BPNT Pak. Seperti indicator tidak tepat sasaran, seperti indicator terkait dengan kualitas dan lain sebagainya. Kalau saya melihat pengalaman diskusi dulu sejak di BULOG terkait pupuk, benih, dan juga beras. Itu lebih banyak kepada alasan tidak tepat sasaran, kemudian mungkin kualitas, dan lain sebagainya. Makanya kemudian program subsidi itu beralih seluruh anggaran itu dikelola oleh Kementerian terkait. Jadi tidak ada lagi program subsidi. Itu barangkali mungkin Pak Ketua.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pak Ketua,

Andaikan PSO juga dikasih, tidak akan bisa jalan. Ekuitasnya minus 1,5 Triliun. Dari mana duitnya untuk menggerakkan usaha. Dari tahun ke tahun naik terus 150 sampai 200 Miliar itu kerugian.

KETUA RAPAT:

Begitu Pak dirut?

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Ijin Pak Ketua.

Ekuitas nilai perusahaan kita memang negative Pak Ketua. Karena apa? Dibandingkan antara hutang dengan ekuitas itu adalah negatif. Karena ekuitas yang kami miliki disitu hanya 503 Miliar Pak Ketua. Sesungguhnya asset kami yang di Sukamandi saja nilainya 4 Triliun Pak. Selama ini kita belum pernah melakukan *appraisal* dan revaluasi asset. Nah tahun ini kita melakukan program itu. Sehingga kalau itu direvaluasi nilai ekuitas kita itu 4 Triliun Pak. Karena selama ini tidak pernah asset kami itu direvaluasi *appraisal*.

KETUA RAPAT:

Jadi sebelum anda jadi Dirut tidak ada evaluasi?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pak Ketua,

Andaikan itu dilakukan itu tinggalkan saja, tidak lancar. Tidak akan bisa jalan usaha. Itu sudah dilakukan oleh Pertani itu.

KETUA RAPAT:

Tapi paling tidak mungkin begini Pak Sutrisno. Kalau itu memang sudah dihitung menjadi asset mungkin menjadi 4 Triliun Inshaa Allah ada perbankan yang mau meminjamkan uang. Karena yang lalu-lalu yang nama petani SHS ini rentalnya rental benih. Bukan PSO benih tapi rental benih. Benih direntalin, di pindahkan lagi itu Direksi yang lama. Mudah-mudahan Direksi yang sekarang tidak seperti itu. Sedikit banyak punyalah jiwa nasionalis. Kasihan rakyat. Ya Pak Dirut ya.

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Betul Pak Pimpinan. Dan 1 lagi kami tambahkan barangkali. Masalah efisiensi perusahaan Pak. Jadi kami melakukan program kegiatan efisiensi perusahaan. Tadi yang kami sampaikan pendapatan rendah karena memang penjualan kami rendah. Penjualan rendah karena memang produktivitas kami rendah. Itu karena apa? Karena rentetannya tadi kami tidak punya *working capital*. Nah kalau pun misalnya itu proses penjualannya terjadi sampai 40% saja Pak Ketua sesuai kapasitas. Tapi kalau perusahaan tidak melakukan efisiensi saya kira. Inshaa Allah didalam cluster pangan ini Pak Ketua. Ini di 2020 efisiensi dengan target 30 sampai dengan 50 persen Pak. Sehingga diupayakan peningkatan industri benih meningkat. Dengan adanya kemitraan modal kerja tadi. Yang kedua kami juga melakukan efisiensi. Nah sehingga didalam RKAP kami 2020 kami mengupayakan kami dengan efisiensi dan peningkatan penjualan melalui kemitraan permodalan maka kami upayakan 2020 paling tidak kita sudah dapat positif walaupun itu hanya 1-2M. Menutupi bisa membayar gaji, bisa membayar kewajiban dan lain sebagainya.

Itu barangkali Pak Ketua secara umum.

KETUA RAPAT:

Tidak ada usulan lain, hanya itu saja penjelasannya?

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Usulan kami yang pertama tadi Pak Ketua terkait dengan.

KETUA RAPAT:

Usulan ini belum tentu diterima loh tapi mengusulkan boleh-boleh saja.

DIREKTUR UTAMA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) (KARYAWAN GUNARSO):

Terkait dengan penguatan modal perusahaan saja walaupun kami sudah melakukan sinergi dengan BUMN dan BUMS, penguatan modal adalah penting bagi kami. Potensinya besar Pak Ketua. Kami punya lahan 3000 hektar. Kami bisa tanam benih cukup banyak. Tapi kami tidak bisa ... seluruh produksi benih. Itu mungkin terkait dengan industri perbenihan Pak Ketua. Dan itu tetap menjadi core bisnis kami Pak Haerudin. Cuma tadi yang kedua program kami Pak Ketua, kami punya asset selain sawah 3200. Itu ada *emplacement* tanah kosong disitu yang cukup luas Pak. Dan kami ingin meningkatkan value perusahaan. Salah satunya dengan mengoptimalkan itu Pak. Makanya sekarang kami sinergi dengan Bedikari, sinergi dengan Perinus, kemudian dengan teman-teman lain. Memanfaatkan lahan itu Pak. Salah satunya mungkin kami tadi laporkan dimanfaatkan dalam proses hilirisasi produk-produk pangan Pak. Mungkin disitu nanti ada hilirisasi terkait

dengan beras, hilirisasi terkait dengan produk-produk hortikultur dan lain sebagainya. Jadi itu usulan kami Pak, yang kedua Pak.

Terima kasih Pimpinan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pimpinan, sama-sama orang Bank nih Pak. Saya mantan Bank Indonesia Pak. Ini hutangnya perusahaan saja ini, hutang Bank 1 Triliun. Hutang Pemerintah 650 Miliar. Kemudian utang kepada vendor 180 Miliar. Kalau mau selamat usaha ini tinggal asset dijual, bayar hutang. Sisanya tinggal digerakan. Mau bagaimana mungkin. Tidak jalan lain. Sebagaimana juga pabrik gula di Jatiwangi di Kadipaten itu dijual. Tinggal satu ada di Jatitujuh. Di Gempol juga dijual di Cirebon. Mau kayak apa pun, teori mana pun tidak akan bisa diterapkan untuk bisa menyembuhkan perusahaan itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak tidak boleh terlalu pesimis Pak. Justru Beliau-Beliau ini datang kesini mengadu kepada kita, kita cari bantu solusi.

Selanjutnya Pak Eko. Siapa lagi yang belum?

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Izin hampir mirip, Pertani, Silahkan.

DIREKTUR UTAMA PT PERTANI (PERSERO) (Dr. FEBRIYANTO, S.E., M.Com., MTQM.):

Terima kasih Pak Eko.

Bapak Pimpinan yang kami hormati,
Bapak/Ibu Anggota Dewan Komisi IV yang kami muliakan,

Saya ijin menambahkan sedikit penjelasan dari Pak Dirut SHS tadi Pak Pimpinan. Sebetulnya memang mirip Pak isu yang kita hadapi. Kami ini kalau istilahnya masuk ke BUMN sekarang ini kan konteksnya cuci piring Pak ya. Piringnya agak sompel pula lagi tuh Pak. Jadi mungkin sedikit menjelaskan pertanyaan dari Ansy Silema tadi Pak ya. Tapi mohon maaf saya tidak mewakili kawan-kawan BUMN yang lain Pak. Paling tidak ini apa yang saya hadapi, saya rasakan di Pertani dimana kami diberi kepercayaan sejak kurang lebih setahun yang lalu. Jadi kalau ditanya kenapa sih BUMN ini tidak kompetitif Pak Ansy Yang pertama kalau saya melihat. Mohon maaf sekali Pak Khaerudin, tidak bermaksud ini MKD UP4 SKS tidak Pak. Ini secara professional apa yang kami lihat, apa yang kami alami.

Yang pertama kelihatannya beberapa BUMN yang selama ini menerima PSO itu telat berubah Pak, nyaman. Sehingga pada waktu kita *switch* disuruh komersial akhirnya tergopoh-gopoh. Itu juga jadi masalah dalam proses manajerial.

Kemudian yang kedua, rata-rata BUMN itu ini sangat internal. Ini ada masalah eksternal, masalah internal. Ini didalam itu kita menghadapi masalah SDM yang cukup kompleks, dari sisi kualitas, sisi kuantitas. Sehingga kalau tadi dikatakan kenapa sih kok Pertani kalah bersaing dengan BISI misalnya. Konteksnya beda Pak. BUMN tidak boleh diadu dengan hedon dengan swasta Pak karena konteksnya beda.

Yang ketiga, kami banyak menghadapi beban masa lalu sehingga kalau kita diadu tanding dengan swasta kami rasanya sulit kompetitif. Misalnya begini, untuk menghasilkan 1000 ton benih. Kalau BISI mungkin cukup 1 orang tapi di kami butuh 10-15 orang. Karena kami dilahirkan sudah dalam kondisi punya resos yang cukup banyak. Nah ini beban masa lalu. Kemudian beban masa lalu juga ini terkait dengan keuangan. Misalnya dana pensiun Pertani Pak, barangkali Bapak tahu. Sekedar informasi juga kami belum fully funded Pak. Kami masuk kategori 3, dananya kurang likuid Pak. Sehingga kami masuk dalam pengawasan OJK. Kenapa Pertani tidak bisa fully fundedkan dana pensiun Pertani sehingga kesejahteraan pensiun barangkali terganggu. Karena kami memang tidak punya uang untuk melunasi PSL ke dana pensiun.

Kemudian masalah hutang Pak. Sama kondisinya dengan Hutang kami sekarang 850 Miliar berupa hutang ke perbankan, ke RDI, dan sebagian hutang komersial. Ibaratnya kalau sekarang kami bekerja uang kami margin kami habis untuk bayar hutang Pak. Jadi apalagi yang bisa pakai untuk pengembangan. Itu jadi masalah.

Kemudian persediaan. Ini barangkali juga ya. Kita juga punya banyak persediaan yang kita sebut stok mati Pak, seperti pupuk jaman kerajaan Majapahit yang sudah tidak bisa kita jual, ini sudah beracun. Dijual juga susah. Kalau kami mau jual ... ini aturan yang mengatur seperti apa, ini juga kami harus hati-hati Pak. Karena ini kan asset negara Pak sudah masuk balanced Pak. Ini juga jadi masalah bagi kita. Belum lagi piutang-piutang macet masa lalu yang jumlahnya juga cukup signifikan. Sehingga setiap tahun harus kita sisihkan. Ini pengaruhnya ke laba-rugi Pak.

Kemudian secara over all proses bisnis kita kurang efisien Pak. Harus kita jujur kita akui Pak. Di 2019 misalnya kami contoh focus ke pembenahan harga pokok produksi. Kami bisa menurunkan rata-rata 3% tahun ini Pak. 3% dari omset 1 Triliun berapa puluh Miliar yang kami bisa hemat. Kira-kira seperti itulah in-efisiensi yang barangkali dihadapi oleh kawan-kawan pada masa itu. Kemudian di overhead juga sama Pak. Kami bisa efisien kan kurang lebih 20% dari total biaya overhead tahun lalu. Nah ini berkontribusi kepada laba-rugi kita. Jadi walaupun misalnya di Tahun 2019 laporan keuangan kita an audited Pak. Kami masih rugi, tapi paling tidak rugi kami sudah jauh lebih kecil daripada tahun sebelumnya.

Kemudian yang disampaikan Pak Karyawan tadi benar Pak. Kami juga coba di Tahun 2019 ini melakukan revaluasi asset. Sehingga kalau kita lihat laba komprehensif kita sekarang di kisaran 600 Miliar. Tapi memang itu non cash. Kenapa kita lakukan itu? Konteksnya kita memperbaiki struktur balanced Pak. Kalau revitalisasi asset kita lakukan, kita ... kita meningkat sehingga kita kemampuan berhutangnya meningkat Pak. Ini konteksnya kita menjaga modal kerja kita supaya lebih baik kedepan dalam rangka pengembangan.

Mungkin kira-kira begitu Pak. Ini mungkin diskusinya bisa panjang Pak, bicara kenapa BUMN tidak kompetitif.

Kemudian terkait dengan PSO, mungkin menambahkan penjelasan Pak Karyawan tadi Pak. kami masukan kondisinya sudah demikian. Tapi yang saya dengar cerita dari kawan-kawan sebetulnya PSO ini dicabut katanya Pak, memang desakan dari kawan-kawan kita juga yang non BUMN. Jadi ini isu kompetisi Pak. Kemudian juga ada isu yang saya dengar katanya kaitannya dengan Desa Mandiri benih Pak. Ini kan kalau kita lihat mohon maaf sekali lagi, ini kan korporasi petani yang ... up korporasi. Jadi sebetulnya kami juga bingung Pak, sebetulnya yang mau dibela ini BUMN atau korporasi. Nah itu yang menjadi isu juga terkait dengan kenapa Pak lksan PSO dicabut. Itu yang kami ketahui Pak.

Nah kemudian dari Pak Panggah, rasanya kami sependapat Pak. kita harus focus ke bisnis kita. Di RJPP kami sejak Tahun 2020-2019 state bahwa kami bisnisnya focus memang hanya ke perbenihan dan perberasan. Pupuk pelan-pelan akan kita tinggal. Kenapa distribusi pupuk, subsidi itu memang rasanya 3-4 tahun lagi akan hilang. Jadi memang kita focus ke benih dan beras. Kenapa kami sekarang focus ke beras. Karena memang dulu kami focus ke benih Pak. Fokus Pak Panggah ke benih. Beras itu kita mulai karena pada waktu itu ada kredit macet Pemerintah berupa *rice milling* yang kemudian asset sitaan itu diserahkan ke Pertani sehingga kita optimalkan sampai sekarang.

Nah mungkin itu Pak Pimpinan yang kami hormati. Barangkali kalau kami boleh bicara mohon dukungan Bapak/Ibu dari Komisi IV. Mungkin mohon difasilitasi kami dengan regulator terkait agar kami diperlakukan lebih objektiflah. Tadi saya sampaikan, ini mohon maaf sekali lagi Pak. Kalau kita berbicara pelaku ekonomi dalam konteks ekonomi Pancasila, BUMN, koperasi swasta, itu semua kan pelaku ekonomi yang harus saling hidup dan menghidupi. Nah tadi saya sampaikan juga. BUMN tidak boleh dong dihadapkan *head on* berkompetisi dengan swasta. Karena kami pasti akan kalah, karena terlalu banyak isu masa lalu yang harus kita beres. Tapi pada saatnya rasanya kami juga sependapat. Jangan dinabobokan BUMN dengan PSO-PSO barangkali sehingga akhirnya kita juga tidak mampu membangun kompetitifnya atau daya saing. Nah yang kami inginkan sebetulnya mohon di support Bapak/Ibu bagaimana kira-kira regulator supaya. Toh saya sudah sampaikan di bahan paparan kami diawal Pak, Pertani, Sang Hyang Seri dari awalnya dibangun itu sebagai unit bisnis Kementerian Pertanian. Tapi barangkali sekarang kita mungkin agak nakal ini

anak-anaknya Pak jadi mungkin agak dilupakan. Kami mohon difasilitasi. Contoh begini Pak mohon maaf, pada waktu importasi bawang putih. Kami juga mengajukan ijin importasi bawang putih. Tapi ijin importasi kami tidak keluar. Sementara yang lain diberikan sehingga kawan kami Sang Hyang Seri juga semestinya bisa terbantu dengan importasi itu. Itu yang barangkali contoh-contoh Pak yang barangkali di bahan paparan kami ada Pak lebih detail, beberapa dukungan yang kami harapkan dari Bapak-Bapak dan Ibu Komisi IV.

Mungkin itu barangkali Bapak Pimpinan, Bapak/Ibu sekalian sekedar tambahan penjelasan dari kami Pertani.

Terima kasih Pak Eko.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT: (DANIEL JOHAN, S.E./F-PKB):

Wa'allaikumsalam.

Ya terima kasih.

Ada yang lain?

Entah sudah diusulkan mungkin apakah seperti bentuk konsinyering ya yang bicara khusus secara mendalam ya. Kita bahas secara detail, baik dalam konteks kebijakan maupun hal-hal lain yang strategis bagaimana kita menempatkan BUMN benar-benar sebagai tulang punggung ekonomi bangsa. Sempat tadi ada komentar, contoh Sang Hyang Seri. Kalau kayak begini apa kita collaps-in saja. Saya bilang kalau saya pribadi bukan soal tidak benarnya, karena punya historisnya Pak. Sang Hyang Seri itu bagian dari mewujudkan ideology ekonomi kita kan dari jaman Bung Karno dan itu sebenarnya harus kita wujudkan.

Ada lagi?

Kalau tidak ada cukup ya. Mungkin kita ada kesimpulan ya? Tidak ada?

Silakan Bu.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Tadi sesuai dengan kesepakatan teman-teman kita perlu diskusi lebih dalam tapi tidak keseluruhan begitu Pak. Jadi 2 BUMN, atau 1 BUMN. Supaya tadi, jalan keluarnya bisa lebih positif lagi dan bisa diaplikasikan dengan baik.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya oke makanya pertemuan itu apakah dalam bentuk konsinyering sehingga kita bisa focus atau seperti apa. Nanti kita bahas ya. Dan mungkin jangan semualah, tapi minimal ya yang sejenis-sejenis ini bisa kita lakukan secara bersama. Tapi apapun nanti, entah konsinyering atau apa sebelum kita lakukan itu masing-masing sudah punya usulan ya. Sehingga kita bisa tindak lanjuti dengan konkrit ya.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E):

Pimpinan, mengingatkan kembali. jadi seperti tadi jangan sampai dari Ibu yang paling ujung tadi ya. Jadi materi sebelum kita bahas 3 hari sudah sampai ke kita. Dan juga adalah jangan sampai fotocopy-an kayak gitu. Nanti kalau misalnya di highlight yang warna-warni kita tidak kelihatan. Jadi jangan kayak rapat ini kayak rapat pura-pura gitu loh. Jadi kita sama-sama sungguh-sungguh antara Anggota dan juga mitra, bagaimana kita nanti kan benar-benar kita bedah untuk mencari solusi dan tolong juga mitra itu bisa menyampaikan secara gamblang. Jadi kita juga bisa tahu sebenarnya yang ingin dijadikan solusi itu apa. Jangan sampai takut-takut hanya untuk menutupi. Jadi nanti kita juga kena getahnya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya. Catatannya itu dari Komisi IV.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Terakhir Pimpinan sedikit memperkuat saja. Tadi dari awal saya interupsi, tadi juga saya berikan saran. Saya melihat situasi-kondisi BUMN kita yang cukup crowded. Saya menyarankan Pimpinan beserta Kapoksi duduk mengeinvetalisir semua permasalahan, menisir semua masalah. Kemudian kita buat rapat internal sehingga kita punya skema. Waktu kita bertemu dengan mereka kita sudah ada solusi yang bisa kita berikan, bila perlu kita panggil Menteri terkait, atau pihak terkait untuk kita selesaikan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ya saya usulkan nanti mungkin Senin kita ada Rapat Pimpinan dengan Kapoksi. Tidak hanya ini, tapi ini salah satu agenda plus agenda yang lain yang bisa diusulkan oleh Kapoksi.

Ini kesimpulan ini. Kita bacakan atau bagaimana?

Tidak ada kesimpulan kan.

Ada kesimpulan kita, karena kita RDP, bukan RDPU. (Tidak bisa ditampilkan). Oke saya bacakan.

Kesimpulan, keputusan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia Persero, PT Sang Hyang Seri Persero, PT Pertani Persero, PT Berdikari Persero, Perum Perikanan Indonesia, PT Garam Persero dan PT Perikanan Nusantara Persero terkait dengan strategi dan kebijakan dalam mendukung pengembangan sector pangan, pertanian, kelautan dan perikanan nasional.
Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan penguatan dan peningkatan peranan BUMN pertanian sesuai dengan kompetensi intinya dalam menunjang pembangunan pertanian yang berkesinambungan dan bermanfaat bagi petani. Terutama dalam penyediaan sarana prasarana pertanian seperti dalam penyediaan benih atau bibit unggul yang dibutuhkan petani.

Setuju?

Dari pihak BUMN setuju?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI meminta BUMN pertanian dan BUMN kelautan dan perikanan untuk melakukan sinkronisasi dan meningkatkan sinergitas dalam mendukung peningkatan ekspor pangan, menjamin stabilitas harga, dan ketersediaan pasokan pangan melalui penguatan manajemen rantai pasok dan penataan internal, baik financial maupun operasional.

Setuju?

Pihak BUMN setuju?

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Setuju Pak.

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

4. Komisi IV DPR RI meminta BUMN pertanian, serta BUMN kelautan dan perikanan untuk melakukan koordinasi dengan lintas Kementerian atau Lembaga agar menerapkan hasil penelitian para ahli dibidang

pertanian, kelautan dan perikanan guna memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Setuju?

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Setuju Pak.

PIMPINAN KOMISI IV (DANIEL JOHAN, S.E./F-PKB):

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI mengharapkan Pemerintah untuk memberikan alokasi penyertaan modal negara kepada PT Sang Hyang Sering, PT Pertani, PT Berdikari Persero, dan Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara Persero dan PT Garam Persero dalam menunjang penguatan manajemen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setuju?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Sebentar Ketua.

Kalau menurut saya yang point 5 memberikan modal kerja. Saya pikir setelah rapat baru kita kaji. Kalau memang nanti setelah kita beri modal tambah parah kan musibah mereka.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Artinya apa? Kita hapus dulu saja?

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E):

Hapus dulu saja Ketua.

PIMPINAN KOMISI IV (DANIEL JOHAN, S.E./F-PKB):

Hapus saja ya.

Oke Pak ya?

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Oke Pak.

KETUA RAPAT:

Berarti yang No. 5 di drop dulu sementara.

Berarti yang No. 6 jadi No. 5.

6. Komisi IV DPR RI menerima usulan PT Sang Hyang Seri Persero agar Pemerintah mengkaji kembali program subsidi benih pertanian dalam rangka ketersediaan benih dan ketersediaan pangan nasional. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan mendalam dengan mitra kerja Kementerian pertanian.

Setuju?

.....:

Terima kasih Pimpinan, Pak Eko.

Terkait dengan subsidi benih kami pikir karena bisnis kita sama dengan SHS, Pertani juga include di dalamnya Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi digabungin kalimatnya?

.....:

Iya.

.....:

Itu SHS dan Pertani.

PIMPINAN KOMISI IV (DANIEL JOHAN, S.E./F-PKB):

Jadi Komisi IV DPR RI meminta usulan PT Sang Hyang Seri Persero dan Pertani Persero.

Jadi saya ulang,

6. Komisi IV DPR RI menerima usulan dari PT Sang Hyang Seri Persero dan Pertani Persero dan seterusnya sama.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV DPR RI meminta PT Berdikari Persero untuk menyederhanakan lini usahanya dan focus terhadap penyediaan

komoditas pangan protein dan bahan baku pendukung produksi peternakan.

Setuju?

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Teman-teman setuju?

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV DPR RI mendorong pembukaan unit pengembangan baru oleh Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara Persero dan PT Garam Persero di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan dalam rangka percepatan ekspansi, ekstensifikasi, revitalisasi, diversifikasi, inovasi teknologi, 4G, dan digitalisasi serta optimalisasi sector kelautan perikanan.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

8. Komisi IV DPR RI mendorong Perum Perikanan Indonesia PT Perikanan Nusantara Persero, dan PT Garam Persero untuk menjalankan pola kemitraan dengan pelaku utama kelautan, perikanan, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengelola dan pemasar hasil perikanan yang berbasis fasilitasi lembaga keuangan dalam rangka menjadi perusahaan perikanan yang unggul, andal, dan kuat demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Setuju?

Dari mitra setuju?

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Dari Anggota?

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

9. Komisi IV DPR RI mendorong Perum Perikanan Indonesia untuk dapat mengelola usaha tempat labu disetiap pelabuhan perikanan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

10. Komisi IV DPR RI mendorong Perum Perikanan Indonesia dan PT Perikanan Nusantara Persero untuk dapat mengoptimalkan operasi kapal atau armada penangkapan dan angkut ikan guna mendukung peningkatan produktivitas penangkapan ikan di wilayah potensi perikanan perikanan seluruh Indonesia.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Terakhir sebelas,

11. Komisi IV DPR RI mendorong PT Garam Persero dalam peggaturan stok garam nasional dan stabilisasi harga garam serta mendorong bekerjasama dengan lembaga lain khususnya importir untuk wajib menyerap produk garam dari PT Garam Persero guna memberikan perlindungan terhadap petambak garam rakyat sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Demikian.

Sebagai penutup mungkin dari mitra ada kalimat.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) (EKO TAUFIK WIBOWO):

Baik Pak Ketua.

Para Anggota yang saya hormati,

Secara umum diskusi dan beberapa hal yang menjadi masukan Anggota Dewan sangat akan kami perhatikan dan terutama ada hal-hal yang belum sempurna dalam kesiapan kami dalam rapat hari ini. Ini menjadi

catatan kami. Kemudian hal-hal yang tercantum dalam kesimpulan tadi pada prinsipnya kami setuju 100%. Dan diharapkan kedepannya seperti tadi ada usulan-usulan untuk lebih pendalaman dari masing-masing kami pada prinsipnya siap untuk berkoordinasi dan menjadikan juga mitra kami alat control kami untuk pengembangan BUMN secara umum.

Demikian terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah RDP pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI mohon maaf bila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil'amin RDP kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.30 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001

